

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**AYUDYA FITRIA MAZDALIFA  
NIM. 0910310021**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2013**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan

**Disusun oleh** : Ayudya Fitria Mazdalifa

**NIM** : 0910310021

**Fakultas** : Ilmu Administrasi

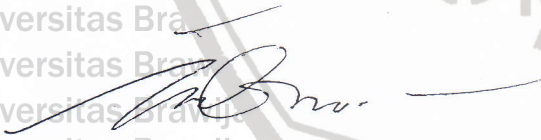
**Jurusan** : Administrasi Publik

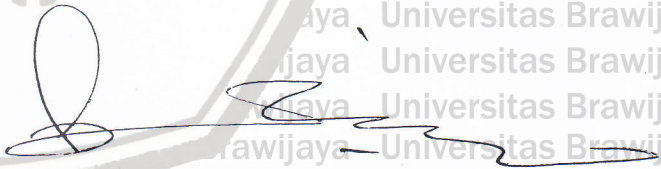
Malang, 7 Maret 2013

Komisi Pembimbing



Ketua

Anggota

  
**Prof. Dr. M. Irfan Islamy, MPA**  
NIP. 19440511.197302.1.001

  
**Fadillah Putra, S.Sos, M. Paff**  
NIP. 19740627.200312.1.001





**Saya persembahkan karya ini kepada Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik saya tercinta.**

Setia orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang menjadikan satu orang dengan orang yang lainnya saling membutuhkan dalam segala hal. Begitu pula dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak terlepas dari bantuan dan dukungannya pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ayahanda Fatkur Rohman dan Ibunda Jamia atas segala keikhlasan, kepercayaan dan do'a nya di setiap jengkal langkah saya. Nenek dan kakek: Astimunah, Kasumiati, Mad Safi'i yang sudah mendoakan selama ini. Adik-adik saya tercinta Ainun Nadhifa dan Faizzatuzzuhroh yang menjadi semangat bagi saya.
2. Dosen pembimbing Skripsi: Bapak Prof. Dr. M. Irfan Islamy MPA dan Bapak Fadillah Putra, S.Sos, M. Paff yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti selama proses awal hingga akhir penyelesaian skripsi.
3. Dosen Penguji: Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si yang telah memberikan banyak saran untuk perbaikan skripsi ini.
4. The best person: Bapak M. Said, S.Sos, MAP yang sudah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini, Amma Fathuurrahmaan, S.Ip yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti sejak awal hingga akhir masa pendidikan di Universitas Brawijaya, Idlam Cholid Yuliansyah yang sudah memberi semangat dan dukungannya serta membantu untuk memperoleh data-data penelitian dilapangan hingga terselesaikannya skripsi ini dan Jhananta Rhaksandy, S.Pd yang sudah membantu dalam menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
5. Sahabat-sahabat tercinta: Lailiyul Ansorih, Prayudha Setia, Ayu Novia, Evi Silvia, Kirana Ayu, Achmad Nur Haida, dan Rizky Dwi Maladha yang telah memberi semangat, dukungan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman Kertorahayu Dalam 82B: MbK Heni, MbK Tika, MbK Ayu, Indri, Aul, Eva, Helmi, Risma dan Uri yang sudah seperti keluarga ke dua bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang.
7. Teman-teman HMI FIA UB, para Kakanda: M Barqah prantama SAP MAP, Galih Perdana Putra SAP, Reza Septianto SAP, Hidayaturrohmah SAP, Saiful Arifin SAB, Rahmad Novianto SAB, Dian Candra Pramono, Dian Purnomo dan Ricky Hendra Sukamana yang sudah berbagi pengalaman. Teman-teman seperjuangan: Gigih Rendy Sujoko, Fernanda Arman, Aprilia Malik, Susilowati, Tyas Siska, Dira Efendi, Alm. Rumiani, Sabita Karima, Atul, dan Resti Mela.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga diberikan kebahagiaan, rizki yang melimpah dan kemudikan dalam segala urusannya.  
Amin...

Malang, Maret 2013

Peneliti



## MOTTO

- ❖ Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum (Mahatma Gandhi).
- ❖ Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan saya percaya pada diri saya sendiri (Muhammad Ali).
- ❖ Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan (Tom Bodett).
- ❖ Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan (Frederick E. Crane).
- ❖ Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya: hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah (Abu Bakar Sibli).
- ❖ Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia (Joel Arthur Barker).
- ❖ Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejanya (Abraham Lincoln).
- ❖ Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi (Martin Luther King).
- ❖ Kemenangan yang seindah – indahnyanya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri (Ibu Kartini).
- ❖ Yakin Usaha Sampai (HMI 5 Februari 1947).
- ❖ Kita dilahirkan dengan segala sesuatunya yang akan menjadikan kita besar dengan usaha dan do'a (Ayudya Fitria Mazdalifa, Malang Maret 2013).



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 April 2013

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Ayudya Fitria Mazdalifa

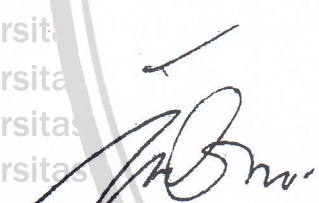
Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
di Kabupaten Lamongan

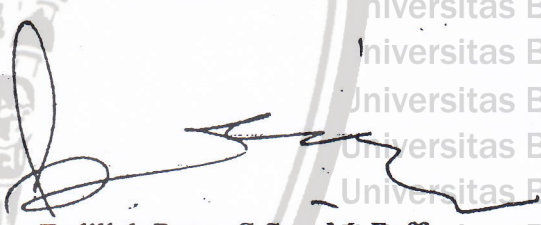
dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

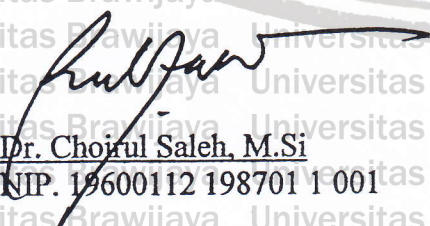
Anggota


  
Prof. Dr. M. Irfan Islamy, MPA  
NIP. 19440511 197302 1 001

  
Fadillah Putra, S.Sos, M. Paff  
NIP. 19740627 200312 1 001

Ketua

Anggota

  
Dr. Choifur Saleh, M.Si  
NIP. 19600112 198701 1 001

  
Drs. Minto Hadi, M.Si  
NIP. 19540127 198103 1 003

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Maret 2013

METERAI  
TEMPEL  
PAKAIKEMBANGUNANBANGSA  
TGL.

BAD02ABF009656015

ENAM RIBU RUPIAH

6000



Ayudya Fitria Mazdalifa  
NIM. 0910310021



## RINGKASAN

Ayudya Fitria Mazdalifa, 2013, **Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan**, Prof. Dr. M. Irfan Islamy MPA, Fadillah Putra S. Sos. M. Paff, 175 Hal + xvii

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Kabupaten yang terletak pada posisi strategis skala Nasional yaitu termasuk dalam Gerbangkartasusila plus dengan pusat di Metropolitan Surabaya dan secara sistem perwilayahan dengan ditetapkannya Surabaya sebagai pusat kegiatan Nasional menjadikan perkotaan Lamongan sebagai bagian dari pusat kegiatan Nasional. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk terus melaksanakan pembangunan wilayah. Berbagai macam kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan adalah kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh potensi Kabupaten Lamongan tertinggi adalah di sektor pertanian..

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan mengalami perkembangan secara bertahap baik secara normaif kebijakan maupun kegiatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2010 hingga 2012. Beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosial dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyarakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Agropolitan.

## SUMMARY

Ayudya fitria Mazdalifa, 2013, **The implementation of Regional Agropolitan Development Policy in Lamongan**, Prof. Dr.M. IrfanIslamy, MPA, Fadillah Putra, S.Sos, M.Paff, 175 pages + xvii.

Lamongan regency as the one of regencies that located in national scale strategic position is included in Gerbangkertasusila with the central in Metropolitan of Surabaya and systematically of area in establishment Surabaya as the central of national activity made Lamongan as a part of central of national activity. That things encouraged the local government of Lamongan Regency to continuously implement development of area. Many policies have been made by local government in order to implement development of area. One of the policies that are made by local government of Lamongan Regency is agropolitan area development policy. That thing is caused by the highest potential of Lamongan Regency is in agricultural sector.

The implementation of regional agropolitan development policy gradually was developed normatively both policy and operations. It was shown by an increase in realization of activities and the allocation of funds in the year 2010 to 2012. Some short comings in the implementation of social policy was the lack of local government for the low response communities, yet the maximum coordination between local government actors, and the lack of SOPs as guidelines for SKPDs. It results in the implementation of regional agropolitan development policies was not seriously affected by the changes in the south region of Lamongan. So the government should encourage more socialization and maximize the coordination, especially between education and development as soon as possible was made SOP in Agropolitan region.



## DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN OROSINILITAS.....	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sitematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik.....	10
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik.....	11
3. Tujuan Kebijakan Publik.....	12
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2. Implementasi Kebijakan Sebagai Proses Manajemen Kebijakan Publik.....	15
3. Komponen Implementasi Kebijakan Publik.....	19
4. Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik.....	20
5. Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Publik.....	21
C. Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik.....	23
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	23
2. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik.....	24
3. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
4. Dampak Implementasi Kebijakan Publik.....	27
5. <i>Ex-Post Evaluation</i> / Evaluasi Summatif.....	28
D. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	29
E. Pengembangan Kawasan Agropolitan.....	33
F. Kerangka Konseptual Penelitian.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Analisis Data.....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	48
1. Visi dan Misi.....	48
2. Kondisi Geografis.....	48
3. Topografi.....	51
4. Klimatologi.....	51
5. Hidrologi.....	51
6. Kawasan Lindung.....	52
7. Kondisi Demografi.....	52
8. Kesejahteraan Ekonomi.....	53
9. Kesejahteraan Sosial.....	55
a. Pendidikan.....	55
b. Kesehatan.....	57
c. Pertanian.....	57
d. Perkebunan.....	58
e. Perwilayahan Pembangunan.....	59
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	61
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.....	61
a. Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	61
b. Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	65
c. <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	67
d. Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	68
e. Realisasi Kegiatan Program-program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	69
f. Alokasi Sumber Daya Kegiatan Program-program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	76



2.	Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.....	85
3.	Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.....	90
C.	Pembahasan.....	99
1.	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.....	99
a)	Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	99
b)	Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	101
c)	<i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	106
d)	Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	107
g.	Realisasi Kegiatan Program-program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	110
e)	Alokasi Sumber Daya Kegiatan Program-program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.....	146
2.	Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.....	149
3.	Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.....	155

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	167
B.	Saran.....	168

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	171
-----------------------------	-----

<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	174
-------------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Tata Guna Lahan Kabupaten Lamongan	50
2.	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan	53
3.	Perkembangan PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2011	54
4.	Jumlah Sekolah dan Guru Jenjang TK-SMA Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan	55
5.	Pergutuan Tinggi di Kabupaten Lamongan Tahun 2011	56
6.	Kontribusi Sektor Pertanian Dalam PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2010 s/d 2011	58
7.	Produk Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	59
8.	Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010	69
9.	Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	71
10.	Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	73
11.	Realisasi Anggaran Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010	77
12.	Realisasi Anggaran Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	78
13.	Realisasi Anggaran Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	80
14.	Out Put Kegiatan Pengembangan Pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010	112
15.	Out Put Kegiatan Pengembangan Pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	113
16.	Out Put Kegiatan Pengembangan Pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	113
17.	Out Put Kegiatan Pengembangan Peternakan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010	122
18.	Out Put Kegiatan Pengembangan Peternakan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	122
19.	Out Put Kegiatan Pengembangan Peternakan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	123
20.	Out Put Kegiatan Pengembangan SDM di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010	127
21.	Out Put Kegiatan Pengembangan SDM di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	128
22.	Out Put Kegiatan Pengembangan SDM di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	129
23.	Out Put Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Agropolitan Tahun 2010	132



24. Out Put Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	132
25. Out Put Kegiatan Dinas PU Cipta karya di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011	135
26. Out Put Kegiatan Dinas Perikanan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	136
27. Out Put Kegiatan Dinas PU Pengairan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012	137
28. Out Put Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan di Kawasan Agropolitan	
29. Progres Kegiatan Pengembangan SDM di kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	140
30. Progres Kegiatan Pengembangan Agrobis dan Penguatan Modal di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	141
31. Progres Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	141
32. Progres Kegiatan Peningkatan Pemasaran Produk Hasil Pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	142
33. Progres Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	143
34. Progres Kegiatan Peningkatan Peneapan Teknoogi Pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	143
35. Progres Kegiatan Ketahanan Pangan di Kawasan Agropolitan	143
36. Realisasi Anggaran Pengemabnagn Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	147
37. Implementasi Kebijakan Ideal	149
38. Respon Masyarakat Wilayah Selatan Kabupaten Lamongan	150
39. Dampak Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.	156

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Sekuensi Implementasi Kebijakan 1	16
2.	Sekuensi Implementasi Kebijakan 2	17
3.	Sekuensi Manajemen Strategis	18
4.	Kerangka Konseptual Penelitian	36
5.	Analisis Data Model Interaktif	43
6.	Peta Kabupaten Lamongan	49
7.	Jumlah Siswa Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan	56
8.	Alur Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan	108
9.	Potret produk obat hama yang digunakan oleh petani di wilayah selatan Kabupaten Lamongan	120
10.	Potret Jalan Poros Desa Kambangan	134
11.	Progres Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	144
12.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012	147



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/284/Kep/413.013/2008 Tentang Penetapan Sentra Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan
- Lampiran 2 Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/91/Kep/413.013/2008 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2008
- Lampiran 3 Data Kegiatan Agropolitan di Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012
- Lampiran 4 Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Nomor: 188/64a/KEP/413.114/2012 Tentang Penetapan Lokasi Pelatihan Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Untuk Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012
- Lampiran 5 Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/178/Kep/413.013/2012 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
- Lampiran 6 Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/179/Kep/413.013/2012 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan Peralatan Mesin Pembuat Pakan Ikan Dari Dana Bahi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah memberikan paradigma baru dalam ranah peran Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan sektor ekonomi daerahnya melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi. Selain itu pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Daerah sebagai pemegang tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dituntut mampu untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan kawasan strategis ekonomi daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi daerah di masa depan. Tentu saja pengembangan kawasan strategis ekonomi tersebut menjadi tujuan utama Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerahnya.

Sektor ekonomi dipandang penting tatkala Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan potensi sumber daya alam daerah masing-masing. Pengembangan potensi ekonomi daerah selalu menjadi menarik untuk dibahas, hal ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya strategi yang diterapkan Pemerintahan Daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah ditengah tidak meratanya potensi ekonomi



masing masing wilayah dalam satu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Berbagai macam asumsi-asumsi yang mendasari pemerintah daerah melakukan pilihan kebijakan pengembangan kawasan tertentu akan mengakibatkan timbulnya dampak atas pilihan kebijakan tersebut.

Pasca diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan baru dalam menyongsong otonomi daerah. Tantangan baru yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yakni tanggung jawab yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamongan secara mandiri dan otonom. Kemandirian Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah kemandirian dalam melaksanakan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan secara otonom dengan menekankan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan melalui penggunaan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal.

Kabupaten Lamongan yang terletak pada posisi strategis skala Nasional, dimana Lamongan termasuk dalam Gerbangkartasusila plus dengan pusat di Metropolitan Surabaya dan secara sistem perwilayahan yang menetapkan Surabaya sebagai pusat kegiatan Nasional menjadikan perkotaan Lamongan sebagai bagian dari pusat kegiatan Nasional. Berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk melakukan perubahan ruang dalam skala besar guna mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan, kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi seperti pembangunan Lamongan Integrated Shorebase (LIS), pengembangan Wisata Bahari

Lamongan (WBL), Pelabuhan Nusantara Brondong, Pelabuhan ASDP Paciran, pengembangan kawasan Agropolitan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan dan masih banyak kebijakan pengembangan kawasan lainnya.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang juga dikenal memiliki potensi pertanian dimana komoditas tertinggi adalah di sektor pertanian.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa:

“Pada tahun 2007 Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 740.272 ton GKG (7,87% dari total produksi gabah di Jawa Timur atau terbesar ke-1 di Jawa Timur) sehingga Lamongan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur” (Lihat dalam *Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011*).

Namun selama 10 tahun terakhir Kabupaten Lamongan mengalami kesenjangan fokus pembangunan pada pemacuan pertumbuhan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Lamongan. Dimana pembangunana wilayah utara dipacu melalui peningkatan sarana tempat perdagangan, industri, perikanan, wisata dan pembangunan beberapa pelabuhan antar pulau maupun pelabuhan internasional.

Sedangkan pembangunan wilayah selatan yang dipacu melalui kegiatan pertanian.

Dalam konsep pembangunan regional bahwa:

“Kabupaten Lamongan juga memiliki arti penting dalam kebijakan ekonomi Jawa Timur yaitu program Gelangan (Gresik,Lamongan, Tuban) dan program Gerbangkertasusila (Gresik,Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)”(Lihat dalam *Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011*).

Berdasarkan data BPS (Lihat Lamongan Dalam Angka Tahun 2012) bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dilihat dari kontribusi per



sektor terhadap PDRB memberikan gambaran bahwa kontribusi sektor pertanian menduduki peringkat pertama, dimana kontribusi sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar Rp.5.730.111,64. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kontribusinya cenderung meningkat, pada tahun 2011 kontribusi sektor ini mencapai Rp. 4.507.274,27. Untuk sektor jasa-jasa berada pada posisi ketiga yaitu mencapai Rp. 1.264513,06.

Selain 3 sektor utama dalam PDRB, sektor-sektor lainnya yang memberikan kontribusi secara berturut-turut sebagai berikut: sektor industri pengolahan sebesar Rp.699.680,02; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp.480.868,38; sektor bangunan/konstruksi Rp.367.351,29; sektor pengangkutan dan komunikasi Rp.277.759,24; listrik, gas dan air bersih Rp.105.350,12 serta pertambangan dan penggalian sebesar Rp.28.046,97.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2010 PDRB sebesar Rp.11.774.155,300 meningkat menjadi sebesar Rp.13.460.155,30 pada tahun 2011.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (ADHK) juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Lamongan Rp 6.191.066,48 meningkat menjadi Rp 6.625.823,03 pada tahun 2011.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan disektor pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan sistem pengembangan wilayah Agropolitan sebagai alternatif solusi dalam proses pelaksanaan

5

pengembangan kawasan pedesaan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan tanpa melupakan kawasan perkotaan. Berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) Jawa Timur Tahun 2010 bahwa Kawasan Agropolitan adalah:

“Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dengan sistem agribisnis. Embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian”.

Melalui pengembangan kawasan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan Agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan Agropolitan. Rekomendasi beberapa wilayah sebagai kawasan pengembangan Agropolitan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh analisa beberapa kawasan pedesaan melalui studi kelayakan atau analisa komoditas-komoditas unggulan yang mempunyai prospek tertinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (Master Plann Agropolitan Kabupaten Lamongan 2011).

Pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan juga merupakan kegiatan yang bersifat “*complement*” terhadap prioritas pembangunan Jawa Timur 2009-2014 dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 yaitu “Jawa Timur sebagai pusat Agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Pada tahun 2008 Kabupaten



Lamongan ditetapkan sebagai salah satu wilayah pengembangan kawasan Agropolitan melalui Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/284/Kep/413.013/2008 tentang Penetapan Sentra Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 bahwa dalam pengembangan kawasan Agropolitan berada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan yaitu terdiri dari 11 kecamatan antara lain Kecamatan Tikung, Sarirejo, Kedungpring,

Modo, Sugio, Kembangbahu, Sambeng, Bluluk, Mantup, Sukorame dan Kecamatan Ngimbang. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413.013/2008, Ngimbang ditetapkan sebagai pusat kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Pemilihan pusat Agropolitan tersebut dilakukan melalui identifikasi potensi dan masalah guna komoditas unggulan yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, iklim usaha, kondisi sarana dan prasarana, dan sebagainya yang terkait dengan sistem pemukiman Nasional, Propinsi, dan Kabupaten (Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan 2011).

Melalui pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat memicu perkembangan kawasan *hinterlandnya*. Sehingga pengembangan kawasan Agropolitan dapat berjalan dengan baik, dan dapat terjadi peningkatan produk unggulan pertanian dan perekonomian masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa perlu adanya kajian terhadap desain

kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang merujuk pada analisa implementasi kebijakan. Analisa Implementasi kebijakan pada penelitian ini merujuk pada pelaksanaan kegiatan program-program penunjang pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Sehingga dapat dinilai sejauh mana program kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat pada apa yang diungkapkan oleh Barber (Lihat dalam nugroho, 2011:133) bahwa administrasi publik sebagai pemerintah atau eksekutif adalah sebuah cara dimana tujuan pemerintah akan dicapai.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan”**. Dengan kajian implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu menganalisis dan mendiskripsikan sejauh mana kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan dapat diimplementasikan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan?



3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan
3. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

### **4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi akademis: pengembangan keilmuan khususnya dalam kajian implemetasi kebijakan publik serta sebagai dasar penelitian kebijakan selanjutnya.
2. Kontribusi Praktis: Sebagai wahana untuk menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan (*local welfare*) pada khususnya melalui kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Selain itu jug sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kedepan.

**5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Kajian pustaka memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

**Bab III** : Metodologi penelitian membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

**Bab IV** : Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil-hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian serta data-data pada fokus penelitian yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

**Bab V** : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki banyak pengertian sebagaimana diungkapkan oleh para ahli. Federick dalam Nugroho (2011: 93-94) mendefinisikan bahwa:

“Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Definisi tersebut sejalan dengan Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (1984: 24-25) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah “... *is what governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs...*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Laswell dan Caplan dalam Islamy (2001:15-17) mengemukakan bahwa kebijakan adalah “*a project program of a goal, values, and practice*”

suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah). Di sisi lain, Anderson dalam Islamy (2001:19) mendefinisikan kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Beberapa definisi kebijakan publik yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah dalam mewujudkan program - program guna pemanfaatan potensi yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat bersama. Keputusan tersebut biasanya berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan negara disegala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik**

Apabila kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berupa peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut sesuai yang diungkapkan Nugroho (2011:104) bahwa kebijakan publik dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- a) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar, seperti: UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- b) Kebijakan publik yang bersifat Meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan, seperti: Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota dan dapat pula berupa SK bersama antar menteri dan bupati atau wali kota.



c) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, seperti: peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, dan wali kota.

Menurut pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, daerah hingga tingkat lokal dapat disebut sebagai kebijakan publik karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

**3. Tujuan Kebijakan Publik**

Pemerintah merumuskan sebuah kebijakan karena didasarkan pada tujuan tertentu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Nugroho (2011:110 - 111) bahwa Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Adapaun tujuan kebijakan publik menurut Nugroho antara lain:

a. Distributif vesus absorbtif.

1) Distributif adalah tujuan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung mengalokasikan sumberdaya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi.

2) Absorbtif adalah tujuan kebijakan untuk menyerap sumber daya kepada negara.

b. Regulatif versus deregulatif

1) Regulatif adalah kebijakan yang sifatnya mengatur dan membatasi.

2) Deregulatif adalah kebijakan yang sifatnya membebaskan.

c. Dinamisasi versus stabilisasi

1) Dinamisasi adalah kebijakan yang bertujuan menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu.

2) Stabilisasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengatur dinamika yang terlalu cepat sehingga tidak merusak sistem, baik sistem politik, sistem keamanan, sistem ekonomi maupun sistem social yang ada.

d. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar.

1) Kebijakan yang memperkuat negara artinya kebijakan tersebut mendorong peran negara lebih besar.

2) Kebijakan yang memperkuat pasar artinya kebijakan tersebut mendorong peran publik atau mekanisme pasar lebih besar dari pada negara.

Beberapa tujuan yang telah diungkapkan oleh Nugroho mencerminkan bahwa sebuah kebijakan dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai tujuan masing-masing yang pada dasarnya kebijakan –kebijakan tersebut bermuara pada kepentingan publik (*public interst*), sehingga para pengambil keputusan dalam memutuskan sebuah kebijakan publik harus memiliki orientasi pada kepentingan publik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Islamy (2007:12)

bahwa:



“Kebanyakan warga negara menaruh banyak harapan pada administrator publiknya, yaitu harapan agar mereka selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada publik, untuk dapat menjadi abdi masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan publik, maka administrator publik perlu memiliki semangat “kepublikan” (*the spirit of publicness*). Semangat tanggung jawab administratif dan politis harus melekat juga pada diri administrator publik, sehingga ia dapat menjalankan peran profesionalnya dengan baik. Kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan aktualisasi dirinya. Dengan demikian, maka ukuran yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah administrator publik itu sudah “publik” atau belum dapat dilihat dari keputusan administratifnya yang ia buat atau rumuskan itu atau bertentangan dengan kepentingan publik”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka semakin jelas bahwa tujuan dari pada kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik (*Public interest*).

## **B. Implementasi Kebijakan Publik.**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan adalah upaya dalam melaksanakan sebuah keputusan, Seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho, (2006:119) bahwa :

*“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the implementation process”.*

Van Horn dan Van Meter dalam Prasetyo (2009:81) mengungkapkan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun

pihak swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Definisi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang telah dibuat dengan harapan akan memberikan dampak yang diinginkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Islamy dalam Prasetyo (2009:81-82) mengungkapkan bahwa:

“Sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan Negara yang bersifat *Self-executing*, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executing* artinya kebijakan Negara perlu disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan”

Mengingat kompleksitas pada sifat kebijakan maka kebijakan dalam implementasinya diperlukan kerjasama berbagai pihak agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

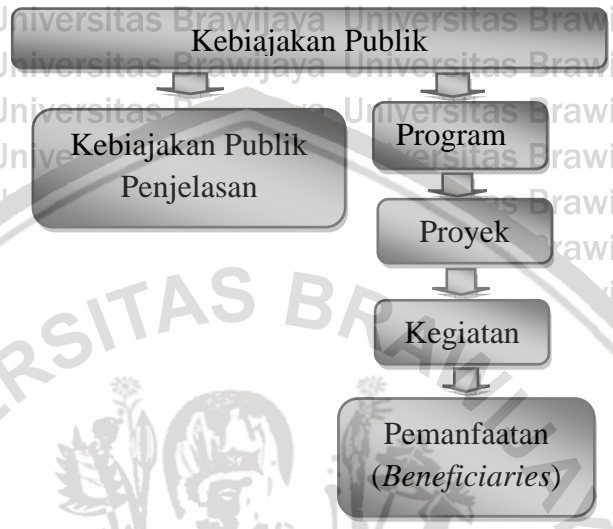
**2. Implementasi Kebijakan Sebagai Proses Manajemen Kebijakan Publik**

Nugroho (2011:618) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Nugroho juga menyebutkan bahwa untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan bisa melalui dua cara yaitu mengimplementasikannya langsung dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari



kebijakan publik tersebut. Hal tersebut digambarkan oleh Nugroho sebagai berikut:



Gambar 1. Sekuensi Implementasi Kebijakan 1  
Sumber: Nugroho (2011:619)

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan penjelas atau peraturan pelaksana. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain lain. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa rangkaian kebijakan publik dimulai dari program, proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik sebagai mana dapat digambarkan lebih jelas oleh Nugroho sebagai berikut:



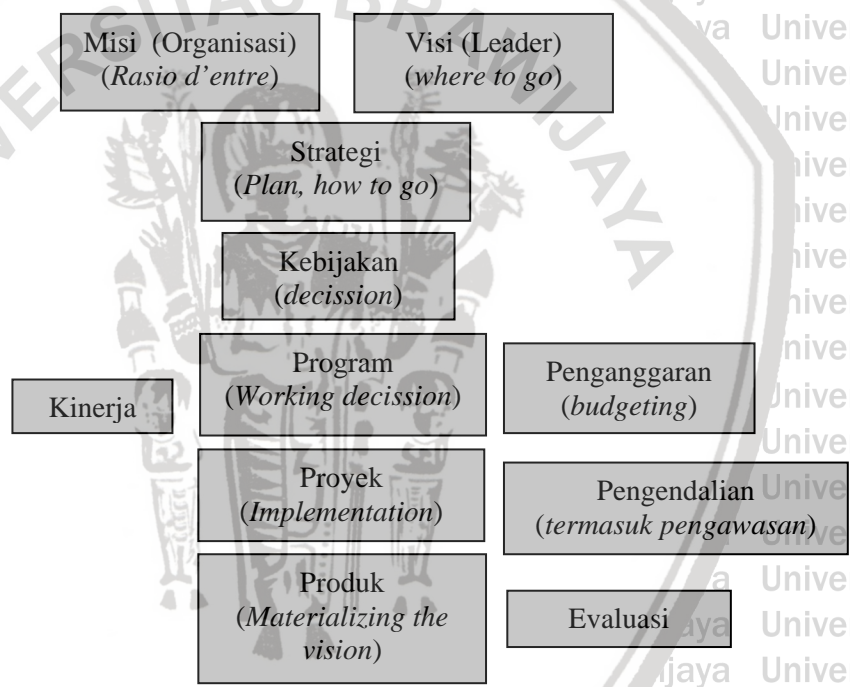
**Gambar 2. Sekuensi Implementasi Kebijakan 2**  
 Sumber : Nugroho (2011:620)

Mengacu pada Nawawi, Nugroho (2011:620) mendefinisikan bahwa misi adalah *raison d'etre* (alasan mengapa organisasi hadir atau eksis). Jadi misi menentukan kemana akan pergi (visi). Misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi dan tidak berubah selama organisasi ada kecuali jika organisasi direformasi. Sedangkan visi melekat pada individu yang memimpin, sehingga setiap pemimpin harus mempunyai visi ke mana organisasi dibawa selama kepemimpinannya. Nugroho mengungkapkan bahwa Visi adalah strategi atau rencana. Strategi adalah arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan dan dieksekusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan baik bersifat publik maupun non-publik, sehingga kebijakan publik dapat disebut sebagai keputusan politik



terhadap pilihan atas strategi. Tetapi keputusan politik strategi hanya sebuah konsep di atas kertas. Kemudian kebijakan tersebut di jalankan dalam bentuk program setelah itu dijabarkan secara mendetail dalam proyek dan implementasinya dalam bentuk kegiatan.

Adapan gambaran tentang pemikiran manajemen strategis yaitu sebagai berikut:



**Gamabar 3. Sekuensi Manjamen Strategis**

Sumber: Nugroho (2011:623)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan diturunkan menjadi program yang kemudian di turunkan menjadi proyek dan kemudian berwujud pada kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dan masyarakat. Sehingga Implementasi kebijakan

terdiri dari program, proyek dan kegiatan. Sedangkan hasil dari implementasi kebijakan adalah produk yang merupakan materialisasi visi.

**3. Komponen Implementasi Kebijakan Publik**

Adapun komponen-komponen atau elemen-elemen dalam proses implementasi kebijakan menurut Linebery dalam Prasetyo (2009:83) adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana. Perumusan dan penempatan lembaga baru untuk mengimplementasikan suatu kebijakan baru atau proses penyusunan tanggungjawab dalam kaitannya dengan implementasi bagi kelambagaan dan personil yang ada.
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana. Adanya proses terjemahan sasaran legislatif dan berbagai tujuannya ke dalam aturan pelaksanaannya, pengembangan pedoman untuk menggunakan alat implementasi yang ada.
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana sebagai upaya implementasi untuk kepentingan kelompok sasaran kebijakan (*target group*), pengembangan devisi tanggungjawab ke dalam lembaga dan agen-agen yang terkait
- d. Pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (alokasi sumber daya guna kesempurnaan dampak kebijakan)

Komponen-komponen utama implementasi kebijakan yang ditonjolkan oleh Linebery yaitu bahwa implementasi merupakan suatu kontinuitas dari pembuat kebijakan, dimana setelah kebijakan dirumuskan maka proses implementasi tersebut dimulai. Hal tersebut biasanya cenderung dipandang sebagai dikotomi politik dan administrasi, dimana politik (*legislative*) pada ranah perumusan kebijakan, sedangkan administrasi di ranah pelaksanaannya.



#### 4. Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan menurut Adil Najam perlu diperhatikan beberapa variabel yang saling terkait, seperti yang diungkapkan oleh Najam (1995:4) tentang protokol 5C yaitu antara lain:

- a. *The Content of the policy itself. what it sets out to do (i.e. goals); how it problematizes the issue (i.e. causal theory); how it aims to solve the perceived problem (i.e. methods).*
- b. *The nature of the institutional Context. The corridor (often structured as standard operating procedures) through which policy must travel, and by whose boundaries it is limited, in the process of implementation.*
- c. *The Commitment of those entrusted with carrying out the implementation at various levels to the goals, causal theory and methods of the policy.*
- d. *The administrative Capacity of implementers to carry out the changes desired of them.*
- e. *The support of Clients and Coalitions whose interests are enhanced or threatened by the policy, and the strategies they employ in strengthening or deflecting its implementation.*

Berdasarkan Protokol 5C yang diungkapkan oleh Adil Najam tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 5 variabel yang saling terkait dalam implementasi kebijakan yaitu konten, konteks, komitmen, kapasitas, serta klien dan koalisi.

Pertama yaitu konten dari kebijakan, yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan tersebut mengatasi permasalahan dan apa tujuan dari pemecahan masalah tersebut.

Kedua yaitu konteks, yang dimaksud adalah kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP). Ketiga yaitu komitmen, maksudnya adalah dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sebuah komitmen dari para pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Keempat yaitu

kapasitas, yang dimaksud adalah diperlukan kapasitas administrasi untuk menciptakan sebuah perubahan yang diinginkan. Yang kelima yaitu Klien dan Koalisi, merangkul kedua pihak dilakukan dengan memeperhitungkan kepentingan mereka agar mendapatkan dukungan dan strategi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan. Dengan memperhatikan kelima variable tersebut diharapkan sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif.

**5. Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik.**

Kebijakan yang telah ditetapkan dan disahkan belum mampu menjamin pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan yang diharapkan. Hoogwood dan Gunn (Lihat dalam Prasetyo, 2009:100) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Mengacu pada Hoogwood dan Gunn, Prasetyo (2009:100) menjelaskan bahwa sebuah kebijakan tidak terimplementasika adalah ketika:

“Suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi”.

Sedangkan kebijakan yang tidak berhasil untuk mencapai hasil tertentu menurut Prasetyo (2009:100) yaitu ketika:

“Suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan



(misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Berdasarkan kutipan dari prasyto tersebut, yang dimaksud pelaksanaan jelek adalah ketika kegagalan kebijakan (*implementation failure*) disebabkan oleh ketidak mampuan SDM dalam megimplementasikan sebuah program kebijakan.

Smith dalam Prasyto (2009:103) mengungkapkan bahwa dikatakan kebijakannya yang jelek (*bad policy*) ketika kegagalan sebuah kebijaka disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan pemahaman pembuat kebijakan atas berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan publik. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan yang jelek, Islamy dalam Prasyto (2009:103) mengemukakan bahwa kebijakan demikian seringkali harus dihapus disesuaikan dengan tuntutan-tuntuan baru (*new demands*) atau melalui negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang kena dampak maupun dengan *policy stakeholder*. Sedangkn kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*) biasanya berlangsung secara kondisional dan temporer (Prasyto, 2009:103). Kaitannya dengan hal tersebut Islamy (Lihat dalam Prasyto, 2009:103) bahwa para pembuat maupun pelaksana kebijakan publik harus menyiapkan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk mampu memprediksi dan meramalkan secara lebih baik dan meyakinkan konsekuensi- konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan yang dipilihnya.

Weimer dan Vinning (dalam Keban 2008: 78) mengungkapkan bahwa teradapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud logika kebijakan adalah kesesuaian antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu yang dimaksud kerjasama dalam hal ini adalah sejauh mana kerjasama antara pihak yang terlibat sudah mencapai suatu hasil. Sedangkan yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya manusia yaitu sejauh mana kapasitas serta komitmen para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

**C. Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik**

**1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parson (2006:547), mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segit tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi kebijakan juga dimaknai sebagai



kegiatan untuk menunjukkan relevansi atau signifikansi dari sebuah proyek atau program terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program (Prasetyo, 2009 : 116).

Dampak kebijakan dibedakan antara *policy impact/outcomes* dan *policy output*. *Policy impact/ policy outcomes* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan suatu kebijaksanaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *policy output* adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijaksanaan (Islamy dalam Prasetyo,2009:116). Setiap kebijakan yang dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*) (Islamy,1997).

**2. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Holett dan Ramesh (lihat dalam Putra, 2003:100-101), evaluasi kebijakan berdasarkan ruang lingkupnya dibedakan dalam tiga kategori antara lain:

a.Evaluasi Administratif adalah evaluasi kebijakan publik yang dilakukan di dalam ruang lingkup pemerintahan atau dalam instansi-instansi atau umumnya evaluasi ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berkaitan dengan program tertentu, seperti Irjen, Itwil, konsultan swasta, dan sebagainya. Sorotan dari evaluasi kebijakan publik ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek finansial dan prosedur kebijakan publik yang dievaluasi. Artinya, bahwa evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk

mendapatkan jaminan bahwa apakah yang dilakukan pemerintah lewat proyek tertentu itu benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan (*the expected goal*) pada tingkat biaya yang paling rendah.

b. Evaluasi Yudisial adalah evaluasi yang dilakukan yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang dievaluasi tersebut. Yang melakukan evaluasi yudisial sebagai pihak utamanya adalah lembaga-lembaga hukum, seperti pengacara, pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya. Hal yang dijadikan sebagai titik amatan dari evaluasi ini adalah utamanya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada pada kebijakan tersebut, ini berarti menyangkut perlindungan hak dari berbagai pihak atas berjalannya sebuah program kebijakan.

c. Evaluasi Politik adalah evaluasi yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik parlemen maupun parpol. Namun sesungguhnya evaluasi politik ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara umum. Evaluasi ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari sebuah kebijakan publik. Hal ini diberi ruang sebab sesungguhnya sudah menjadi kesadaran umum bahwa kebijakan publik itu pada hakikatnya adalah sebuah proses politik. Dengan demikian, kebijakan publik itu tidak cukup hanya efektif, efisien, ekonomis dan absah secara hukum saja, namun harus pula memiliki basis legitimasi politik yang kuat.



### 3. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memiliki tiga fungsi pokok sebagaimana yang diungkapkan oleh

Putra (2003:95) antara lain:

- a. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan

Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan publik yang ada. Ia akan melakukan evaluasi atas penampilan atau kinerja dari proses berjalannya organ kebijakan publik yang dievaluasi. Sampai sejauh mana organ kebijakan publik itu mampu mengatasi persoalan yang dihadapi dan sampai sejauh mana pula organ kebijakan publik tersebut efektif sebagai instrument pemberi solusi sebagaimana *raison d'etre* kebijakan publik itu sendiri.

- b. Menilai kepatantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi

Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik lebih memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dimana seperti telah disadari bahwa sebuah kebijakan publik pada dasarnya adalah dibuat untuk menyelesaikan masalah publik tertentu, maka pada fungsi ini evaluasi kebijakan akan menilai apakah tujuan yang ditetapkan kebijakan publik tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Karena sebuah kebijakan publik itu pada dasarnya ditetapkan berikut dengan tujuannya, dan umumnya *implementing agents* untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya.

Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukannya atas kebijakan yang dievaluasi. Fungsi evaluasi kebijakan publik, dalam posisi ini akan lebih bersifat produktif, karena ia tidak lagi bertitik berat pada kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, namun pada bagaimana kemudian dapat belajar dan bagaimana caranya agar kelemahan-kelemahan dalam kebijakan itu tidak terulang pada waktu dan tempat yang berbeda nantinya.

**4. Dampak implementasi Kebijakan Publik**

Kajian dampak implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat suatu kebijaksanaan dan untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan. Cook dan Scioli (1975) serta Dolbeare (1975) dalam Prasetyo (2009 :116) menyatakan bahwa:

*“policy impact analysis entails an extension of this research area while, at the same time, shifting attention toward the measurement of the consequences of publik policy. In other words, as opposed to the study of what causes policy, impact analysis on the question of what policy causes”.*

Berdasarkan ungkapan diatas, yang dimaksud dampak kebijakan disini adalah seluruh dampak pada kondisi dunia nyata. Dye dalam Prasetyo (2009: 116) mengemukakan bahwa *“policy evaluation is learning about the concequences of public policy”*. Dalam definisi yang lebih kompleks dinyatakan bahwa *policy*



*evaluation is the assessment of the overall effectiveness of two or more programs in meeting common.*

Berdasarkan beberapa ungkapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak menekankan pada hal yang terjadi secara aktual dari kelompok yang ditargetkan sebuah kebijakan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan dan menjadi masukan pada proses perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas sebuah kebijakan.

##### **5. Ex-Post Evaluation/Evaluasi Summatif**

Terdapat beberapa jenis evaluasi untuk menilai sebuah kebijakan, salah satunya adalah *Ex-post Evaluation* yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pada penelitian ini. *Ex-post Evaluation* merupakan jenis evaluasi berdasarkan fungsi dan waktu. Adapun yang dimaksud *Ex-post Evaluation* (Fischer, Miller, and Sidney.,(eds.), 2007:394) yaitu sebagai berikut:

*“Ex-post evaluation constitutes the classical variant of evaluation to assess the goal attainment and effects of policies and measures, once they have been completely As such, summative (Scriven 1972) has been directed at policy programs (as a policy action form combining policy goals and financial, organisational as well as personnel resources),...”*

Berdasarkan kutipan tersebut, *Ex-post Evaluation* dapat dimaknai sebagai jenis evaluasi yang dilakukan pada saat kebijakan dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan yang dimaksud adalah pada saat program dari sebuah kebijakan diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan (dalam hal ini yaitu pelaksanaan program) pada jenis *Ex-post Evaluation* memiliki tujuan seperti yang diungkapkan (Fischer, Miller, and Sidney.,(eds.), 2007:394) bahwa *Ex-Post Evaluation* “...it was meant to produce an assessment about the degree to which the intended policy goals have achieved (“goal attainment”)...”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa *Ex-post Evaluation* dimaksudkan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai melalui penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilaksanakan.

**D. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan merupakan tujuan bagi setiap negara dimana kemajuan bidang ekonomi menjadi unsur paling penting didalamnya meskipun bukan satunya-satunya. Todaro (1995:142) mengungkapkan bahwa pembangunan adalah suatu proses multi-dimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut. Sedangkan Djojonegoro dalam Moeis (2009:4) mengemukakan bahwa Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Dalam arti yang lebih umum dan se4derhana, Budiman (2000:1) mengungkapkan



bahwa pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.

Sesuai dengan beberapa pendapat yang telah dipaparkan maka dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan secara berkelanjutan pada setiap bidang kehidupan menuju arah yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebuah negara melaksanakan pembangunan pasti memiliki tujuan tertentu, adapun tujuan pembangunan menurut Tadaro (1995:144-145) yang berlangsung dimasyarakat yaitu antara lain:

1. Untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua anggota masyarakat.
2. Untuk meningkatkan taraf kehidupan yang meliputi : pendapatan yang lebih tinggi, tersedianya lapangan kerja lebih banyak, sarana pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Hal tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan material saja melainkan untuk menciptakan martabat atau harga diri yang lebih besar.
3. Untuk memperluas ragam pilihan ekonomi dan social bagi masing-masing pribadi mapun negra yang bersangkutan melalui suatu usaha untuk memerdekakan diri dari perbudakan dan ketergantungan pihak lain, tidak hanya hubungannya dengan negara lain tapi kaitannya juga dengan kebodohan dan kepapaan manusiawi yang membelenggu kehidupan mereka.

Beberapa tujuan yang telah diungkapkan mencerminkan bahwa pembangunan selalu berkaitan dengan pembangunan ekonomi, hal tersebut guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih layak. Karena pada dasarnya tujuan dari sebuah kebijakan-kebijakan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan akan selalu berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Djohadikusumo (1994: 1-2) bahwa:

“Proses pembangunan itu sendiri mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (institutional framework) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh”.

Maka dengan adanya proses pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja yang bersifat produktif. Sehingga pembangunan ekonomi sendiri seharusnya memacu partisipasi aktif masyarakat yang mampu dan ingin berperan aktif dalam proses ekonomi melalui kegiatan yang bersifat produktif. Dengan demikian pembangunan ekonomi adalah proses proses transisi dan transformasi multidimensional yang ditandai oleh perubahan pada struktur ekonomi (perubahan struktural).

Syamsi (1986:50) mengemukakan 2 faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan yaitu antar lain:



1. Kebijakan pemerintah, Melalui kebijaksanaan pemerintah diharapkan dapat memberikan petunjuk/pengarahan seras perencanaan dari atas kebawah (*top-down planning*) yang baik.

2. Respon masyarakat melalui sikap (*attitudes*) dan peransertanya (*participation*). Sehingga dengan partisipasi ini masyarakat diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil serta dalam pengevaluasian hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menumbuhkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*)

Melalui keterpaduan antara *top-down planning* dan *bottom-up planning* tersebut diharapkan dapat tercapai keberhasilan pembangunan baik dilingkup nasional maupun regional.

Di era otonomi daerah saat ini menjadikan pemerintah daerah gencar melaksanakan pembangunan ekonomi daerahnya guna meningkatkan proses pemerintahan yang lebih baik dan mencapai sebuah perubahan yang lebih besar dengan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing. Untuk memahami pembangunan ekonomi daerah, Lincoln (1999) dalam Arianto (2010) mengungkapkan

bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah: “suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”.

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan pembangunan daerah terdapat salah satu aspek yang sangat penting yaitu perencanaan karena dengan perencanaan kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, manusia dan sumber dana pembangunan.

**E. Pengembangan Kawasan Agropolitan**

Pengembangan kawasan merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Sedangkan menurut Rustiadi (2007) bahwa pembangunan secara filosofis merupakan suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling *humanitis*. Terdapat berbagai macam konsep pengembangan wilayah, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan, megapolitan, *growth pole*, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi. Salah satu konsep pengembangan wilayah yang berbasis ekonomi adalah konsep pengembangan agropolitan.

Konsep Agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian tertinggal. Proses interaksi



kedua wilayah selama ini secara fungsional ada dalam posisi saling memperlemah.

Pranoto(2005) mengungkapkan bahwa wilayah pedesaan dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya pertanian yang mengalami permasalahan produktivitas yang stagnan, di sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima suatu beban berlebih (*over urbanization*), sehingga memunculkan ketidaknyamanan akibat permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan.

Menurut Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa:

“Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis”.

Berdasarkan Master Plann Agropolitan Kabupaten Lamongan, Suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari :
  - a. Sub sistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup : mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.
  - b. Sub sistem usaha tani atau pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
  - c. Sub sistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
  - d. Sub sistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
- 2) Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (*urban-rural linkages*) yang bersifat interdependensi atau timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di pedesaan mengembangkan usaha budi daya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota

menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.

- 3) Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- 4) Kehidupan masyarakat di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada dikawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.

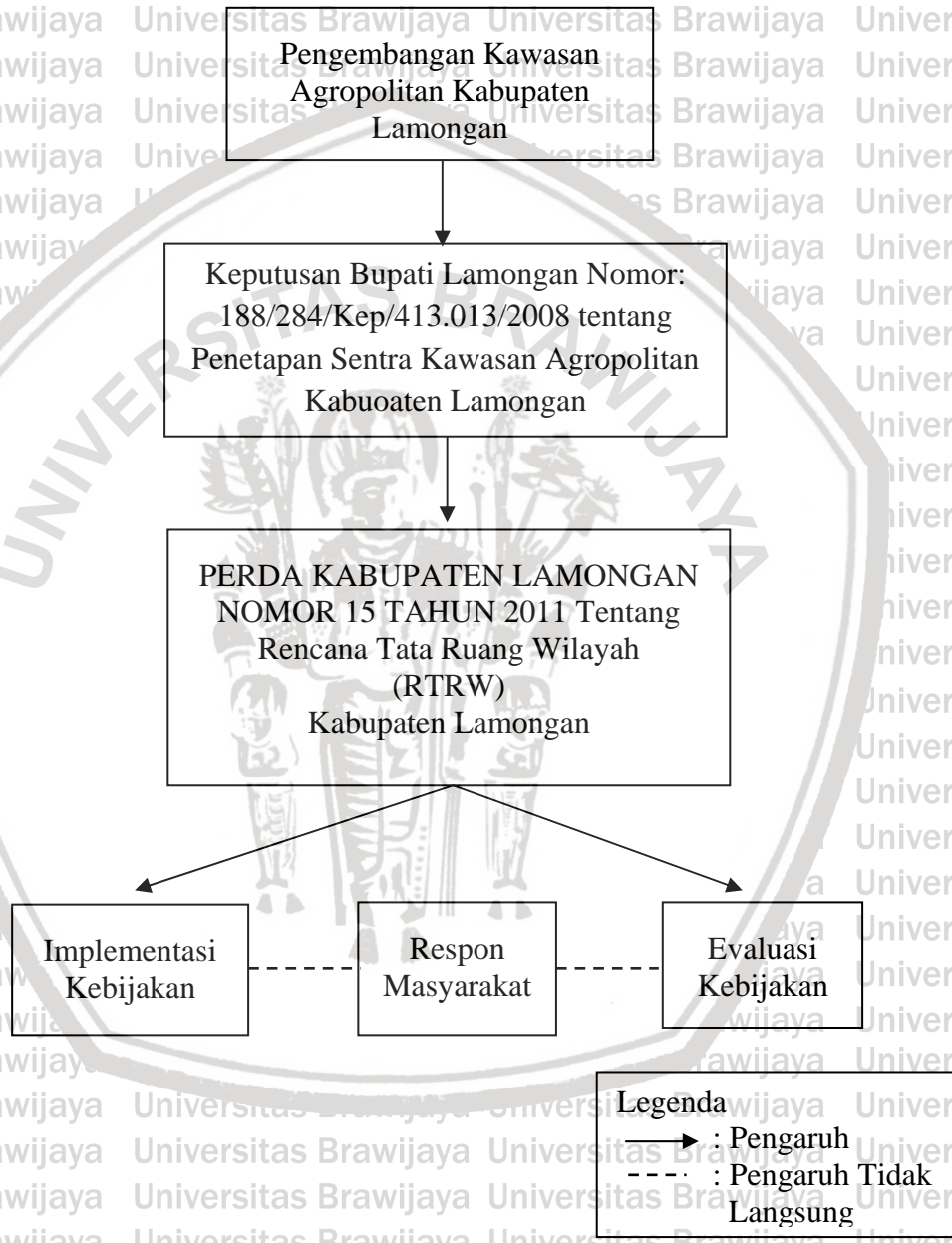
Melalui pendekatan sistem Kawasan Agropolitan, produk pertanian akan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan sebelum dijual ke pasar (ekspor), sehingga nilai tambah tetap berada di Kawasan Agropolitan. Daidullah (dalam Suyatno, 2008:27) mengungkapkan bahwa.

“Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan alternatif solusi yang tepat dalam pembangunan perdesaan tanpa melupakan pembangunan perkotaan. Melalui pengembangan kawasan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan dengan wilayah produksi pertanian” (Suyatno:2008:27).

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya pengembangan kawasan Agropolitan dapat terbentuk sebuah kawasan ekonomi strategis yang berbasis pada sektor pertanian.



### F. Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 4. Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penulisan karya ilmiah yang dilakukan dengan melaksanakan penelitian harus menggunakan kaidah-kaidah metode penelitian karena sangat penting bagi kelancaran proses pengumpulan data, penganalisaan dan interpretasi data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hal itu dikarenakan penelitian ini hendak memberikan gambaran secara mendetail terkait implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data mana yang yang diperlukan. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.
  - a. Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan



- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- 2) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413.013/2008.
- 3) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011.

b. Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolita Kabupaten Lamongan.

- 1) Tim Kelompok Kerja (Pokja) Agropolitan Kabupaten Lamongan.
- 2) SKPD Pelaksana Kebijakan Pengembangan Agropolitan Kabupaten Lamongan.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan.

c. *Standard Operating Procedures* (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

d. Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

e. Realisasi Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

f. Alokasi Sumber Daya Untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

- 2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.
- 3. Dampak Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Lamongan provinsi Jawa Timur.

Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti melihat

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang melaksanakan kebijakan pengembangan daerah berbasis pertanian dengan sistem

Agropolitan. Sedangkan situs penelitian yaitu:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
2. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
4. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
5. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
6. Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
8. Masyarakat wilayah selatan Lamongan.

**D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Ada pun data primer dan skunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data asli yang bersumber dari pengamatan dan pencatatan secara langsung dari subyek penelitian. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terkait pengembangan kawasan Agropolitan.

Informan pada penelitian ini antara lain:



a. Kasubid Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan

b. Kabid Program Dinas Pertanian dan Kehutan Kabupaten Lamongan

c. Kabid Produksi dan Keswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

d. Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Pergadangan Kabupaten Lamongan

e. Kabid Bina Manfaat, Pembangunan dan Rehab Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

f. Masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lamongan

2. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil diolah dan disajikan dalam buku, laporan-laporan, publikasi terbitan periodik yang diperoleh dari pihak

kedua. Ada pun data skunder pada penelitian ini terdiri dari:

a. Dokumen Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Lamongan.

b. Dokumen Rencana Induk (*Master Plann*) Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

c. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/91/Kep/413.013/2008 tentang pojka pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.

d. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413.013/2008 tentang penetapan sentra kawasan Agropolitan di Kabuaten Lamongan.

- e. Laporan kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan sampai tahun 2012.
- f. Data BPS Lamongan dalam Angka 2012.
- g. Dokumen Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan.
- h. Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Metode wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur kepada informan. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono,2011:233). Wawancara pada penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti.



2. Dokumentasi

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dengan cara mempelajari dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan mengambil gambar beberapa realitas dilapangan yang berkaitan dengan judul penelitian .

**F. Instrumen Penelitian**

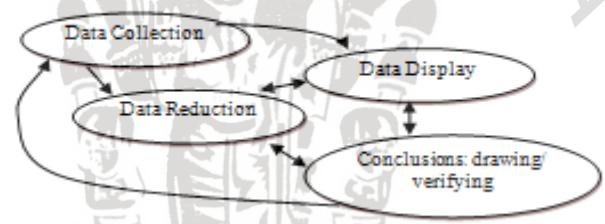
Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya agar data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan atau dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka petugas pengumpul data dan alat bantu (instrumen) pengumpul data haruslah memenuhi kriteria yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Peneliti, Sebagai instrumen kunci dengan meggunakan panca-indra untuk menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian. hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pencarian data pada saat wawancara dilakukan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan.
3. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pada awal penelitian, peneliti merupakan alat satu-satunya. Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan barulah digunakan wawancara dan catatan-catatan lain yang digunakan sebagai alat penelitian. Sehingga dari kegiatan tersebut diperoleh data yang spesifik dari responden. Dengan demikian instrumen yang digunakan dari awal hingga akhir penelitian adalah peneliti sendiri.

**G. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari:



**Gambar 5. Analisis Data Model Interaktif**  
 Sumber: Sugiyono, 2011:247

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh dilapangan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2011:247). Sehingga didapat gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelnti mengumpulkan data selanjutnya. Dalam melakukan



reduksi data dapat menggunakan bantuan peralatan seperti komputer dengan memberi kode-kode tertentu.

Penelitian kualitatif tujuannya adalah menemukan, maka dalam mereduksi data peneliti harus memperhatikan temuan-temuan yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2011:247).

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya, dengan demikian data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah difahami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono(2011: 249) yang menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*".

## 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan

kesimpulan yang kredibel. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak karena seperti yang telah dikemukakan, bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian perlu dilakukan uji keabsahan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini antra lain:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan data pada penelitian ini menggunakan beberapa cara:

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti guna mempertajam wawasan peneliti dalam memerikasa data (Sugiyono: 2011). Adapun dokumen yang dipelajari oleh peneliti pada penelitian ini adalah dokumen terkait pengembangan kawasan Agropolitan yang sudah disebutkan pada data sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Triangulasi.

William Wiersman dalam Sugiyono, 2011:273) mengungkapkan bahwa "Triangulation is qualitative cross-validation. Its asseses the sufficiency of the



data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures”.

- 1) Triangulasi Sumber yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari sumber kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan mana yang sama dan mana yang berbeda, Kemudian hasil analisis data tersebut menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber-sumber data terkait.
- 2) Triangulasi Teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika data yang ditemukan berbeda maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut kepada narasumber untuk memastikan kebenaran data.
- 3) Triangulasi Waktu yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara wawancara atau teknik lain dalam waktu yang berbeda-beda, jika ditemukan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian.

c. Mengadakan *Membercheck*.

*Member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga

informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

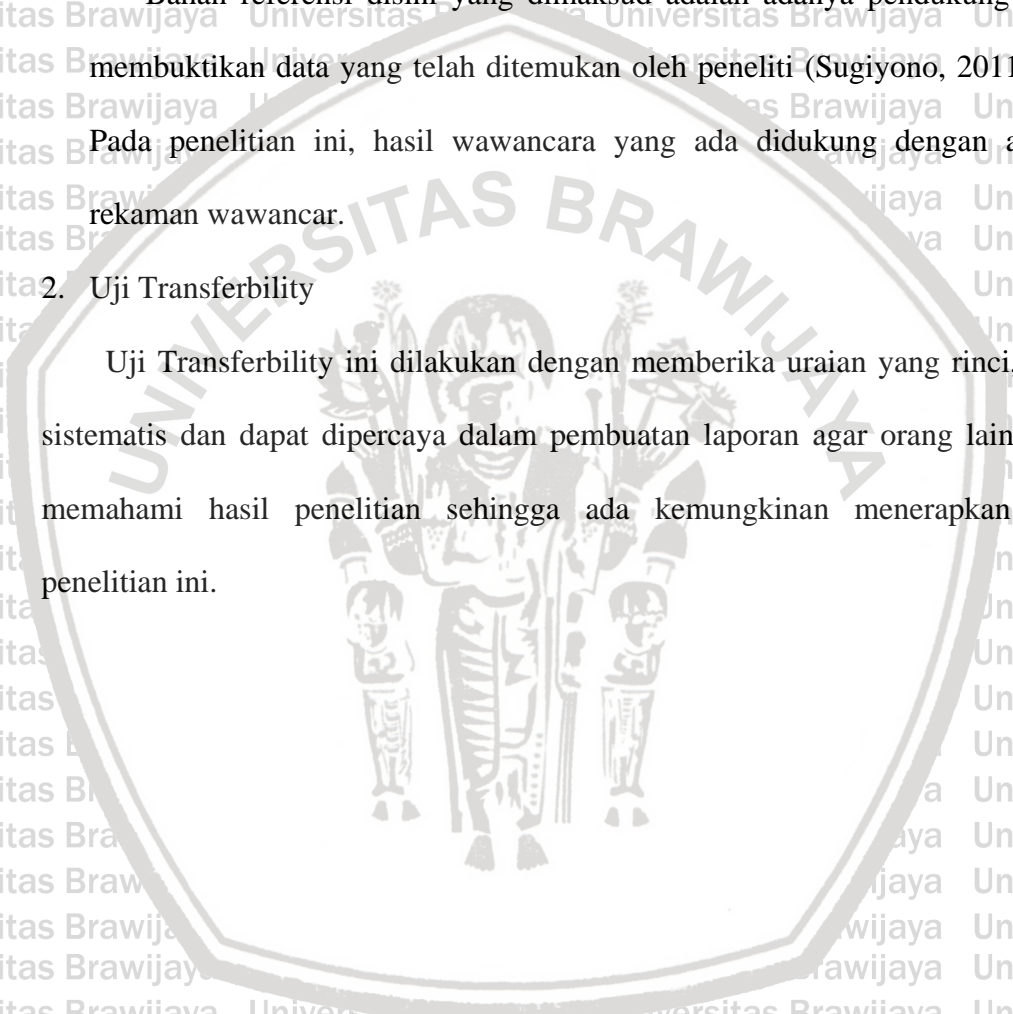
d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011:275).

Pada penelitian ini, hasil wawancara yang ada didukung dengan adanya rekaman wawancara.

2. Uji Transferability

Uji Transferability ini dilakukan dengan memberika uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya dalam pembuatan laporan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan menerapkan hasil penelitian ini.





## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi:

Kabupaten Lamongan memiliki visi yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing" (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011).

##### b. Misi:

Kabupaten Lamongan memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas).
- 2) Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktifitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).
- 4) Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal dan kesetaraan gender (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011).

#### 2. Kondisi Geografis

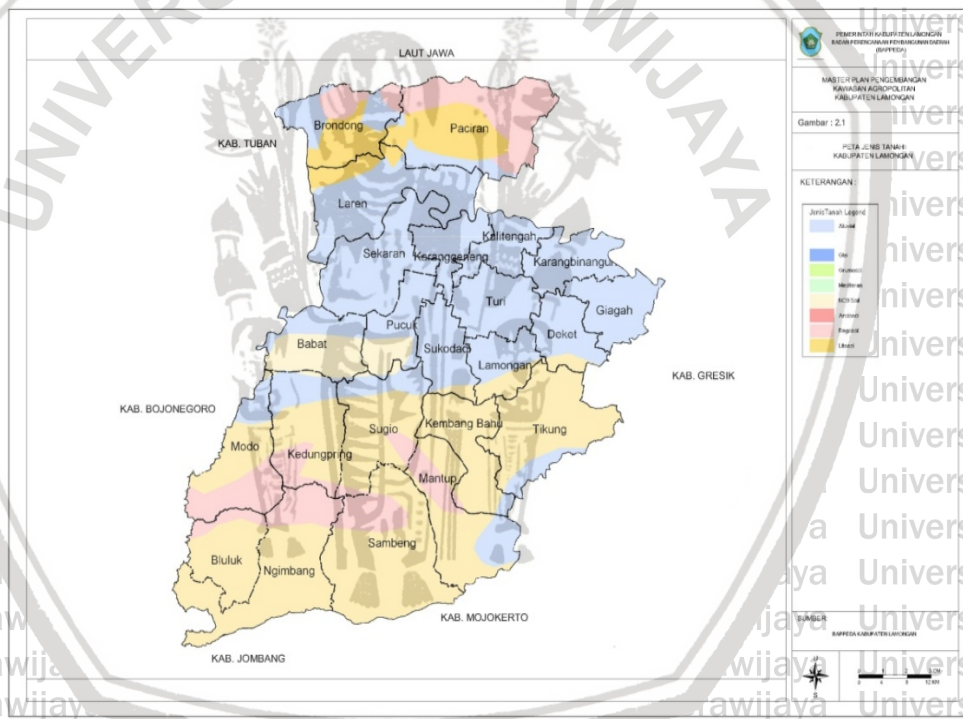
Kabupaten Lamongan secara geografis (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011) terletak pada:

“Antara 6° 51’ 54” sampai dengan 7°23’ 06” lintang selatan dan diantara 122° 4’ 41” sampai 112° 33’12” bujur timur. Kabupaten

Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 181.280 Ha/ 1.812,8 Km atau ± 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur”.

Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan (Lihat dalam Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2011) adalah:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban



**Gambar 6. Peta Kabupaten Lamongan**

Sumber: Masetr Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2011

Wilayah Kabupaten terdiri dari 27 kecamatan dan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga



karakteristik (lihat dalam *Master Plan* Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011) yaitu:

- 1) Bagian tengah selatan merupakan dataran rendah yang relative subur yang membentang dari Kecamatan Kedungring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- 2) Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokuro.
- 3) Bagian tengah utara merupakan daerah bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Kondisi tata guna tanah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tata Guna Lahan Kabupaten Lamongan**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Prosentase (%)
1.	Permukiman	13.030,00	7,19
2.	Sawah Irigasi	45.841,00	25,29
3.	Sawah Tadah Hujan	33.479,00	18,46
4.	Perkebunan	9.919,14	5,47
5.	Hutan	33.717,30	18,60
6.	Hutan Rakyat	7.098,10	3,91
7.	Tambak	1.380,05	0,76
8.	Sungai	8.760,00	4,83
9.	Waduk	8.760,00	4,83
10.	Tegalan/Ladang	12.838,91	7,08
11.	Pertambangan	500,00	0,28
12.	Peruntukan lainnya	5.997,00	3,31
<b>Jumlah</b>		<b>181.280,00</b>	<b>100</b>

Sumber: Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011

**3. Topografi**

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah diatas permukaan laut dan kelerengan lahan (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011) bahwa:

”Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-20 m dengan luas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100m”.

**4. Klimatologi**

Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011) bahwa:

”Keadaan iklim di Kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 musim yaitu: musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Mei, sedang pada bulan-bulan lain curah hujan relatif”.

**5. Hidrologi**

”Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ±68 km, Kali Blawi sepanjang ±33 km dan Kali Lamong sepanjang ±32 km serta dialiri beberapa sungai kecil. Selain dialiri oleh ketiga sungai besar tersebut, kondisi hidrologi ditentukan oleh adanya telaga dan mata air yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kabuapten Lamongan mempunyai morfologi yang relatif datar bahkan pada beberapa wilayah dijumpai cekungan-cekungan yang saat ini berupa rawa. Di beberapa daerah masih terdapat area dengan keadaan genangan yang berlangsung periodik selama setengah bulan sampai dengan tiga bulan diwaktu musim kemarau” (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011).



**6. Kawasan Lindung**

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Lamongan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2000 (Lihat dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011) yang meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, meliputi:
  - 1) Kawasan Hutan Lindung seluas 252,90 ha yang terdapat di Kecamatan Sugio, ambeng, Modo, dan Ngimabng
  - 2) Kawasan lindung lainnya
  - 3) Kawasan resapan air
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - 1) Kawasan sekitar mata air
  - 2) Sempadan Sungai
  - 3) Kawasan sekitar telaga
  - 4) Kawasan sekitar waduk
  - 5) Sekitar rawa
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, meliputi:
  - 1) Kawasan Suaka
  - 2) Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya
  - 3) Kawasan pantai

Daerah yang merupakan kawasan cagar alam geologi adalah Goa Maharani di Kecamatan Paciran yang merupakan bentuk batuan sedimen yang membentuk stalakmit dan stalaktit. Goa Maharani saat ini sudah dikonservasi dan mejadi tempat wisata.

**7. Kondisi Demografi**

Laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat tidak selalu tergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan sensus penduduk

tahun 2000 dan 2010 yaitu pada tahun 2000 sebanyak 1.181.660 sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 1.179.059 jadi pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan per tahun adalah sebesar -0,02% (Lihat Lamongan Dalam Angka 2012).

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2006 hingga 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2011**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2006	694.143	695.910	1.390.053
2.	2007	705.755	706.631	1.412.386
3.	2008	719.567	720.319	1.439.886
4.	2009	738.996	739.070	1.478.066
5.	2010	750.167	749.804	1.499.971
6.	2011	643.262	662.636	1.305.898

Sumber: Lamongan Dalam Angka 2012

**8. Kesejahteraan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Lamongan berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2011 adalah:

”..... ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu kondisi secara makro diantaranya perkembangan situasi perekonomian nasional maupun internasional serta sebagai kebijakan pemerintah pusat baik yang berkaitan dengan sektor riil maupun moneter yang mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Lamongan”.



Sedangkan kondisi ekonomi Kabupaten Lamongan perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Perkembangan PDRB Kabupaten Lamongan**

**Tahun 2010-2011**

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK	
	2010	2011	2010	2011
Pertanian	5.292.774,75	4.730.111,64	3.135.747,71	3.209.766,22
Pertambangan dan Penggalian	24.022,51	28.046,97	8.978,56	9.942,18
Industri Pengolahan	592.980,10	699.680,02	324.437,74	363.511,48
Lastrik, Gas dan Air Bersih	94.464,52	105.350,12	69.623,70	75.199,72
Bangunan/Konstruksi	320.941,62	367.351,29	159.169,68	173.652,84
Perdagangan, Hotel & Restoran	3.689.881,82	4.507.274,27	1.67.554,02	1.826.266,21
Pengangkutan & Kominikasi	248.672,45	277.759,24	109.866,66	117.726,62
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	409.909,97	480.868,38	232.843,30	261.531,05
Jasa-jasa	1.100.508,14	1.264.513,06	532.845,12	588.226,03
<b>Jumlah</b>	<b>11.774.155,30</b>	<b>13.460.954,99</b>	<b>6.191.066,48</b>	<b>6.625.823,03</b>

Sumber : Ringkasan peneliti berdasarkan Lamongan Dalam Angka 2012.

”PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah pertumbuhan riil yang tidak dipengaruhi oleh unsur kebaikan harga atau inflasi, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara mnyeluruh mengenai produk barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah tertentu” (Lihat dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011)

### 9. Kesejahteraan Sosial

#### a. Pendidikan

Pembangunan dibidang pendidikan dapat ditunjukkan dari perkembangan lembaga, jumlah guru, murid dan tingkat partisipasi sekolah dari tahun ke tahun. Jumlah sekolah dan guru di jenjang TK sampai SMA di Kabupaten Lamonga dapat dilihat pada tabel berikut:

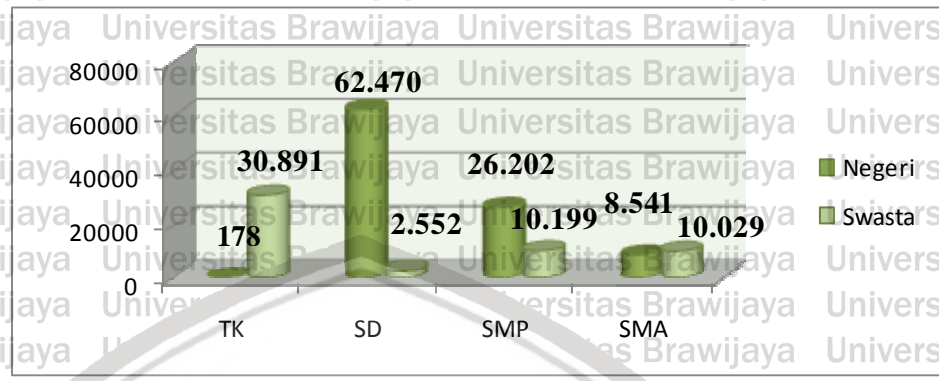
**Tabel 4. Jumlah Sekolah dan Guru Jenjang TK – SMA Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan.**

No	Jenjang		Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	TK	TK	2	940	17	3.299
		RA	-	193	-	600
2.	SD	SD	617	23	6.710	278
		SDLB	1	3	19	18
		MI	3	527	133	6.246
3.	SMP	SMP	48	89	2.021	1.818
		SMP Terbuka	4	-	12	-
		SMPLB	-	2	-	10
		MTS	2	175	132	2.560
4.	SMA	SMA	13	53	742	1.401
		SMALB	-	2	-	8
		SMK	6	53	320	1.691
		MA	2	73	183	1.298

Sumber: Ringkasan peneliti berdasarkan Lamongan Dalam Angka 2012

Adapun jumlah siswa Tiap Jenjang Pendidikan TK - SMA di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:





**Gambar 7. Jumlah Siswa Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2011 di Kabupaten Lamongan**

Sumber: Olahan peneliti berdasarkan Lamongan Dalam Angka 2012

Di Kabupaten Lamongan juga terdapat beberapa Perguruan Tinggi swasta dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Perguruan Tinggi di Kabupaten Lamongan Tahun 2011**

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa
1.	UNISLA	142	4.774
2.	UNISDA LAMONGAN	101	3.512
3.	AKPER LAMONGAN	48	280
4.	ASTIKIP PGRI LAMONGAN	24	225
5.	STIE KH.AKHMAD DAHLAN	21	377
6.	STIKES MUHAMDIYAH	93	1.309
7.	STIT AL-FALAH	20	460
8.	STAIM	34	133
9.	STAI SUNAN DRAJAT	26	216
10.	STIT MUHAMADIYAH	18	89
11.	STIE MUHAMDIYAH	21	119
12.	STIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN	20	80
<b>Total</b>		<b>568</b>	<b>11.574</b>

Sumber: Ringkasan peneliti berdasarkan Lamongan Dalam Angka 2012.

**b. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan melalui program-program pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan rujukan, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan permukiman, pemberdayaan kesehatan masyarakat, farmasi, makanan dan minuman, dan sumber daya kesehatan. Menurut data Lamongan Dalam Angka bahwa:

”Sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Lamongan terdapat 6 unit rumah sakit yaitu: di Kecamatan Babat 1 unit, Kecamatan Ngimbang 1 unit, dan Kecamatan Lamongan 4 unit. Untuk balai pengobatan sebanyak 34 unit dan BKIA sebanyak 10 unit tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan jumlah Puskesmas sebanyak 33 unit dan 108 unit Puskesmas pembantu yang tersebar dimasing-masing kecamatan”.

**c. Pertanian**

“Sektor pertanian Kabupaten Lamongan selama 5 tahun masih dominan terhadap PDRB Kabuapten Lamongan. Sektor pertanian tersebut meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hail-hasilnya, sub sektor kehutanan serta sub sektor perikanan” (Lihat dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011).

Adapun kontribusi sektor pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 6. Kontribusi Sektor Pertanian Dalam PDRB Kabupaten Lamongan**

**Tahun 2010 s/d 2011.**

No	Sektor Pertanian	ADHB		ADHK	
		2010	2011	2010	2011
1.	Tanaman Bahan Makanan	3.205.132,26	3.394.725,60	1.899.536,28	3.209.766,22
2.	Tanaman Perkebunan	109.285,87	127.396,07	76.296,36	82.569,45
3.	Peternakan & Hasilnya	180.344,21	202.629,02	96.333,72	104.577,42
3.	Kehutanan	3.026,56	3.235,94	1.224,57	1.227,73
4.	Perikanan	1.794.985,85	2.002.125,01	1.062.356,78	1.183.023,66

Sumber: Ringkasan peneliti berdasarkan Lamongan Dalam Angka 2012

**10. Perkebunan**

Perkebunan di Kabupaten Lamongan tersebar di beberapa kecamatan yaitu sebagai berikut:

“Luas wilayah kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan sebesar 9.919,14 Ha atau sekitar 5,47% dari luas wilayah yang tersebar di Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong”.

Adapun produksi komoditas perkebunan Kabupaten Lamongan tahun 2010 s/d 2011 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2011**

No	Komoditi	Produksi (Ton)
1.	Tembakau Virginia	67.607,30
2.	Tembakau Rayat	40.946,90
3.	Tebu	152.403,17
4.	Kenaf	-
5.	Kapas	39,33
6.	Kelapa	2,17
7.	Siwalan	-
8.	Cabe Jamu	47,13

Sumber: Ringkasan peneliti berdasarkan Lamongan Dalam Angka 2012

**11. Perwilayahan Pembangunan**

Wilayah Kabupaten Lamongan (Lihat *Master Plan* Pengembangan

Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011) meliputi:

“Wilayah Kabupaten Lamongan, secara keseluruhan terbagi ke dalam 462 desa dan 12 kelurahan, dilihat dari aspek demografisnya sekitar 73,62% penduduk bermukim di daerah perdesaan, yang mempunyai fungsi tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri di wilayah perdesaan, akan tetapi juga mempunyai fungsi strategis untuk mendukung kebutuhan pangan di wilayah perkotaan”.

Sebagian besar pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Lamongan yang berlokasi di kawasan perdesaan selain dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional, juga dapat mengurangi tingkat urbanisasi. Kegiatan ekonomi di pedesaan diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta



dapat memenuhi ketersediaan pangan dan memacu produktifitas produk-produk perdesaan, sehingga pada dengan hal tersebut peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Program pembangunan pedesaan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan dan mempercepat industrialisasi pedesaan (Lihat *Master Plan* Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun

2011). Dari tujuan tersebut terkandung sasaran yang akan dicapai yaitu:

“Meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan pekerjaan, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk konsumsi dan produksi, terwujudnya hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, menguatnya ekonomi lokal, serta meningkatnya lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan” (Lihat *Master Plan* Pengemabangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011).

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional karena berfungsi sebagai berikut:

“Sebagai tempat penghidupan yang berkelanjutan (*sustainability*), terutama sebagai cadangan dan sumber daya alam yang ada di pedesaan, mendukung ekonomi nasional dan meredam urbanisasi. Namun karena sebagian besar aktor utama pembangunan berkedudukan di perkotaan, mereka cenderung lebih mengutamakan pembangunan perkotaan dari pada pembangunan pedesaan”(Lihat *Master Plan* Pengemabangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011).

Mengingat hal tersebut, maka bukan hal yang tabuh lagi ketika pelaksanaan pembangunan pada umumnya direncanakan dari perkotaan sehingga tidak jarang pembangunan pedesaan menjadi sub ordinat terhadap pembangunan perkotaan

dengan kata lain bahwa yang diutamakan adalah pembangunan perkotaan sedangkan pembangunan pedesaan hanya sebagai penunjang perkotaan.

**B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

**1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di**

**Kabupaten Lamongan.**

**a. Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten**

**Lamongan.**

Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan di dasarkan pada kebijakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah.

Undang-undang tersebut mengharuskan pada pemerintah tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi lokasi pengembangan kawasan agropolitan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang menyangkut masalah pengembangan wilayah agropolitan tersebut.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan secara tegas bahwa pemerintah telah mengatur adanya pengembangan kawasan agropolitan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah yang berfungsi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, selain itu juga disebutkan mengenai hirarki perencanaan penataan ruang wilayah pedesaan sebagai kawasan Agropolitan diperlukan adanya landasan kebijakan yang kuat” (Suyatno 2008:38).



2) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413.013/2008 tentang penetapan sentra kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413.013/2008 tersebut, kawasan Agropolitan berada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Pusat kawasan Agropolitan berada di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

3) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-203.

Berdasarkan PERDA tersebut maka pembangunan Kabupaten Lamongan diarahkan dengan visi yaitu “Terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang adil, merata dan berdaya saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang ditempuh adalah:

- a) Mewujudkan Masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- b) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah.
- c) Mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.
- d) Mewujudkan Lamongan yang Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dengan 10 prinsipnya yaitu: prinsip partisipasi, penegakan hukum dan supremasi hukum, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektivitas, profesionalisme aparatur.
- e) Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.
- f) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal (Lihat dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011).

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam” (Lihat dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011).

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Agropolitan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a) Kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman selatan sebagai penunjang kegiatan Agropolitan. Adapun strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut sebagai berikut:
  - (1) Mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan
  - (2) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Agropolitan.
- b) Kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah. Adapun strategi untuk mewujudkan kegiatan tersebut yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan sebagai berikut:



(1) Pengembangan jalan kolektor primer sebagai penghubung wilayah perkotaan dibagian selatan.

(2) Pengembangan jaringan transportasi wilayah selatan.

c) Kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata. Strategi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan sebagai berikut:

(1) Perlindungan terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang kegiatan pertanian.

(2) Penyediaan air bersih sampai tingkat pedesaan dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada.

(3) Peningkatan kapasitas penampungan air pada waduk-waduk pertanian desa.

d) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem berkelanjutan dalam jangka panjang. Adapun strategi yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

(2) Pengembangan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan.

(4) Peningkatan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara intensififikasi.

e) Kebijakan pengembangan kegiatan pendukung kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan Agropolitan. Adapaun startegi yang terkait sebagai berikut:

- (1) Penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan, pasar agrobisnis Babat dan kawasan agropolitan.

**b. Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan**

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan melibatkan beberapa aktor. Aktor-aktor tersebut meliputi :

- 1) Tim Kelompok Kerja (Pokja) pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan laporan kegiatan Agropolitan tahun 2010 bahwa tim kelompok kerja (Pokja) pengembangan kawasan Agropolitan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/91/Kep/413.013/2008.

Informan yang bernama Ibu Siti selaku Kasubid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan bahwa:



“...tugas dari tim pokja ya merencanakan program kegiatan tahunan mulai 2009 sampai 2013, melaksanakan koordinasi ke Provinsi untuk usulan kegiatan yang dibuat, kemudian melaksanakan monev secara insidental dan membuat usulan kegiatan ke SKPD”.

Berdasarkan ungkapan dari informan tersebut peneliti menyimpulkan

bahwa tim kelompok kerja (Pokja) Agropolitan Kabupaten Lamongan memiliki 4 tugas yaitu merencanakan kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan yang akan diusulkan kepada SKPD, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD serta melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan pemerintah provinsi Jawa Timur terkait kegiatan yang telah diselenggarakan tersebut.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.

Pengembangan kawasan Agropolitan dalam implementasinya melibatkan beberapa aktor pemerintah daerah yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

3) Lembaga Kemasyarakatan

Selain tim pokja dan beberapa SKPD, maka lembaga kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat juga terlibat aktif dalam implementasi kebijakan pengemangan kawasan Agropolitan. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut meliputi Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Organik, Kelompok ternak dan koperasi wanita (KOPWAN).

**c. Standard Operating Procedures (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan**

Berkaitan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP), Informan yang bernama Ibu Siti selaku Kasubid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) mengungkapkan sebagai berikut:

“Belum ada SOP nya, sejauh ini untuk pelaksanaan Agropolitan masih mengikuti pusat”.

Berdasarkan ungkapan tersebut menunjukkan bahwa belum dibuat *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.



**d. Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan**

**Agropolitan Kabupaten Lamongan.**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, untuk menilai bagaimana koordinasi antara aktor maka peneliti melihat dari perspektif peran masing-masing aktor tersebut sebagai berikut:

- 1) BAPPEDA Kabupaten Lamongan merupakan SKPD perencana kebijakan pembangunan dalam hal ini adalah perencana tata ruang wialyah Kabupaten Lamongan yang didalamnya termasuk pengembangan kawasan Agropolitan.
- 2) Tim Pokja Agropolitan Kabupaten Lamongan merupakan tim yang mengkoordinir bagaimana pengembangan kawasan Agropolitan dilaksanakan mulai dari merencanakan program kegiatan hingga mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan.
- 3) SKPD Pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pengambangan Kwasan Agropolitan merupakan SKPD yang berperan secara teknis dalam pelaksanaan pengembangan kaasan Agropolitan
- 4) Lembaga Kemasyarakatan merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari program-program SKPD. Dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut program-program SKPD dapat tersalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya.

**e. Realisasi Kegiatan Program-program Pengembangan Kawasan**

**Agropolitan Kabupaten Lamongan.**

Pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan direalisasikan dalam berbagai macam kegiatan yang dilaksanakam oleh beberapa SKPD terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, maka peneliti mengklasifikasikan kegiatan – kegiatan yang terealisasi sesuai jenis program sebagai berikut:

- 1) Kegiatan program –program pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010

**Tabel 8. Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010**

No	Program	Kegiatan	Pelaksana
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lahan	Pembangunan sumur air tanah	Dinas Peratnian
		Pengelolaan lahan dan air	
2.	Pengadaan sarana prasaran pengelolaan tembakau	Pengadaan alat perajang tembakau	
		Pengadan terpal	
3.	Bantuan pinjaman modal usaha tani	PMI Tebu	
		P4K	
4.	Percontohan intensifikasi	Percontohan intensifikasi tembakau Virginia dan tembakau jawa	
5.	Subtitusi tembakau	Subtitusi tembakau dengan komoditi lain di kawasan Agropolitan	
6.	Pengembanagn bibit unggul	Pengembanagn bibit unggul varitas tembakau unggul	
7.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	



1	2	3	4
8.	Perbaikan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi tebu	
9.	Pembangunan sarana prasarana penyuluhan	Pembangunan sarana prasarana penyuluhan kehutanan berupa Demplot	
10.		Pembukaan Lahan hijau Pakan Terbak (Rumput gajah, rumput setaria, lamtoro, turi dan gliricia)	Dinas Peternakan
11.		Pelaksanaan inseminasi buatan	
12.		Pembinaan kelompok ternak	
13.		Pelatihan las dan perbengkelan di desa Manungrejo Kec. Ngimbang	Dinas Koperindag
14.		Pembinaan industri kecil menengah (IKM) rokok di Desa Ngimbang Kec. Ngimbang	
15.		Jalan Poros Strategis : Rehab jembatan perbaikan jalan Ngasemlemahbang-Kedungmentawar	
16.		Pembangunan Jalan Poros Desa: Ds. Mendogo, Slaharwotan, Lawak, Cerme, Munungrejo, Ngasemlemahbang, Lamongrejo, Kedungmentawar, Jejel, Tlemang, Mendogo, Ngimbang, Gagangtingan	Dinas PU Bina Marga
17.		Pembangunan Jalan Usaha Tani : JUT Ds. Ngimbang	

Sumber: Ringkasan Kegiatan Berdasarkan Laporan Evaluasi Kawasan Agropolitan Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamongan.

2) Kegiatan program –program pengembangan kawasan Agropolitan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2011

**Tabel 9. Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabuapten Lamongan  
Tahun 2011**

No	Program	Kegiatan	Pelaksana	
1	2	3	4	
1.	Pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan	Dinas Pertanian	
2.	Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi	Rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi		
3.	Peningkatan kesejahteraan petani	P4K		
		Pengemangan PMI Padi		
		Pengembangan PMI Tebu		
4.		Pengadaan Hand traktor dan pembinaan		
5.		Pertanian/perkebunan tepat guna		
6.		Intensifikasi tembakau Virginia dan pengembangan tembakau vike		
7.		Pengadaan sarana prasarana dan sosialisasi Alsinbun		
8.		Pengembangan pembenihan pembibitan PUAP		
9.	GEMERLAP (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan)	Pengembangan kawasan peternakan		Dinas Peternakan
10.	DBHT (Dana Bantuan Hasil Tembakau)	Pembinaan kemampuan, ketrampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat peternakan didaerah penghasil tembakau		Dinas Koperindag
11.	PMI Sapi Bibit	Peningkatan mutu intensifikasi sapi bibit		
12.	Pengembangan sistem pendukung usaha UKM	Pembinaan pembentukan LKM di kawasan industri tembakau		



1	2	3	4
13.	Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	Pembentukan koperasi pabrik rokok	
14.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pembangunan pasar desa	
15.	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pelatihan pembuatan makanan dan minuman bagi masyarakat dilingkungan industri penghasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Dinas Koperindag
16.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Sosialisasi sistem manajemen pemasaran dan promosi bagi IKM-IRT pengrajin rokok	
17.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Sosialisasi bahaya rokok bagi kesehatan dan kebijakan penyelenggaraan undang-undang perlindungan konsumen	
18.		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa cukai rokok dan rokok illegal	
19.		Penyediaan infrastruktur pemukiman dikawasan Agropolitan Tahap I	Dinas PU Cipta Karya
20.		Penyediaan infrastruktur pemukiman dikawasan Agropolitan Tahap II	

Sumber: Ringkasan Laporan kegiatan yang berlokasi di Agropolitan Tahun 2011, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lmaongan

3) Kegiatan program –program pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012

**Tabel 10. Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Program	Kegiatan	Pelaksana
1	2	3	4
1.	Percontohan intensifikasi tembakau Virginia 400 Ha	Bantuan pupuk 100 Kg/Ha	Dinas Pertanian
2.	Percontohan intensifikasi tembakau jawa 400 Ha	Bantuan pupuk 100 Kg/Ha	
3.	Demonstrasi NPK pada tembakau Virginia 50 Ha	Bantuan pupuk 200 Kg/Ha	
4.	Demonstrasi NPK pada tembakau jawa	Bantuan pupuk 200 Kg/Ha	
5.	Demonstrasi pupuk organik pada tembakau Virginia	Bantuan pupuk organik 75 paket	Dinas Pertanian
6.	Pembibitan Tembakau (1,5 juta batang)	Pembibitan tembakau virgina (coker 176 dan T45)	
7.	Demonstrasi kemitraan tembakau Virginia	Bantuan pupuk 600 Kg/Ha	
8.		Pengembangan tanaman turi untuk bahan bakar oven tembakau(2 juta batang)	
9.		Pengadaan hand traktor dan peralatan kerja	
10.	Pengadaan alat perajang tembakau	Pengadaan alat perajang rol (otomatis)	
11.		Alat jemur tembakau (widig)	
12.		Pengadaan pompa air 5,5 (3 Dim)	
12.	Gasifikasi bahan bakar Batubara	Pembuatan tungku gasifikasi Bahan bakar oven (batu bara)	
13.	Intensifikasi tembakau	Pupuk ZK untuk tembakau Virginia	
		Pupuk ZK untuk tembakau jawa	
14.	Pembinaan pengolahan tembakau	Pengadaan terpal plastic	
		Pengadaan kos	



1	2	3	4
15.		Fasilitasi PMI Tebu	
16.	Program pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	Program pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	
17.	Pengembangan perhutani masyarakat pedesaan berbasis konservasi(PPMPBK)	Pengembangan perhutani masyarakat pedesaan berbasis konservasi(PPMPBK)	Dinas Pertanian
18.	Kebun bibit rakyat (KBR)	Kebun bibit rakyat (KBR)	
19.	Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI)	PMI Padi MK	
20.		Pengadaan hand traktor	
21.		Rehab Poskeswa	
22.		Pengembangan alat pengolah kotoran, pengadaan coper da HMT	
23.		Pengendalian sapi/kerbau betina produktif (PBP)	Dinas Peternakan
24.		Pengembangan Agrobis peternakan kambing	
25.		Pengadaan mesin tetas	
26.		Pembinaan dan pengembangan perikanan	
27.		Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan	Dinas Perikanan
28.		Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	
29.	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran sungai	Pengerukan kali Prijetan	
30.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Perbaikan waduk Cerokan	
31.	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Perbaikan jaringan irigasi waduk Bowo	Dinas PU Pengairan
32.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air	Pengerukan waduk Sambilan	
33.		Pengerukan waduk semampirejo	

1	2	3	4
34.		Pengerukan waduk Riinginanom	
35.	Mengendalikan banjir pada dawrah tangkapan air dan badan-badan sungai	Pemeliharaan bangunan dan pintu air	Dinas PU Pengairan
36.		Pembelian bahan dan peralatan kerja	
37.		Pembangunan jalan Poris desa: Jl. Ngasemleambahg-Kedungmentawar Jl. Lamongrejo- Slaji Jl. Sambeng – Garung Jl. Sumberdadi – Kreteranggon – Pamotan	Dinas PU Bina Marga
38.		Pembangunan jalan Kabupaten: Jl. Tanjung- Songowareng Jl. Mantup – Sambeng Jl. Sambeng-Ngimbang Jl. Sukorame – Bluluk Jl. Bluluk- Ngimbang	
39.		Rehab pasar desa	
40.		Pelatihan peningkatan SDM dan penyediaan peralatan bagi IKM ukir kayu	
41.		Tera ulang alat UTTP	
42.		Pelatihan dan peningkatan kualitas produk dan kemasan bagi IKM IRT krupuk sukun dan garut	Dinas Koperindag
43.		Pelatihan pembuatan kurma tomat dan manisan mangga bagi masyarakat penghasil tembakau.	
44.		Pembangunan lumbung dan lantai Jemur	Kantor Ketahanan Pangan
45.		Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	
46.		Penguatan modal	
47.		modal lumbung pangan	



1	2	3	4
48.		Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	

Sumber : Ringkasan berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012,  
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

#### **f. Alokasi Sumber Daya dalam pelaksanaan pengembangan kawasan**

##### **Agropolitan Kabupaten Lamongan.**

Alokasi sumber daya dalam kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

##### 1) Realisasi anggaran kegiatan Agropolitan tahun 2010

###### a) Pengembangan Komoditas Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan pada tahun 2010 meliputi komoditas unggulan pertanian dan komoditas unggulan ternak. Kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk kegiatan pengembangan komoditas unggulan ternak dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi anggaran dana untuk kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 11. Realisasi Anggaran Kegiatan di Kawasan Agropolitan  
Kabupate Lamongan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Dana	Sumber
1	2	3	4
1.	Pembangunan sumur air tanah	35.100.000	
2.	Pembangunan sumur tanah dangkal	20.000.000	
3.	Pengelolaan lahan dan air (rehab JIDES)	30.000.000	
4.	Alat Perajang tembakau (8 unit)	16.000.000	
5.	Terpal (7 unit)	2.450.000	
6.	Peningkatan mutu intensifikasi tebu (125 ha)	625.000.000	
7.	P4K(Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil)	240.000.000	APBD Kab
8.	Percontohan intensifikasi tembakau Virginia dan jawa (25 ha)	26.250.000	
9.	Subtitusi tembakau dengan komoditi lain pada kawasan Agropolitan (55 ha)	65.000.000	
10.	Pengembangan bibit unggul varietas tembakau unggul (5 kg)	7.500.000	
11.	Pembangunan Jalan Usha Tani (JUT)	88.744.500	
12.	Perbaikan jaringan irigasi tebu	8.500.000	
13.	Pembangunan sarana prasarana penyuluhan kehutanan berupa Demplot tanaman porang	5.500.000	APBD Kab
	Pembukaan lahan hijauan ternak (rumput gajah, rumput setaria, lamtoro, turi dan <i>gliricidae</i> )	28.200.000	APBD
	Pelaksanaan imseminasi buatan		
	Pembinaan kelompok ternak		
	Ngasemlembang- Kedungmentawar	101.100.000	P2TPD
	Desa Mendogo	300.000.000	APBD I
	Desa Slaharwotan	75.000.000	
	Desa Lawak	75.000.000	
	Desa Cerme	75.000.000	APBD II
	Desa Munungrejo	75.000.000	
	Desa Ngasemlembang	75.000.000	
	Desa Lamongrejo	75.000.000	BKD Prop
	Desa Slaharwotan	160.000.000	



1	2	3	4
	Desa Lawak	160.000.000	BKD Prov
	Desa Kedungmentawar	100.000.000	
	Desa Jejel	60.000.000	
	Desa Tlemang	60.000.000	
	Desa Mendogo	60.000.000	
	Desa Cerme	25.000.000	
	Desa Ngimbang	60.000.000	
	Desa Gagantangan	60.000.000	
	Desa Manungrejo	60.000.000	
	Jalan Usaha Tani (JUT)		

Sumber: Ringkasan Berdasarkan Laporan Evaluasi Kawasan Agropolitan Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamongan

2) Alokasi Sumber Daya Tahun 2011

**Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan di Kawasan Agropolitan**

**Kabupaten Lamongan Tahun 2011**

No	Kegiatan	Lokasi	Dana	Sumber
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Ds. Jejel, Mendogo, Lawak	96.960.000	DAK
2.	Rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi	Ds. Sendangrejo, Ngimbang	84.645.000	DAK
3.	Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	Ds. Sendangrejo, Ngasemlembang, Manungrejo, Purwokerto, Lawak	240.000.000	APBD
4.	Pengembangan PMI padi	Ds. Selarohwetan, Drujut Gurit, Mendugo	100.000.000	APBD
5.	Pengembangan PMI tebu	Ds. Tebu, KPTR Lamong Jaya	425.000.000	APBD
6.	Pengadaan Hand traktor dan pembinaan	Ds. Lamongrejo, Ngasemlembang, Jejel	75.000.000	Cukai
7.	Pertanian/perkebunan tepat guna	Ds. Jejel, Gagantangan, Mendogo	126.900.000	DAK & Gemerlap

1	2	3	4	5
8.	Intensifikasi tembakau Virginia dan pengembangan tembakau vike	Ds. Slaharwotan, Ngasemlemahbang, Ngimbang	39.000.000	Cukai
9.	Pengadaan sarana prasarana dan Sosialisasi Alsinbun	Ds. Drujut Gurit	16.000.000	Cukai
10.	Pengembangan pembenihan pembibitan PUAP	Ds. Ngimbang, Gagangtingan		
11.	Pengembangan kawasan Peternakan Kambing	Ds. Selahorwotan	280.500.000	
		Ds. Sendangrejo	178.500.000	
		Ds. Lamongrejo	153.000.000	
		Ds. Ngimbang	127.500.000	
		Ds. Jejel	127.500.000	
12.	Pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat peternak didaerah penghasil tembakau	Ds. Lamongrejo	76.230.000	
13.	Peningkatan mutu intensifikasi sapi bibit	Ds. Sendangrejo	56.000.000	
14.	Pembinaan pembentukan LKM di kawasan industri tembakau	Ds. Lamongrejo Kec. Ngimbang	50.000.000	DBHC
15.	Pembentukan koperasi pabrik rokok	Ds. Lamongrejo Kec. Ngimbang	25.000.000	DBHC
16.	Pembangunan pasar Desa	Ds. Purwokerto Kec. Ngimbang	494.400.000	DBHC
17.	Pelatihan pembuatan makanan dan minuman	Kec. Ngimbang Kec. Sambeng	75.000.000	DBHC
18.	Sosialisasi sistem manajemen pemasaran dan promosi bagi IKM-IRT pengrajin rokok	Kec. Ngimbang Kec. Sambeng	45.000.000	DBHC



1	2	3	4	5
19.	Sosialisasi bahaya rokok bagi kesehatan dan kebijakan penyelenggaraan undang-undang perlindungan konsumen	Ds. Purwokerto Kec. Ngimbang	50.000.000	DBHC
20.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa cukai rokok dan rokok illegal	Ds. Lamongrejo Kec. Ngimbang	50.000.000	DBHC
21.	Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan Agropolitan tahap 1	Ds. Durikedongjero, Mendogo	2.500.000.000	
22.	Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan Agropolitan tahap 1	Ds. Durikedongjero, Mendogo, Gagantingan	1.100.000.000	

Sumber: Ringkasan Berdasarkan Laporan Inventarisasi Jumlah dan Nilai Program-Kegiatan yang Berlokasi di Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2011, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

3) Alokasi Sumber Daya Tahun 2012

**Tabel.13 Realisasi Anggaran Kegiatan Agropolitan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Kegiatan	Lokasi	Dana	Sumber
1	2	3	4	5
1.	Percontohan Intensifikasi Tembakau virginia 400 ha. Bantuan pupuk 100 kg per ha	Kecamatan Kedungpring	187.500.000	Cukai
2.	Percontohan Intensifikasi Tembakau Jawa 400 ha.	Kec.Sambeng dan Mantup	150.000.000	APBD Provinsi
3.	Demonstrasi NPK pada Tembakau Virginia 50 ha.	Kec. Modo	37.500.000	

1	2	3	4	5
4.	Demonstrasi NPK pada Tembakau Jawa 50 ha.	Kec. Bluluk	37.500.000	
5.	Demonstrasi pupuk Organik pada tembakau Virginia 25 ha.	Kec. Modo	18.750.000	
6.	Pembibitan tembakau Virginia	Kec. Kedungpring	30.000.000	
7.	Demonstrasi kemitraan tembakau Virginia.	Kec. Modo	37.500.000	
8.	Pengembang Tanaman turi untuk bahan bakar oven tembakau	Kec. Kedungpring	200.000.000	
9.	Pengadaan hand traktor dan peralatan kerja	Kec. Ngimbang, Kedungpring, Sambeng, Bluluk, Sukorame, Modo	405.598.750	DBH-CHT
10.	Pengadaan alat perakang tembakau:			
	a. Pengadaan alat perajang rol (otomatis)	Kec. Ngimbang, Modo, Bluluk, Sukorame, Sambeng, Mantup, Kedungpring	95.700.000	
	b. dan alat jemur tembakau rajangan	Kec. Bluluk	45.500.000	DBH-CHT
11.	Pengadaan pompa air 3 Dim	Kec. Ngimbang, Kedungpring, Babat, Modo, Bluluk, Sukorame, Sambeng, Mantup	138.759.007,5	9
12.	Pembuata gasifikasi bahan bakar batubara:			
	a. Pembuatan tungku gasifikasi	Kec. Kedungpring	98.700.000	



1	2	3	4	5
	b. Bahan bakar oven(batu bara)	Kec. Kedungpring	75.900.000	
13.	Intensifikasi Tembakau Virginia dan jawa:			
	a. Pupuk ZK untuk tembakau Virginia	Kec. Ngimbang, Modo, Kedungpring, Sukorame	388.740.000	
	b. Pupuk ZK untuk tembakau jawa	Kec. Bluluk	77.748.000	
14.	Pembinaan pengolahan tembakau:			
	Pengadaan terpal plastic	Kec. Ngimbang	29.920.000	
	Pengadaan Kaos	Kec. Ngimbang, Mantup, Sambeng, Sukorame, Bluluk, Modo, Kedungpring, Babat	32.500.000	
15.	Fasilitasi PMI Tebu	Kec. Ngimbang, Sambeng, Mantup		
16.	Program pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	Kec. Bluluk, Modo, Mantup, Ngimbang, Sambeng	2.137.000.000	APBD II
17.	Pengembangan perhutani masyarakat pedesaan berbasis konservasi (PPMPBK)	Kec. Kedungpring, Mantup		
18.	Kebun bibit rakyat (KBR)	Kec. Ngimbang, Modo, Bluluk, Mantup, Sambeng, Sukorame, Kedungpring		APBN
19.	Peningkatan mutu intensifikasi (PMI) padi MK	Kec. Bluluk, Sambeng, Kedungpring, Modo, Mantup	450.000.000	APBD II

1	2	3	4	5
20.	Pengadaan Hand Traktor	Kec. Ngimbang, Modo, Bluluk, Mantup, Sambeng, Sukorame, Kedungpring	175.000.000	DAK
21.	Rehab Poskeswan	Kec. Mantup	50.000.000	DAK
22.	Pengembangan alat pengoalh kotoran, pengadaan coper dan HMT	Kec. Sambeng, Mantup	27.000.000	APBD II
23.	Pengadaan sapi/kerbau betina produktif (PBP)	Kec. Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Mantup, Sukorame, Modo	920.000.000	TP-APBN
24.	Pengembangan agrobis peternakan kambing	Kec. Sambeng, Ngimbang, Sukorame, Bluluk	400.800.000	DBH Cukai
25.	Pengadaan Mesin tetas	Kec. Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Mantup, Sambeng	5.500.000	APBD II
26.	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Kec. Sambeng, Mantup, Sugio, Kedungpring	170.000.000	
27.	Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan	Kec. Sambeng	80.000.000	DBH-CHT
28.	Pendampingan apada kelompok tani pembunidaya ikan	Kec. Mantup, Kedungpring	100.000.000	
29.	Jl. Ngasemlembahbang-Kedungmentawar	Kec. Ngimbang	5.892.841.000	P2TPD
30.	Jl. Lamongrejo-Slaji	Kec. Ngimbang		APBD Prop
31.	Jl. Sambeng – Garung	Kec. Sambeng	778.000.000	APBD II
32.	Jl. Sumberdadi-Kreteranggon- Pamotan	Kec. Mantup	598.000.000	
33.	Jl. Tanjung-Songgowareg	Kec. Bluluk	1.174.245.000	DAK



1	2	3	4	5
34.	Pengerukan Kali prijetan	Kec. Kedungpring	142.000.000	APBD
35.	Perbaikan Waduk Cerokan	Kec. Kedungpring	851.000.000	
36.	Perbaikan jaringan irigasi	Kec. Modo	69.000.000	
37.	Pengerukan Waduk Sembilan	Kec. Mantup	119.000.000	
37.	Pengerukan Waduk Semampirejo	Kec. Sambeng	189.000.000	
39.	Pengerukan Waduk Ringinanom	Kec. Mantup	150.000.000	
40.	Pemeliharaan bangunan dan pintu air	UPT Kedungpring	75.702.000	
41.	Pemeliharaan bahan dan peralatan kerja	UPT Kedungpring	38.580.000	
42.	Rehab Pasar Desa	Kec. Sukorame	345.977.000	
43.	Pelatihan peningkatan SDM dan penyediaan peralatan bagi IKM ukir kayu	Kec. Sambeng, Ngimbang	150.000.000	
44.	Tera ulang alat UTTP	Kec. Sambeng, Mantup, Ngimbang, Bluluk	18.000.000	APBD II
45.	Pelatihan dan peningkatan produk dan kemasan bagi IKM IRT krupuk sukun dan garut	Kec. Sukorame	100.000.000	DBHC
46.	Pelatihan pembuatan kurma tomat dan manisan mangga bagi masyarakat penghasil tembakau	Kec. Sambeng, Ngimbang	150.000.000	
47.	Pembangunan Lumbung dan lantai jemur	Kec. Modo, Mantup		APBD II/ DAK
48.	Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	Kec. Modo	150.000.000	APBN

1	2	3	4	5
49.	Penguatan modal	Kec. Mantup, Kedungpring	40.000.000	APBD I
50.	Penguatan modal lumbung pangan	Kec. Mantup, Sambeng, Modo, Kedungpring	1.310.000.000	APBD II

Sumber: Ringkasan Berdasarkan Data Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

**2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan**

**Agropolitan di Kabupaten Lamongan**

Peneliti telah melaksanakan dialog dengan masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di wilayah selatan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui respon masyarakat, peneliti terlebih dahulu mencari tahu sejauh mana masyarakat mengetahui kebijakan tersebut karena peneliti menilai pengetahuan masyarakat akan memengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang dijumpai oleh peneliti tidak mengetahui adanya kebijakan pengembangan pusat pertanian di wilayah selatan dalam hal ini adalah Agropolitan. Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa pernyataan masyarakat sebagai berikut:

Informan yang bernama Bapak Paijo mengungkapkan sebagai berikut:

*“Nggeh kulo niki mboten ngerti nek Lamongan kidul niki ajenge didamel pengembangan pertanian, kulo nggeh bendinten ten saben*



*nggeh ngeten mawon, kulo ngertose nggeh niki wau saking njenengan nek ten ngriki ajenge didamel pusat pertanian”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa tidak mengetahui kalau Lamongan selatan akan dijadikan wilayah pengembangan pertanian dan kegiatannya sehari-hari pun seperti biasanya seperti hari-hari sebelumnya.

Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh ungkapan dari informan yang bernama Bapak Parman sebagai berikut:

*“Kados kulo niki mung petani, mboten nate ngerti ngoten-ngoten niku, sing ngerti nggeh paling pak kades, nek petani kados kulo nggeh ten saben mawon”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan hanya seorang petani yang tugasnya setiap hari pergi ke sawah dan beranggapan bahwa yang tahu tentang kebijakan yaitu jajaran orang-orang penting seperti kades dan perangkatnya.

Informan yang bernama Bapak Ngateman mengungkapkan sebagai berikut:

*“Lha kulo iki lak patani biasa, mboten ngerti ngoten-ngoten niku, sing ngerti paling nggeh wong sing penting-penting niku, petani kados kulo nggerh ngrtine namung ten saben mawon”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan tidak mengetahui tentang kebijakan dan menurut informan yang tahu tentang hal tersebut hanya orang-orang penting saja.

Informan yang bernama Bapak Jo juga mengungkapkan sebagai berikut:

*“Mboten nate ngertos kulo, mboten ngertos nopo-nopo kulo maslah pengembangan pusat pertanian ten ngriki, nggeh biasa ngeten nik, mboten wonten perubahan”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan tidak pernah mendapatkan informasi tentang pengembangan pertanian diwilayahnya dan kegiatan juga seperti biasa tidak ada perubahan.

Informan yang bernama Ibu Ten juga mengungkapkan sebagai berikut:

*“Nggeh ta mbak? Kulo mboten nate krungu, wong kulo kerjoe ben dinten nggeh ten saben, mbok menawi sing ngerti niku pak kades kale tiang-tiang penting mawon”.*

Informan tersebut mengungkapkan hal yang sama seperti informan sebelumnya yang tidak pernah mendengar informasi tentang pengembangan pertanian diwilayahnya dan beranggapan yang mengetahui hanya orang-orang yang berkepentingan.

Infroman yang bernama Ibu munah juga mengungkapkan sebagai berikut:

*“Nek njenengan tanglet kulo nggeh mboten ngertos, tapi nek njenengan tanglet pak kades, pak camat paling nggeh ngertos”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa tidak mengetahui tentang kebijakan tersebut, bahkan mengarahkan peneliti kepada kades dan camat jika bertanya mengenai pengembangan pertanian karena informan tidak mengetahui sama sekali tentang hal tersebut.

Informan yang bernama Bapak Tar juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut:

*“Petani cilik kados kulo niki lak mboten penting mbak, dados mboten nate ngerti kebijakan saking pemerintah, nek tiang penting kados pak Kades paling nggeh ngerti”.*



Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan hanya bagian dari petani kecil yang tidak pernah mengetahui kebijakan pemerintah.

Selain itu, ketidak tahuan masyarakat tersebut tidak hanya terjadi pada petani kecil saja, salah satu elit masyarakat yang bernama Bapak Utomo sebagai salah satu pengusaha tembakau juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Tidak, belum pernah dengar saya kebijakan itu, cuma waktu pak Makin kesini sempat membicarakan masalah tembakau di wilayah sini. Kalau kebijakan Agropolitan saya belum pernah dengar tapi kalau masalah tembakau menurut saya pemerintah daerah kurang respon koyoke, dinas pertanian sendiri sama tembakau kurang greget. Kita doakan saja kedepannya ada tindak lanjut masalah tembakau”.

Selain pengetahuan masyarakat, terdapat hal penting yang perlu diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yaitu mengenai harapan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, harapan masyarakat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan yang bernama Bapak Man sebagai berikut:

*“Kulo kalian sareng-sareng niki nggeh seneng mawon nek daerah ngriki dados pusat pertanin, sing penting wonten perhatian saking pemerintah kangge petani.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan dan rekannya merasa senang kalau memang wilayahnya akan dijadikan sebagai pusat pertanian, yang penting ada perhatian dari Pemerintah Daerah kepada petani.

Hal lain juga diungkapkan oleh informan yang bernama Ibu Sri sebagai berikut:

*“Nek saget nggeh wonten pasar deso, dadi ibu-ibu niki saget belajar dagang, mboh niku dagang sayur, utawi hasil sawah liayene”*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa kalau bisa diadakan pasar desa, jadi ibu-ibu bisa belajar berdagang baik itu menjual sayur atau hasil dari sawahnya yang lain.

Selain itu informan yang bernama Bapak Jo juga kembali mengungkapkan sebagai berikut.

*“Nggeh niku wau mbak, boten perlu bantuan arto, penjelok kulo nggeh niku, nek wonten wereng nyerang Lamongan nek saged nggeh bantuan obat utawi tindak lanjut saking pemeritah”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan tidak meminta bantuan uang, tetapi kalau ada hama wereng menyerang bisa diberi bantuan obat atau tindakan lain dari Pemerintah Daerah.

Informan yang bernama Ibu Munah juga mengungkapkan sebagai berikut:

*“Nek wonten bantuan hewan ternak nggeh nek saget boten nyukani mawon tapi nggeh di awasi, di sukani weruh carane ngeramute, nek weduse sakit nggeh wonten bantuan ngotenlah”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa walaupun ada bantuan hewan teranak tidak hanya cukup memberi tapi diberikan pengarahan cara merawat ternak.

Terkait dengan kebutuhan dasar pertanian yaitu air, masyarakat juga memiliki harapan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dapat lebih memfasilitasi jaringan irigasi di wilayah selatan. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Tanti sebagai berikut:

*“Nggeh niku, nek saget bantun sumur bor sing saget didesel, ngriki lak angel banyu, wonten nggeh bantuan sumur bor tapi nggeh mboten jeru, cepet asat”.*



Informan tersebut mengungkapkan bahwa kalau bisa bantuan sumur bor yang bisa menggunakan mesin diesel, sudah ada sumur bor tetapi tidak dalam sehingga cepat kering airnya.

Informan yang bernama Bapak Nyoto kembali mengungkapkan sebagai berikut:

*“nek niat nyukani bantuan nggeh niku kangge pengairan soale ten ngirki angel tuyo, sing penting niku nggeh tuyo niku. Nek kali niki nggeh nek mboten jawa ngge mboten wo ten toyane”*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa kalau ada niat memberi bantuan ya untuk irigasi itu penting karena di daerah tersebut sulit air khususnya air irigasi dan ketika kemarau sungai sekitar lahan pertanian tidak ada airnya.

**3. Dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan**

**Kabupaten Lamongan.**

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan dari masing-masing kegiatan dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menunjang penegmabnagn kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a) Pengadaan sarana prasarana pengelolaan tembakau.

Sarana prasaran pengelolaan tembakau tersebut seperti alat perajang tembakau dan terpal. Informan yang bernama Bapak Sumali selaku Kasubid

Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

mengungkapkan bahwa:

“Alat perajang dan terpal itu diberikan kepada petani tembakau agar proses pengelolaan tembakau bisa dilakukan lebih cepat. Alat tersebut disalurkan melalui kelompok tani yang nantinya akan langsung diberikan kepada masyarakat yang menjadi anggota kelompok masing-masing”.

b) Pengembangan bibit unggul

pengembangan bibit unggul varietas tembakau unggul dan juga percontohan intensifikasi tembakau Virginia dan jawa yang tercatat pada laporan kegiatan tahun 2010 hingga 2012. Informan yang bernama Ibu Wiwik selaku Kabid Program Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa:

“...percontohan intensifikasi tembakau dengan jenis tersebut dilakukan mamang karena tembakau jenis tersebut cocok untuk wilayah selatan. Jadi jenis yang cocok saja yang dibudidayakan”.

Informan yang bernama Ibu wiwik selaku Kabid Program Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan kembali mengungkapkan bahwa:

“Pembibitan tembakau virginia dan jawa adalah untuk mengembangkan tembakau jenis tersebut sedangkan intensifikasi tembakau virginia dan jawa dengan pupuk ZK adalah untuk memperbaiki mutu tembakau”.

c) Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI)

Kegiatan PMI baik PMI tebu maupun PMI Padi memiliki tujuan yang sama. Informan yang bernama Bapak Sumali selaku Kasubid Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa:



“...PMI Tebu sasarnya itu petani yang ikut program penanaman tebu, dananya dipinjami oleh APBD II revolving dengan dana bunga 6% per tahun. PMI tebu diberikan langsung kepada koperasi tebu sebagai pengelola. Bantuan pinjaman lunak ditujukan untuk meningkatkan produksi, agar kesejahteraan petani juga meningkat dan membantu petani yang kekurangan dana. Jadi dana dari pemerintah melalui bank daerah diberikan kepada koperasi, sehingga koperasi yang bertanggung jawab. Jadi petani ke koperasi dan koperasi ke bank”.

d) Program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)

Pinjaman modal dengan bunga kecil juga diberikan kepada petani kecil melalui program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) yang tercatat pada laporan kegiatan Agropolitan tahun 2010 dan 2012. Informan yang bernama Ibu Wiwik selaku Kabid Program Dinas Pertanian dan Kehutan Kabupaten Lamongan kembali mengungkapkan bahwa:

“Program peningkatan pendapatan petani kecil itu adalah bantuan modal yang khusus diberikan kepada petani-petani kecil yang memang minim modal”.

e) Pengadaan sarana prasarana pengelolaan tanah

Sarana prasarana pengelolaan tanah seperti *Hand Traktor* diberikan kepada kelompok-kelompok tani agar dapat digunakan secara bergilir oleh para petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Informan yang bernama Bapak Sumali kembali mengungkapkan bahwa:

“Kondisi tanah di Lamongan memang sangat membutuhkan *hand traktor*, kalau ditinjau dari tahun yang lalu pengelolaan tanah itu dengan lembu, jadi bantuan *hand traktor* lewat dana APBD II ini diberikan kepada petani sehingga sikap awal yang tradisional dialihkan menjadi modern, tujuannya untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan pendapatan petani. selain itu juga untuk mempermudah dan mengurangi tenaga kerja, kalau kita menggunakan sapi itu memerlukan lebih banyak tenaga dan membutuhkan waktu 1

minggu. Kalau *hand traktor* hanya butuh 1 orang dan hanya cukup 1 hari untuk pengelolaan tanahnya”.

f) Pengadaan Sarana Prasarana Irigasi

Pengadaan sarana prasarana irigasi seperti pompa air 5,5 PK di Kecamatan Ngimbang, Kedungpring, Babat, Bluluk, Sukorame, Sambeng dan Mantup. Pengadaan pompa air tersebut untuk memenuhi ketersediaan air di wilayah selatan karena mengingat bahwa wilayah selatan Kabupaten Lamongan merupakan wilayah tadah hujan dimana ketersediaan air sangat tergantung pada musim penghujan.

g) Pengembangan pelayanan kesehatan hewan dan sarana prasarana peternakan

Pengembangan pelayanan kesehatan hewan seperti rehab poskeswan di Kecamatan Mantup sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan hewan, sasaran dari kegiatan ini adalah petani ternak. Selain itu juga dilakukan pengembangan alat pengolah kotoran, coper dan hijauan makanan ternak (HMT) di Kecamatan Mantup dan Sambeng. Informan yang bernama Bapak Kasturi selaku Kasubid Bina Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa:

“Pengembangan alat pengelola kotoran tersebut dilakukan untuk memproses hasil limbah (kotoran sapi) untuk dijadikan pupuk organik, sedangkan pengadaan coper yaitu alat untuk memotong rumput menjadi ukuran lebih kecil agar lebih baik hasilnya untuk pakan sapi, sedangkan hijauan makanan ternak (HMT) sendiri dilaksanakan melalui pemanfaatan pekarangan yang tidak produktif untuk ditanami rumput gajah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pakan sapi”.



Selain itu, pada tahun 2012 juga dilaksanakan pengendalian sapi/kerbau betina produktif (PBP) di Kecamatan Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Mantup, Sukorame, dan Modo. Informan yang bernama Bapak Kasturi kembali mengungkapkan bahwa:

“PBP ini dilaksanakan untuk menjaring sapi – sapi betina yang hamil agar tidak dijual melalui pemberian insentif dan untuk menambah penghasilan peternak. Sasaran dari kegiatan ini yaitu para peternak sapi yang memiliki asepor (sapi yang pernah diinsiminasi buatan/kawin suntik) yang hamil 5 bulan keatas”.

Sebagai penunjang pengembangan komoditas peternakan, Pemerintah Daerah juga melaksanakan pengembangan agrobisnis peternakan kambing di Kecamatan Sambeng, Ngimbang, Sukorame, dan Bluluk. Informan yang bernama Bapak Kasturi kembali menegaskan bahwa:

“...pengembangan agrobisnis peternakan kambing tersebut bertujuan untuk menambah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan peternak. Dan sasarannya adalah kelompok peternak yang menanam tembakau dan petani yang terkena dampak tanaman tembakau”.

Selain itu, Informan yang bernama Bapak Kasturi juga kembali menjelaskan bahwa:

“Kegiatan pengembangannya berupa pemberian hewan tenak kambing yang diberikan kepada kelompok dan dikelola oleh kelompok untuk didistribusikan kepada petani yang menjadi anggotanya”.

Pada tahun 2012 juga dilaksanakan pengadaan mesin tetas di Kecamatan Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Mantup, dan Sambeng. Menurut informan yang bernama Bapak Kasturi bahwa:

“Pengadaan mesin tersebut merupakan upaya peningkatan dan penerapan teknologi peternakan dan peningkatan usaha budidaya unggas. Sasarannya adalah kelompok ternak unggas dan perorangan. Kelompok ternak diberikan masing-masing 1 unit, sedangkan untuk perorangan yaitu bagi masyarakat yang memiliki unggas banyak dan mengajukan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan”.

h) Program kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan

Program kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan tersebut dilakukan melalui pemberian paket bantuan budidaya ikan lele di kolam terpal kepada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN). Berdasarkan laporan akhir kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan (2012:7) bahwa paket tersebut meliputi:

“Setiap paket terdiri dari benih ikan lele (1.200 ekor), terpal bentuk kantong. Uk. 2x4x1 m dari bahan terpal jenis TN (1 unit), dinding penahan terpal (1 paket), paku (1 Kg), pompa air dengan kapasitas 30-35 l/min (1 unit), tutup kolam dari paranet Uk. minimal 2,5x5 (1 unit), pakan ukuran 2mm (30 Kg), pakan ukuran 3mm (90 Kg).

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut berdasarkan laporan akhir kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan (2012:4) sebagai berikut:

“Memberikan alternatif peluang usaha yang dapat dikembangkan disektor budidaya perikanan melalui pemberian paket bantuan budidaya ikan lele di kolam terpal sebagai sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat penghasil tanaman tembakau dan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya ikan lele”.

i) pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan ikan

Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan berupa paket bantuan peralatan mesin pembuat pakan ikan. Paket bantuan tersebut meliputi mesin penepung, mesin mixer, mesin cetak pellet dan oven/pengering.



Berdasarkan laporan akhir kegiatan pengadaan peralatan produksi pembuatan pakan (2012:4) bahwa pengadaan peralatan produksi pembuatan pakan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

“Untuk memberikan sarana pembuatan (mesin cetak pellet) kepada kelompok pembudidaya ikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan buatan sendiri, serta dapat dijadikan alternatif peluang usaha dibidang pembuatan pakan ikan”.

j) Pelatihan budidaya ikan

Pelatihan budidaya ikan lele di kolam terpal dengan dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2012. Tujuan dari kegiatan pendampingan (Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Tahun 2012) tersebut sebagai berikut:

“Mengembangkan sektor budidaya perikanan melalui pemberian pelatihan budidaya ikan lele di kolam terpal sehingga usaha ini dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat penghasil tanaman tembakau dan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan”.

k) Pelatihan sektor jasa dan UKM

Pelatihan disektor jasa yang mana dalam hal ini adalah Dinas Koprasi, industri dan perdagangan Kabupaten Lamongan. Sebagai upaya pengembangan keterampilan masyarakat di sektor jasa pada tahun 2010 telah diadakan pelatihan las dan perbengkelan di Desa Manungrejo Kecamatan Ngimbang serta pembinaan industri kecil menengah (IKM) rokok di desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memiliki keahlian yang dapat dijadikan sebagai lapangan kerja dan dengan

keahlian tersebut masyarakat dapat memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhannya.

Pada tahun 2011 dilaksanakan pengembangan sistem pendukung usaha UKM melalui pembentukan LKM di kawasan industri tembakau, pembentukan koperasi pabrik rokok sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, pembangunan pasar desa sebagai upaya meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri. Sebagai upaya untuk mengembangkan industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan makanan dan minuman bagi masyarakat dilingkungan industri penghasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kemampuan teknologi industri melalui sosialisasi sistem manajemen pemasaran dan promosi bagi IKM-IRT pengrajin rokok. Kemudian pada tahun 2012 dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM dan penyediaan peralatan bagi IKM ukiran kayu di Kecamatan Ngimbang dan Sambeng serta pelatihan dan peningkatan kualitas produk dan kemasan bagi IKM kerupuk sukun garut di Kecamatan Sukorame, pelatihan pembuatan kurma tomat dan manisan mangga bagi masyarakat penghasil tembakau di Kecamatan Ngimbang.

1) Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur.

Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan pengembangam infrastruktur untuk menunjang kegiatan diwilayah selatan Kabupaten Lamongan.

Pengembangan infrastruktur tersebut berupa jalan, permukiman, jaringan irigasi



dan jaringan listrik yang menjadi kebutuhan bahkan menjadi syarat sebuah pembangunan wilayah.

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah selatan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, dalam hal ini adalah

Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program kegiatan. Berdasarkan data yang tercatat pada laporan kegiatan bahwa pada

tahun 2010 telah dilaksanakan pembangunan jalan kabupaten, jalan poros desa

strategis, jalan poros desa dan jalan usaha tani (JUT) untuk memperlancar proses kegiatan ekonomi khususnya kegiatan pertanian. Inforaman yang bernam

Bapak Dandoko selaku Kasubid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa:

“...jalan poros desa itu jalan utama yang menghubungkan antara satu kawasan baik kecamatan atau desa dengan kawasan lain kecamatan atau desa, sedangkan jalan poros desa strategis itu jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain misal ibu kota kecamatan ke ibu kota kecamatan lain atau jalan yang strategis secara ekonomi yang menghubungkan dengan jalan negara atau jalan kabupaten”.

Selain itu juga dilaksanakan perbaikan jaringan irigasi tebu pada tahun 2010. Informan yang bernama Bapak Sumali kembali mengungkapkan bahwa:

“Perbikan irigasi tebu adalah untuk menunjang proses pengelolaan tanaman tebu mengingat wilayah selatan cenderung sulit air karena wilayah selatan itu tanahnya lahan tadah hujan”

Terkait dengan pengembangan komoditas pertanian, yang tercatat pada laporan kegiatan agropolitan tahun 2010 bahwa pemerintah daerah juga telah melaksanakan pembangunan sumur air tanah dan pembangunan sumur tanah

dangkal serta pengelolaan lahan dan air (rehab JIDES) untuk meningkatkan pengelolaan lahan pertanian.

m) **Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran**

Pengembangan pemasaran tersebut berupa rehab pasar desa di Kecamatan Sukorame untuk menjaga eksistensi pasar desa dan pemulihan fungsi pasar tradisional. Rehab pasar desa tersebut dilaksanakan karena melihat kondisi pasar yang tidak layak ditempati dan adanya pesaing pasar tradisional seperti pasar modern yang semakin menjamur.

**C. Pembahasan**

**1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.**

**a) Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan kabupaten Lamongan**

Pengembangan kawasan Agropolitan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Pasal 48, mengharuskan semua pemerintah daerah kabupaten yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan Agropolitan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang menyangkut masalah tersebut. Dalam hal ini Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan Agropolitan pada tahun 2008 melalui Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/248/Kep/413.013/2008 juga memiliki dasar



hukum yang sah yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Suyatno (2008:85) mengungkapkan bahwa aspek hukum sebagai landasan pembangunan dapat diinterpretasikan dalam bentuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Diundangkannya kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2011 tersebut karena berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam ruang lingkup tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan.

Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan tersebut bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan yang nantinya juga di harapkan dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Nugroho (2011:110) bahwa salah satu kebijakan jika dilihat dari tujuannya adalah kebijakan *Dinamisasi* yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu. Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang awalnya hanya didasarkan pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/248/Kep/413.013/2008, kemudian berkembang menjadi bagian dari Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 dinilai oleh peneliti sebagai bentuk perkembangan dalam tataran normatif kebijakan.

**b) Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan**

**Kabupaten Lamongan**

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan melibatkan banyak aktor. Aktor-aktor pelaksana kebijakan tersebut tentunya adalah organisasi-organisasi pelaksana baik dari pemerintah daerah maupun organisasi dimasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif kelembagaan yang mana dalam konsep sosial, kelembagaan tersebut merupakan ruang interaksi antar aktor mengingat bahwa terdapat banyaknya aktor yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan. Menurut Soekanto (2001:67) bahwa proses sosial yang disebut juga sebagai interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin (lihat dalam Soekanto, 2001:67) adalah:

“...hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pengembangan kawasan Agropolitan salah satunya yaitu melalui pengembangan kelembagaan. Pembentukan tim pokja pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Nomor 188/91/Kep/413.013/2008 merupakan salah satu wujud dari pengembangan kelembagaan. Hal tersebut dinilai oleh peneliti



sebagai upaya penguatan secara internal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan karena Anggota Tim Pokja merupakan para *Top Leader* masing-masing SKPD yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.

Mengingat bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan sangat kompleks, maka melibatkan banyak aktor implementasi dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yaitu beberapa SKPD sebagai pelaksana teknis seperti yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya.

Maka dengan demikian, pembentukan tim pokja sangat dibutuhkan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan. Namun keberadaan tim pokja tersebut belum memunculkan perubahan yang signifikan terhadap pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Jika kita lihat berdasarkan fungsinya, maka salah satu fungsi tim pokja yang sangat penting dalam implementasi kebijakn adalah membuat usulan program khusus Agropolitan yang seharusnya diekankan kepada seluruh SKPD terkait, namun peneliti menilai bahwa tim pokja belum masih kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi tersebut. Hal tersebut tercerminkan dalam pernyataan salah satu informan dari Dinas PU Pengairan yang menyatakan sebagai berikut:

“Kegiatan-kegiatan itu memang dilaksanakan diwilayah Agropolitan, tapi bukan semata-mata dengan adanya kebijakan agropolitan terus kemudian program itu diselenggrakan, tapi memang mengacu pada tugas dari PU Pengairan yaitu menyediakan air baku dan irigasi, hanya saja kebetulan berada di wilayah Agropolitan. Begitu juga SKPD

lainnya. Selama ini SKPD hanya dimintai laporan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah selatan saja oleh BAPPEDA. Seharusnya kadang penekanan-penekanan dari BAPPEDA kepada SKPD terkait program-program apa saja yang diusulkan terkait pengembangan kawasan Agropolitan. Selama ini belum ada tindakan tersebut, hanya undangan rapat yang juga baru-baru ini”.

Berdasarkan ungkapan informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama ini kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah selatan masih sebatas kontrol terhadap kegiatan rutin SKPD yang berada di wilayah Agropolitan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaporkan oleh BAPPEDA sebagai kegiatan yang menunjang Agropolitan. Hal tersebut dinilai oleh peneliti sebagai sebuah strategi sekaligus sebagai bentuk implementasi kebijakan yang kurang ideal. Dikatakan sebagai strategi karena memang dari tim pokja sendiri belum membuat usulan program kepada SKPD dan belum melakukan penekanan-penekanan kegiatan khusus Agropolitan. Tindakan tersebut dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi implementasi kebijakan melalui pengawalan beberapa program-program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang berada di wilayah selatan karena dianggap dapat menunjang pengembangan kawasan Agropolitan.

Disamping itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi kebijakan yang kurang ideal karena peneliti menilai bahwa dengan belum dibuatnya usulan program dan belum adanya penekanan dari Tim Pokja kepada SKPD menunjukkan bahwa tim pokja belum melaksanakan fungsinya



secara maksimal. Jika mengacu pada implementasi ideal Linebery bahwa salah satu unsur implementasi kebijakan yaitu organisasi pelaksana, dalam hal ini adalah Tim Pokja Agropolitan Kabupaten Lamongan belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada implementasi kebijakan pengembagn kawasan Agropolitan karena seharusnya Tim Pokja membuat usulan program khusus Agropolitan dan ditekankan kepada SKPD terkait. Sehingga SKPD sebagai pelaksana teknis dapat mengetahui program khus apa saja yang harus dilaksanakan untuk pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Kemudian aktor pelaksana selanjutnya adalah kelembagaan dimasyarakat. Pengembangan kelembagaan masyarakat merupakan dimensi yang penting. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 bahwa kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan pedesaan, dengan demikian dalam mewujudkan sebuah kawasan Agropolitan diperlukan pembangunan manusia melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan lembaga (*Sosial Institution*) tersebut diwujudkan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat diberbagai bidang yang meliputi kelompok tani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan), Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), kelompok tani organik, kelompok ternak dan koperasi wanita (Kopwan). Soekanto (2001:217) mengungkapkan bahwa *social institution* menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat, *social-institution* juga dapat disebut sebagai pranata sosial. Koentjaraningrat

(lihat dalam Soekanto, 2001:217) mengungkapkan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, mengingat bahwa kawasan agropolitan merupakan kawasan pedesaan yang mana masyarakatnya hidup dengan bergantung pada pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pertanian maka dibutuhkan lembaga kemasyarakatan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan dalam produktifitas pertanian, jika dilihat dari fungsinya, seperti yang diungkapkan Leopold dan Howard (Lihat dalam Soekanto, 2001:219) bahwa lembaga kemasyarakatan adalah:

“... suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubngan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya”.

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah diwilayah Agropolitan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat diwilayah tersebut sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pertanian. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga sebagai saluran bagi SKPD dalam merealisasikan program-programnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dikawasan Agropolitan.



**c) Standard Operating Procedures (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.**

Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah di dasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011.

Perda tersebut sebagai landasan hukum dari kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kebijakan makro. Mengacu pada implemenasi ideal Linebery maka kebijakn tersebut dalam implementasinya harus didukung dengan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan pelaksana tersebut setidaknya diwujudkan dalam bentuk *standard operating procedures* (SOP) sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program kegiatan terkait implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan.

Berdasarkan pemaparan dari informan yang bernama Ibu Siti selaku Kasubid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan yang mengungkapkan bahwa SOP Agropolitan Kabupaten Lamongan memang belum ada, peneliti menilai bahwa belum adanya SOP tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan menjadi tidak ideal dan akan berpengaruh pada proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

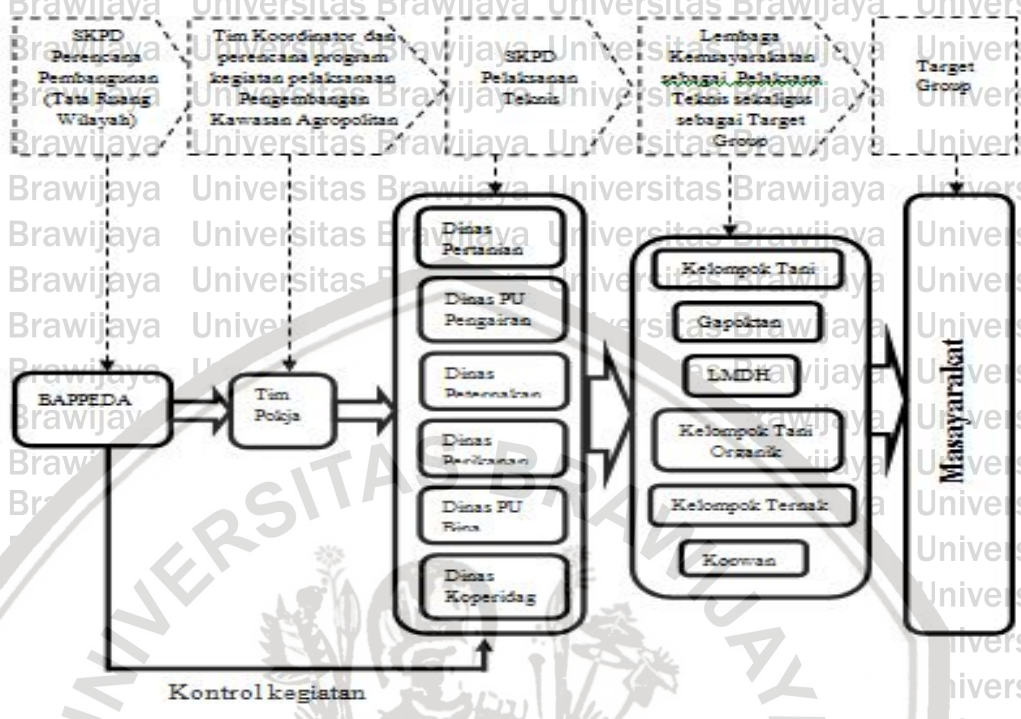
Tidak adanya SOP yang seharusnya menjadi aturan main dalam pelaksanaan program SKPD terkait, maka pelaksanaan program-program kegiatan oleh SKPD menjadikan tidak beraturan dan akan mengalami

tumpang tindih program dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Salah satu contoh dapat dilihat pada program kegiatan pembangunan JUT misalnya, yang dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PU Bina Marga. Maka disnilah pentingnya SOP untuk mengatur hal-hal demikian, sehingga jelas aturannya ketika ada program yang membutuhkan kerja sama dua atau lebih SKPD. Selain itu, dengan adanya SOP SKPD dapat melaksanakan kegiatannya sesuai koridor yang telah ditentukan.

**d) Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan pengamatan dilapangan, peneliti dapat melihat fungsi dari masing-masing aktor pelaksana kebijakan. Dari fungsi-fungsi tersebut dan beberapa hasil diskusi dilapangan dapat di tarik beberapa garis koordinasi antar aktor tersebut. Koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan dapat digambarkan oleh peneliti sebgia berikut:





**Gambar. 8 Alur Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan**  
 Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan ungkapan informan dari PU Pengairan yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menilai bahwa koordinasi antar SKPD masih kurang. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya ego sektoral antar SKPD seperti tersirat secara jelas pada ungkapan informan tersebut. Kurangnya koordinasi menjadi penyebab minimnya komunikasi antar SKPD. Soekanto (2001:74) mengungkapkan bahwa dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan perasaan – perasaan suatu kelompok manusia atau orang-perongan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain. Sehingga dengan adanya komunikasi dalam kontak sosial diharapkan terjadi sebuah kerjasama. Emory (lihat dalam Soekanto, 2001:74) mengungkapkan bahwa:

“...komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan tetapi tidak selalu komunikasi menghasilkan kerja sama bahkan suatu pertikaian mungkin terjadi sebagai akibat salah faham atau karena masing-masing tidak mau mengalah”.

Minimnya komunikasi antar SKPD akan berdampak pada proses kerjasama yang tidak maksimal. Charles (lihat dalam Soekanto, 2001:80) mengungkapkan bahwa:

“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”.

Maka disinilah pentingnya peran tim pokja dalam menjalin komunikasi.

Tim pokja yang anggotanya adalah beberapa *Top Leader* SKPD pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan baik. Jika komunikasi dan kerjasama dalam tim pokja tersebut tidak berjalan dengan baik maka penyamaan persepsi terhadap visi misi dari kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan juga sulit untuk dicapai. Sehingga untuk mengakomodir kepentingan yang berbeda-beda dan harapan untuk dapat memunculkan rasa memiliki antar SKPD terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan menjadi tidak maksimal atau bahkan tidak tercapai sampai saat ini.



Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/91/Kep/413.013/2008 menunjukkan bahwa anggota dari tim pokja adalah para *top leader* dari masing-masing SKPD yang dianggap memiliki kapasitas yang baik dalam membuat keputusan dan mengomunikasikan kepada bawahannya.

Sehingga keputusan yang dibuat para *top leader* tersebut seharusnya memiliki *bergain* dalam memepengaruhi dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada pada organisasi masing-masing. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak tercapai, sehingga dinilai oleh peneliti bahwa tim pokja memang masih sebatas formalitas dan belum menjalankan tugasnya secara maksimal dan hal tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan pengembangan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

**e) Realisasi kegiatan program-program pengembangan kawasan**

**Agropolitan Kabupaten Lamongan**

Pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan pengemangan komoditas pertanian, peternakan maupun pertanian. Pengembangan komoditas pertanian di wilayah Agropolitan merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Sesuai dengan tipologi kawasan Agropolitan, wilayah selatan Kabupaten Lamongan yang ditetapkan sebagai kawasan Agroplitan termasuk dalam sistem usaha perkebunan. Sistem usaha perkebunan memiliki tipologi kawasan berbentuk dataran tinggi, dengan tekstur lahan berbukit, dekat

dengan kawasan konservasi alam (Pedoman Umum PKA Jawa Timur, 2010:13).

Wilayah selatan Kabupaten Lamongan tersebut memiliki beberapa komoditas unggulan pertanian. Komoditas unggulan pertanian (Pedoman Umum PKA Jawa Timur, 2010: 6) adalah:

“Komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) yang dibudidayakan oleh mayoritas masyarakat, terjamin ketersediaannya secara terus menerus, masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir, telah diusahakan dalam industri kecil atau menengah atau besar, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun internasional dan akan atau menjadi ciri khas daerah kawasan”.

Berdasarkan hal tersebut komoditas unggulan diwilayah selatan Kabupaten Lamongan yaitu komoditi tembakau, tebu, jagung dan padi karena komoditi tersebutlah yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat diwilayah selatan dan menjadi ciri khas produk pertanian di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.

Berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan komoditas pertanian di wilayah selatan yang memiliki out put seperti pada table berikut:



**Tabel.14 Out Put Kegiatan Pengembangan Pertanian di Kawasan Agropolitan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pembangunan sumur air tanah	Terwujudnya Pengelolaan Lahan yang berkualitas
	Pengelolaan lahan dan air	
2.	Pengadaan alat perajang tembakau	Tersedianya sarana prasarana produksi pertanian
	Pengadan terpal	
3.	PMI Tebu dan P4K	Tersedianya modal bagi petani
4.	Percontohan intensifikasi tembakau Virginia dan tembakau jawa	Meningkatnya penggunaan tembakau yang cocok untuk wilayah selatan Kabupaten Lamongan
5.	Subtitusi tembakau dengan komoditi lain di kawasan Agropolitan	Tercapainya keberagaman komoditas pertanian di wilayah selatan
6.	Pengembangan bibit unggul varitas tembakau unggul	Tersedianya bibit unggul bagi masyarakat
7.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi kegiatan pertanian
8.	Perbaikan jaringan irigasi tebu	Tersedianya irigasi yang memadai bagi masyarakat.
9.	Pembangunan sarana prasarana penyuluhan kehutanan berupa Demplot	Tersedianya sarana prasaran penyuluhan yang memadai.

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Evaluasi Kawasan Agropolitan Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamongan.

**Tabel 15. Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun 2011**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya infrastruktur bagi pertanian
2.	Rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi	Tersedianya jaringan irigasi yang layak
3.	P4K	Tersedianya modal bagi petani
	Pengemangan PMI Padi	
	Pengembangan PMI Tebu	
4.	Pengadaan Hand traktor dan pembinaan	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan lahan
5.	Pertanian/perkebunan tepat guna	Meningkatnya penggunaan tembakau yang cocok untuk wilayah selatan Kabupaten Lamongan
6.	Intensifikasi tembakau Virginia dan pengembangan tembakau vike	
7.	Pengadaan sarana prasarana dan sosialisasi Alsinbun	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan pertanian
8.	Pengembangan pembenihan pembibitan PUAP	Berkembangnya sistem pembibitan

Sumber: Ringkasan Laporan kegiatan yang berlokasi di Agropolitan Tahun 2011, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

**Tabel 16. Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Program	Kegiatan	Out Put
1	2	3	4
1.	Percontohan intensifikasi tembakau Virginia 400 Ha	Bantuan pupuk 100 Kg/Ha	Tersedianya pupuk bagi masyarakat
2.	Percontohan intensifikasi tembakau Jawa 400 Ha	Bantuan pupuk 100 Kg/Ha	
3.	Demonstrasi NPK pada tembakau Virginia 50 Ha	Bantuan pupuk 200 Kg/Ha	



1	2	3	4
4.	Demonstrasi NPK pada tembakau jawa	Bantuan pupuk 200 Kg/Ha	
5.	Demonstrasi pupuk organik pada tembakau Virginia	Bantuan pupuk organic 75 paket	
6.	Pembibitan Tembakau (1,5 juta batang)	Pembibitan tembakau virgina (coker 176 dan T45	Tersedianya bibit bagi masyarakat
7.	Demonstrasi kemitraan tembakau Virginia	Bantuan pupuk 600 Kg/Ha	Tersedianya puouk bagi masyarakat
8.		Pengembangan tanaman turi untuk bahan bakar oven tembakau(2 juta batang)	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian
9.		Pengadaan hand traktor dan peralatan kerja	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan tanah
10.	Pengadaan alat perajang tembakau	Pengadaan alat perajang rol (otomatis) Alat jemur tembakau (widig)	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan hasil produksi
11.		Pengadaan pompa air 5,5 (3 Dim)	Tersedianya sarana prasaran irigasi
12.	Gasifikasi bahan bakar	Pembuatan tungku gasifikasi	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian
	Batubara	Bahan bakar oven (batu bara)	
13.	Intensifikasi tembakau	Pupuk ZK untuk tembakau Virginia Pupuk ZK untuk tembakau jawa	Tersedianya pupuk bagi masyarakat
14.	Pembinaan pengolahan tembakau	Pengadaan terpal plastic	Tersedianya sarana pengelolaan hasil pertanian

1	2	3	4
15.		Fasilitasi PMI Tebu	Tersedianya modal bagi masyarakat
16.	Program pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	Program pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	
17.	Pengembangan perhutani masyarakat pedesaan berbasis konservasi (PPMPBK)	Pengembangan perhutani masyarakat pedesaan berbasis konservasi (PPMPBK)	Tersedianya konservasi hutan masyarakat.
18.	Kebun bibit rakyat (KBR)	Kebun bibit rakyat (KBR)	Tersedianya bibit masyarakat secara mandiri
19.	Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI)	PMI Padi MK	Tersedianya pupuk bagi masyarakat
20		Pengadaan hand traktor	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan lahan

Sumber : Olahan peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Dinas Pertanian dan Kehutanana Kabupaten Lamongan

Berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Kehutanana. Kegiatan yang diselenggarakan merupakan kegiatan sub sistem penyediaan sarana produksi dan kegiatan sub sistem usaha tani atau proses produksi. Sub sistem penyediaan sarana produksi merupakan salah satu sub sistem yang tergabung dalam rangkaian kegiatan agribisnis, Hermawan (Lihat dalam Suyatno, 2008: 34) mengungkapkan bahwa:

“Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran, mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usaha tani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk”



Kegiatan sub sistem penyediaan sarana produksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan yaitu bantuan berupa mesin *hand traktor*, alat perajang tembakau dan terpal serta bantuan mesin pompa air untuk irigasi.

Beberapa bantuan tersebut disalurkan melalui kelompok-kelompok tani agar kemudian dikelola secara bersama-sama oleh anggota kelompok.

Kegiatan selanjutnya adalah sub sistem usaha tani atau proses produksi yang mana menurut Hermawan (lihat dalam Suyatno, 2008: 34) sub sistem usaha tani adalah:

“...mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Disini ditekankan pada usahatani yang intensif dan sustainable (lestari), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka”.

Kegiatan sub sistem usaha tani atau proses produksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan yaitu berupa percontohan intensifikasi bibit tembakau unggul jenis dengan Virginia dan Jawa yang cocok dengan wilayah selatan Kabupaten Lamongan, bantuan pupuk NPK dan ZK dalam bentuk subsidi, peingaktan mutu intensifikasi baik untuk komoditi tebu maupun padi berupa bantuan pinjaman modal dengan bunga kecil.

Beberapa kegiatan tersebut dinilai oleh peneliti belum berjalan maksimal, dari kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani. Seperti halnya subsidi pupuk yang masih dirasa oleh masyarakat kurang tepat. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan informan yang bernama

Bapak Nyoto sebagai berikut:

*“Ruepot petani niki, kelompok tani niku nggeh paketan, ZA tok nggeh boten saget, sampun dipaket ZA kale liyane. Nek saking kelompok niku memang kacek regane tapi nggeh ngoten dipaket. Karepe petani niku lak masio larang tapi nek setunggal tapi cocok kale kebutuhane petani nggeh mboten nopo-nopo sing penting cocok mawon”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa subsidi pupuk dari pemerintah daerah dengan sistem paket dirasa kurang tepat dan kurang menguntungkan petani meskipun dengan harga yang lebih murah. Informan lebih memilih harga sedikit mahal tetapi cocok dengan kebutuhannya.

Informan yang bernama Bapak Titis juga mengungkapkan sebagai berikut:

*“Sing dibutuhaken petani niku mboten wonten, wong paketan ngoten, dipaket sing sae kale sing mboten sae ngoten”*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa dengan sistem paket pada subsidi pupuk menyebabkan produk pupuk dengan mutu baik yang dibutuhkan oleh petani belum tercukupi.

Begitu juga program lain seperti bantuan bibit padi yang dirasa oleh masyarakat masih kurang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Bapak Tantri berikut ini:



*“...nek saking kelompok niku nggeh katah mboten didamele kale tiang-tiang, wong bibite rusuh ngoten, hasile mboten roto, dados nggeh mboten didamel. Tang-tiang niki nggeh tumbas kiambak ten toko-toko pertanian, tumbas sing sae”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa subsidi bibit dari pemerintah daerah banyak tidak digunakan oleh para petani karena mutunya tidak bagus dan hasilnya padi tumbuh tidak rata, sehingga petani memutuskan untuk membeli bibit yang mutunya bagus secara mandiri.

Informan yang bernama Bapak Nyoto kembali mengungkapkan sebagai berikut:

*“Sing sae niku nggeh pari ketan, pari wangi. Tiang-tiang niku nggeh roto-roto saking banyuwangi, tumbas kiambak, bibit saking pemerintah roto-roto mboten didamel soale nek damel bibit saking pemerintah hasile mboten sae, mboten saget roto”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa bibit padi yang bagus dan sering digunakan adalah jenis padi ketan dan padi wangi yang rata-rata berasal dari Banyuwangi. Petani lebih memilih membeli sendiri dari pada menggunakan bibit dari pemerintah daerah.

Informan yang bernama Bapak Titis juga mengungkapkan sebagai berikut:

*“...sak niki kan katah penyakit tanaman, susahe nggeh niku. Mboten wonten bantuan saking pemerintah, Dados petani niki tumbas obat kiambak-kiambak, Lha tumbas obat sing cocok niku wontene nggeh ten Nganjuk, Jombang”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini banyak penyakit tanaman yang menyerang. Hal tersebut menjadi masalah bagi petani karena tidak ada

bantuan dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sehingga petani mengatasi masalahnya sendiri dengan membeli obat hama dan untuk menadapatkan oabt yang cocok harus memebeli di luar kota seperti Jombang dan Nganjuk.

Berdasarkan beberapa ungkapan informan yang telah dipaparkan, peneliti menilai bahwa bantuan melalui subsidi pupuk dan bibit memang sudah berjalan namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak tepat sasaran. Maksud dari tidak tepat sasaran adalah apa yang dibutuhkan oleh petani belum terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang pekanya pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam mengakomodir kebutuhan petani. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan petani belum terpenuhi dan dana yang dialokasikan untuk program kegiatan tersebut menjadi terbuang sia-sia dan produktifitas pertanian di wilayah selatan pun tidak mengalami peningkatan.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pertanian yaitu adanya permasalahan penyakit yang menyerang tanaman. Hal tersebut sangat merugikan petani dan selama ini petani mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri dengan membeli obat-obat untuk menghilangkan penyakit tanaman tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Adapun obat yang banyak digunakan oleh petani yaitu seperti pada gambar berikut ini:





**Gambar 9. Potret Produk Obat Hama Yang Digunakan Oleh Petani di Wilayah Selatan Kabupaten Lamongan**

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti di Lapangan

Penggunaan obat-obatan secara mandiri oleh petani dikarenakan petani tidak memiliki pilihan lain untuk menangani permasalahan pertaniannya. Hal tersebut merupakan akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terhadap perkembangan masalah yang dihadapi para petani. Tenaga dari UPT Pertanian dimasing-masing kecamatan dirasa oleh masyarakat belum bisa membantu. Seperti yang diungkapkan kembali oleh informan yang bernama Bapak Nyoto sebagai berikut:

*“..wonten saking pemerintah nggeh PPL niku, tapi nggeh paling Cuma dikengken mbabati terus Tanami maleh, ngoten mawon. Kados ngepek gampang mawon. Ngoten terus”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa ada PPL tetapi hanya memberikan araha yang sama yaitu untuk memangkas habis tanaman dan menanami lagi lahannya. Informan menilai PPL tersebut mencari cara yang mudah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini dinilai oleh peneliti masih belum maksimal. Sehingga mengakibatkan ketidak puasan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari informasi diluar daerah untuk membeli obat-obat hama yang hanya bisa didapat diluar daerah. Hal tersebut berdampak pada produktifitas pertanian dan keuntungan yang menurun.

Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Bapak Jo sebagai berikut:

*“Panen wingi niku nggeh mboten angsal untung, parine ditelasaken wereng. Dereng tumbas obate niku mawon telas katah. Modal saged mbalik niku pun Alhamdulillah, kados pudi maleh”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa padi yang ditanamnya habis diserang hama wereng, sedangkan biaya untuk memebeli obat hama menghabiskan dana cukup banyak dan hanya berharap modal dapat kembali.

Berdasarkan fakta tersebut peneliti berasumsi bahwa pemerintah daerah perlu melihat perkembangan permasalahan pertanian di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Karena meskipun begitu banyak program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas dari komoditas pertanian akan mengalami hambatan ketika salah satu permasalahan utama para petani yaitu penyakit tanaman belum bisa diatasi.

Setidaknya ada upaya pencegahan atau ada tindakan dari Pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan tersebut.



Selain pengembangan pertanian, pemerintah daerah juga melaksanakan pengembangan peternakan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Kegiatan pengembangan peternakan dapat dilihat pada beberapa table berikut ini:

**Tabel 17. Out Put Kegiatan Pengembangan Peternakan di Kawasan**

**Agropolitan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pembukaan Lahan hijau Pakan Ternak (Rumput gajah, rumput setaria, lamtoro, turi dan gliricia)	Tersedianya pakan ternak alami yang melimpah
2.	Pelaksanaan inseminasi buatan	Berkembangnya peternakan yang lebih cepat.
3.	Pembinaan kelompok ternak	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam beternak.

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Evaluasi Kawasan Agropolitan Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamongan

**Tabel 18. Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pengembangan kawasan peternakan	Tersedianya kawasan peternakan
2.	Pembinaan kemampuan, ketrampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat peternakan di daerah penghasil tembakau	Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan pendapatan peternak di wilayah penghasil tembakau
3.	Peningkatan mutu intensifikasi sapi bibit	Tersedianya bibit ternak bagi masyarakat

Sumber: Ringkasan berdasarkan Laporan kegiatan yang berlokasi di Agropolitan Tahun 2011, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

**Tabel 19. Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Rehab Poskeswan	Tersedianya saran prasarana kesehatan hewan yang layak
2.	Pengembangan alat pengolah kotoran, pengadaan coper dan HMT	Tersedianya alat pengelolaan peternakan
3.	Pengendalian sapi/kerbau betina produktif (PBP)	Terkontrolnya perkembangan terbak sapi
4.	Pengembangan Agrobis peternakan kambing	Berkembangnya agrobis peternakan kambing
5.	Pengadaan mesin tetas	Tersedianya sarana prasarana peternakan

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Pengembangan pertanian dalam arti luas juga mencakup sektor peternakan. Dalam pengembangan kawasa Agropolitan maka diwilayah selatan Kabupaten Lamongan, Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan subsistem agribisnis. Pertama yaitu kegiatan sub sistem agribisnis hulu (*upstream off-farm agribusiness*). Menurut Saragels dan Krisnamurthi (dalam Suyatno, 2008:33) bahwa:

“Sub sistem agribisnis hulu (*upstream off-farm agribusiness*), mencakup kegiatan ekonomi industri yang menghasilkan sarana produksi seperti pembibitan ternak, usaha industri pakan, industri obat-obatan, industri insiminasi buatan dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya”.

Kegiatan sub sistem agribisnis hulu diwujudkan melalui pengadaan alat pengelola kotoran untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani tembakau



yang juga sekaligus sebagai peternak, serta memberikan peluang industri pupuk organik bagi peternak sehingga peluang kerja dimasyarakat bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. Peluang industri dengan penggunaan bahan baku atau *raw material* dari produk pertanian yang ada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan akan menjadikan penghasilan wilayah tersebut menjadi berkesinambungan dengan produk yang dihasilkan diwilayahnya. Sehingga masyarakat petani akan menikmati kesejahteraan sebagai dampak pembangunan. Kesejahteraan masyarakat diangkat dari hasil produksi pertanian masyarakat setempat yang diserap oleh industri tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pemberian bantuan hewan ternak kambing kepada kelompok dan dikelola oleh kelompok untuk didistribusikan kepada petani yang menjadi anggotanya. Bantuan hewa ternak tersebut dimaksudkan untuk pemberian bibit awal kepada peternak untuk nantinya dikembangkan menjadi lebih banyak.

Kedua, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan juga melaksanakan kegiatan subsistem agribisnis budidaya usahatani ternak(*on-farm agribusiness*). Saragels dan Krishnamurthi (lihat dalam Suyatno, 2008:33) mengungkapkan bahwa:

“Subsisten agribisnis budidaya usahatani ternak (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang selama ini disebut budidaya usahatani ternak yang menggunakan sarana produksi usahatani untuk menghasilkan produksi ternak primer (*farm-product*)”

Sebagai upaya untuk mengembangkan peternakan dan menghasilkan produksi ternak primer, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan melaksanakan pengadaan sarana pengelolaan peternakan seperti pengadaan coper (alat pemotong rumput) untuk mengelola pakan ternak serta pengadaan mesin tetas unggas. Beberapa kegiatan tersebut tentunya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana pengelolaan peternakan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan yang tidak produktif untuk tanaman rumput gajah sebagai pakan ternak sapi, pengendalian sapi/kerbau betina produktif (PBP) melalui pemberian insentif kepada peternak serta.

Ketiga adalah kegiatan subsistem jasa penunjang (*supporting institution*). Saragih (lihat dalam Suyatno, 2008:34) mengemukakan bahwa:

“Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*) yaitu kegiatan yang menyediakan jasa dalam agribisnis ternak seperti perbankan, transportasi, penyuluhan, poskesnak, *holding ground*, kebijakan pemerintah (Ditjen Produksi Peternakan), Lembaga Pendidikan dan Penelitian dan lain-lain”.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan juga melaksanakan kegiatan sub sistem jasa penunjang berupa perbaikan sarana kesehatan hewan berupa rehab Poskeswan di Kecamatan Mantup agar pelayanan kesehatan hewan lebih maksimal. Poskeswan di wilayah selatan masih dirasa oleh peneliti masing perlu ditambah jumlahnya. Keempat



yaitu kegiatan pengembangan agrobisnis peternakan kambing untuk menambah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan peternak yang menanam tembakau dan petani yang terkena dampak tanaman tembakau.

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut, masih terdapat program yang dikeluhkan oleh masyarakat yaitu bantuan hewan ternak, biasanya berupa sapi atau kambing. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan informan yang bernama Ibu Munah sebagai berikut:

*“Wonten bantuan wedus mbk, niku mboten wonten hasile, wong weduse iku mati, nggeh namung disukani ngoten mawon mboten wonten di cek, nggeh kulo niki lak mboten ngertos carane ngeramut weduse niku, gampang sakit weduse niku mbk”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa ada bantuan kambing tapi tidak ada hasilnya karena kambingnya mati. Kambing tersebut yang diberikan secara cuma-cuma ternyata mudah sakit dan informan tidak mengetahui cara merawat.

Berdasarkan fakta tersebut peneliti menilai bahwa perlu adanya fasilitas peternakan yang memadai bagi masyarakat, misalnya POSKESWAN lebih dimaksimalkan dan jumlah nya ditambah diwilayah selatan atau mungkin strategi lain yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam pemeliharaan hewan ternak.

Meskipun demikian, setidaknya upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan peternakan di wilayah selatan dapat memacu

keberagaman lapangan kerja diwilayah selatan meskipun belum terlihat hasil yang signifikan terhadap produktifitas hasil peternakan. Mengingat bahwa program pengembangan peternakan diwilayah selatan mulai gencar dilaksanakan pada tahun 2012.

Pengembangan sumber daya manusia juga dilaksanakan oleh pemerintah diwilayah selatan Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat. Adapun output dari masing-kegiatan pengembangan sumber daya manusia apat dilihat pada beberapa table berikut:

**Tabel 20. Out Put Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Agropolitan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pelatihan las dan perbengkelan di desa Manungrejo Kec. Ngimbang	Meningkatnya keterampilan masyarakat dibidang jasa las dan perbengkelan.
2.	Pembinaan industri kecil menengah (IKM) rokok di Desa Ngimbang Kec. Ngimbang	Meningkatnya kemampuan IKM dalam dunia usaha

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Evaluasi Kawasan Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamongan.



**Tabel .21 Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Koperasi  
Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2011**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pembinaan pembentukan LKM dikawasan industri tembakau	Terbentuknya LKM diwilayah Agropolitan
2.	Pembentukan koperasi pabrik rokok	Terbentuknya Lembaga koperasi di wilayah Agropolitan
3.	Pembangunan pasar desa	Tersedianya pasar desa yang layak
4.	Pelatihan pembuatan makanan dan minuman bagi masyarakat dilingkungan industri penghasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Meningkatnya ketrampilan masyarakat.
5.	Sosialisasi sistem manajemen pemasaran dan promosi bagi IKM-IRT pengrajin rokok	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pemasaran dan promosi produk
6.	Sosialisasi bahaya rokok bagi kesehatan dan kebijakan penyelenggaraan undang-undang perlindungan konsumen	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari rokok
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa cukai rokok dan rokok ilegal	Tercapainya keamanan dalam proses perdanga rokok

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan kegiatan yang berlokasi di Agropolitan Tahun 2011, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

**Tabel 22. Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Rehab pasar desa	Tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil produksi yang layak
2.	Pelatihan peningkatan SDM dan penyediaan peralatan bagi IKM ukir kayu	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha kecil menengah
3.	Tera ulang alat UTTP	Terkontrolnya ketepatan sistem jaul beli dimasyarakat
4.	Pelatihan dan peningkatan kualitas produk dan kemasan bagi IKM IRT krupuk sukun dan garut	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan IKM dalam memproduksi dan pemasaran hasil produksinya.
5.	Pelatihan pembuatan kurma tomat dan manisan mangga bagi masyarakat penghasil tembakau.	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dan keberagaman usaha masyarakat.

Sumber : Ringkasan Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

Disisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan penguatan kelembagaan koperasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat petani khususnya di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Koperasi-koperasi tersebut menyediakan pinjaman dari pemerintah daerah untuk para petani yang membutuhkan modal, namun para petani takut untuk meminjam pada koperasi dengan alasan takut tidak bisa mengembalikan pada jangka waktu yang ditentukan sehingga mereka meminjam kepada orang yang biasanya meminjamkan uang dengan bunga yang disepakati. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Ibu Ten sebagai berikut:



*“Koperasi niku nggeh wonten, tapi ngge mboten wani utang ten koperasi, mboten wanine niku nggeh menawi mboten saget balekaken pas tanggale, nggeh niku mbk utang ten tiang sing biasane ngutang aken arto tapi nggeh wonten anakane ngoten”*.

Informan tersebut mengungkapkan bahwa koperasi itu sudah ada tetapi informan tidak berani meminjam kepada koperasi karena takut tidak bisa mengembalikan pada tanggal yang telah ditentukan. Sehingga terpaksa meminjam kepada rentenir.

Berdasarkan ungkapan tersebut peneliti mengasumsikan bahwa rasa enggan masyarakat untuk meminjam di koperasi yang cenderung dengan bunga rendah adalah karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat terkait mekanisme bantuan pinjaman melalui koperasi. Sehingga Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pentingnya sosialisasi sebagai bagian dari penguatan koperasi di pedesaan.

Selain itu juga dilaksanakan pelatihan sektor jasa dan UKM bagi masyarakat oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.

Pelatihan disektor jasa tersebut berupa pelatihan las dan perbengkelan dilaksanakan agar masyarakat memiliki ketrampilan lain yang dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan melalui usaha jasa las dan bengkel sehingga masyarakat memiliki penghasilan tambahan dari usaha tersebut.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2010 juga melaksanakan pembinaan industri kecil menengah (IKM) Rokok di wilayah Ngimbang sebagai upaya peningkatan pengelolaan

hasil komoditi tembakau di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Namun pada tahun 2011 diberlakukan peraturan dari pemerintah pusat terkait penggunaan filter rokok pada industri-industri rokok yang berdampak pada menurunnya industri kecil karena peraturan tersebut mendorong pada biaya produksi rokok menjadi lebih tinggi sehingga industri-industri kecil tidak mampu untuk bersaing dan berdampak pada masyarakat penghasil tembakau.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan pelatihan untuk memicu usaha-usaha kecil di wilayah selatan tetap bertahan. Kegiatan tersebut berupa pelatihan pembuatan kurma tomat dan manisan mangga bagi masyarakat penghasil tembakau di wilayah Ngimbang. Beberapa kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertahankan serta memicu tumbuhnya usaha-usaha kecil di wilayah selatan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Berkembangnya usaha-usaha kecil tersebut memang belum terlihat secara signifikan tetapi bisa menjadi proses awal penguatan UKM di wilayah diwilayah selatan Kabupaten Lamongan.

Pengembangan infrastruktur merupakan penunjang yang juga sangat penting dalam pembangunan wilayah. Adapun kegiatan pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan untuk menunjang pengembangan kawasan Agroplitan memiliki out put yang dapat dilihat pada beberapa table berikut:



**Tabel 23. Realisasi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Agropolitan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Ruas Jalan	Out Put
1.	Jalan Poros Strategis	Rehab jembatan perbaikan jalan Ngasemlemahbang-Kedungmentawar	Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai di wilayah Agropolitan untuk kegiatan pertanian
2.	Pembangunan Jalan Poros Desa	Ds. Mendogo, Slaharwotan, Lawak, Cerme, Munungrejo, Ngasemlemahbang, Lamongrejo, Kedungmentawar, Jejel, Tlemang, Mendogo, Ngimbang, Gagangtingan	
3.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	JUT Ds. Ngimbang	

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Evaluasi Kawasan Agropolitan Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamongan

**Tabel 24. Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Program	Kegiatan
1.	Pembangunan jalan Poris desa	Jl. Ngasemlemahbang-Kedungmentawar
		Jl. Lamongrejo- Slaji
		Jl. Sambeng – Garung
		Jl. Sumberdadi – Kreteranggon – Pamotan
2.	Pembangunan jalan Kabupaten	Jl. Tanjung- Songowareng
		Jl. Mantup – Sambeng
		Jl. Sambeng-Ngimbang
		Jl. Sukorame – Bluluk
		Jl. Bluluk- Ngimbang

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

Pengembangan infrastruktur merupakan hal yang penting sebagai penunjang kegiatan Agropolitan. Alasan pentingnya pengembangan infrastruktur dalam menunjang kegiatan Agropolitan seperti yang di ungkapkan oleh Tambayong (2008) sebagai berikut:

“Faktor penggerak kunci keberhasilan adalah penyediaan infrastruktur agribisnis kawasan untuk menunjang subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran hasil serta subsistem jasa penunjang”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan Agropolitan. Pertama pembangunan jalan baik jalan poros desa maupun jalan kabupaten yang ada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan tentunya dilaksanakan untuk memeperlancar kegiatan di wilayah selatan. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan peneliti menilai belum maksimal tetapi masyarakat merasa lebih terbantu dengan adanya pembangunan jalan tersebut. Informan yang bernama Bapak Tar juga kembali mengungkapkan sebagai berikut:

*“Dalan empun dibangun niku nggeh warga pun matur suwun mbk, dados patani mboten kesusahan nek wonten udan ngoten niku mboten jembrot dalane”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa jalan sudah dibangun saja masyarakat sudah berterimakasih sehingga petani tidak kesulitan karena ketika musim hujan jalan tidak becek. Meskipun demikian, dilevel masyarakat elit yang notabennya memiliki pengetahuan lebih, memiliki pendapat yang



berbeda terkait pembangunan infrastuktur jalan. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Bapak Utomo sebagai berikut:

“...iya jalan masuk kesawah itu memang rusak parah, mungkin ada perbaikan tahun ini, tapi gak tw kapan. Kemarin juga ada pembangun jalan sebelah itu, waktu pak fadli kesini langsung di acc, tapi ya gitu, pembangunannya gak sesuai realisasinya dengan yang di setujui sebelumnya”.



**Gambar10. Potret Jalan Poros Desa Kambangan**

Sumber: Hasil dokumentasi peneliti di lapangan.

Ruas jalan pada gambar tersebut merupakan jalan sepanjang areal pertanian di Desa Kambangan. Jalan tersebut cukup mengalami kerusakan parah, ketika musim penghujan jalan tersebut cukup berbahaya karena licin akibat becek.

Berdasarkan fakta tersebut peneliti menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih belum maksimal karena masih terdapat beberapa wilayah yang belum dilaksanakan pembangunan infrastrukturnya terutama jalan poros desa sepanjang areal pertanian. Sehingga dibutuhkan survey lebih lanjut dari Dinas PU Bina Marga terkait jalan mana saja yang membutuhkan perbaikan.

Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga telah menyediakan infrastruktur permukiman seperti pada table berikut:

**Tabel.25 Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2010**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Penyediaan infrastruktur pemukiman dikawasan Agropolitan Tahap I	Tersedianya infrastruktur pemukiman di wilayah Agropolitan
2.	Penyediaan infrastruktur pemukiman dikawasan Agropolitan Tahap II	

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan yang Berlokasi di Agropolitan Tahun 2011, Dinas PU Cipta Karya Kab.Lamongan

Selain itu juga dilaksanakan pendugaan geolistrik untuk menyelidiki potensi air tanah pada wilayah tembakau sulit air oleh Bagian Ekonomi SETDA Kabupaten Lamongan. Kegiatan lainnya seperti penyediaan infrastruktur permukiman dikawasan Agropolitan tahap 1 dan 2 oleh Dinas PU Cipta Karya. Beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur tersebut dilaksanakan untuk menunjang kegiatan ekonomi diwilayah selatan, yang mana kegiatan ekonomi diwilayah selatan berbasis pada kegiatan pertanian. Meskipun belum maksimal setidaknya sudah mulai tahap pengembangan dan perlu untuk dimaksimalkan lagi.



**Tabel 26. Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Kegiatan	Out Put
1.	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Meningkatnya kemampun dan keterampilan masyarakat di bidang perikanan
2.	Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan	Tersedianya sarana prasarana produksi pakan ternak
3.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan wawasan masyarakat dibidang perikanan

Sumber : Olahan peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Pengembangan komoditas perikanan yang juga merupakan sub usaha tani primer juga menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

Pengembangan komoditas perikanan juga dilaksanakan berupa kegiatan sub sistem penyediaan sarana produksi melalui pemberian paket bantuan budidaya ikan lele di kolam terpal kepada kelompok pembudidaya ikan, peralatan mesin produksi pembuatan pakan berupa paket bantuan peralatan mesin pembuat pakan ikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan beberapa program kegiatan yaitu berupa pelatihan pengelolaan budidaya perikanan dikolam terpal oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan guna meingkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pengelolaan perikanan dengan sistem yang dapat dikembangkan diwilayah selatan

Kabupaten Lamongan yaitu berupa budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam terpal.

Berdasarkan beberapa kegiatan pengembangan perikanan yang telah dilaksanakan diwilayah selatan dinilai oleh peneliti sebagai upaya untuk meningkatkan keberagaman lapangan kerja agar masyarakat memiliki penghasilan tambahan, khususnya para petani tembakau. Program pengembangan perikanan memang belum menunjukkan hasil yang signifikan tetapi setidaknya berhasil memicu masyarakat diwilayah selatan untuk mulai membudidayakan perikanan. Mengingat bahwa program pengembangan perikanan juga mulai gencar dilaksanakan tahun 2012

**Tabel 27. Out Put Kegiatan di Kawasan Agropolitan Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Program	Kegiatan	Out Put
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran sungai	Pengerukan kali Prijetan	
2.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Perbaikan waduk Cerokan	
3.	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Perbaikan jaringan irigasi waduk Bowo	Tersedianya sarana prasarana irigasi yang layak bagi masyarakat
4.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air	Pengerukan waduk Sambilan	
		Pengerukan waduk semampirejo	
		Pengerukan waduk Riinganom	



1	2	3	4
5.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Pemeliharaan bangunan dan pintu air Pembelian bahan dan peralatan kerja	Terpenuhiannya keamanan masyarakat terhadap bahaya banjir

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan

Kedua, pengembangan infrastruktur irigasi seperti perbaikan beberapa waduk dan sungai di wilayah selatan oleh Dinas PU Pengairan, selain itu Dinas Pertanian dan Kehutan juga melaksanakan pembangunan sumur air tanah dan tanah dangka guna membantu pengelolaan lahan pertanian. Pengembangan infrastruktur irigasi dinilai oleh peneliti belum maksimal karena masih banyak keluhan masyarakat terkait saluran irigasi. Hal tersebut diungkapkan oleh informan yang bernama Bapak Tantri sebagai berikut:

*“Nggeh niku, nek niat nyukani bantuan nggeh niku kangge pengairan soale ten ngriki angel tuyo, sing penting niku nggeh tuyo niku, kali ten ngriki niku nggeh nek mboten jawa mboten wonten tuyone, garing ngoten”.*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa kalau pemerintah daerah berniat memberi bantuan yang penting adalah irigasi karena ketika kemarau sungai disekitar lahan pertanian menjadi kering. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur irigasi masih sangat belum maksimal dan masyarakat masih terkendala pada irigasi.

**Tabel 28. Realisasi Kegiatan di Kawasan Agropolitan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No	Kegiatan	Ou Put
1.	Pembangunan lumbung dan lantai Jemur	Tersedianya sarana prasarana penyimpanan dan pengelolaan padi
2.	Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	Tersedianya lembaga distribusi pangan masyarakat yang kuat
3.	Penguatan modal	Tersedianya modal masyarakat
4.	Penguatan modal lumbung pangan	Tersedianya Modal lumbung pangan
5.	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Beragamnya konsumsi pangan asyarakat

Sumber : Ringkasan Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Tahun 2012, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

Beberapa kegiatan ketahanan pangan perlu dilaksanakan terutama di wilayah pedesaan seperti kawasan Agropolitan untuk memenuhi ketersediaan dan keragaman pangan di daerah khususnya wilayah pedesaan.

Kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan yang telah terealisasi selama ini merupakan kegiatan rutin dari masing-masing SKPD.

Kegiatan rutin SKPD tersebut berada di wilayah Agropolitan yaitu tepatnya di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dilaporkan oleh BAPPEDA sebagai kegiatan Agropolitan karena dianggap dapat menunjang pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.

Adapun kegiatan yang telah dipaparkan pada penyajian data sebelumnya, dapat dilihat output dari masing-masing kegiatan sebagai berikut.



Berdasarkan kegiatan yang telah diapaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan oleh peneliti perkembangan kegiatan dari program-program pengembangan Agropolitan sejak Tahun 2010 sampai 2012 sebagai berikut:

**Tabel 29. Progres kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diKawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1.	Pembinaan kelompok ternak	√		
2.	Pelatihan las dan perbengkelan	√		
3.	Pembinaan dan pembentukan LKM		√	
4.	Pelatihan pembuatan makanan dan minuman bagi masyarakat diwilayah industri tembakau		√	
5.	Sosialisasi sistem manajemen pemasaran dan promosi bagi IKM-IRT pengrajin rokok		√	
6.	Sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen tentang bahaya rokok		√	
7.	Pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat peternak		√	
8.	Sosialisasi Alsinbun		√	
9.	Peningkatan SDM dan penyediaan peralatan bagi IKM Ukir kayu			√
10.	Pelatihan dan peningkatan kualitas produk dan kemasan bagi IKM krupuk sukun dan garut			√
11.	Pelatihan pembuatan kurma tomat dan manisan mangga bagi masyarakat penghasil tembakau			√
12.	Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan			√

Sumber: Hasil Olahan peneliti

**Tabel 30. Progres kegiatan pengembangan Agrobisnis dan Penguatan Modal di Kawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1.	Percontohan intensifikasi tembakau Virginia dan tembakau jawa	√	√	√
2.	Substitusi tembakau dengan komoditi lain di kawasan Agropolitan	√		
3.	Pengembangan bibit tembakau unggul	√		√
4.	PMI Tebu (Penguatan modal)	√	√	√
5.	P4K	√	√	√
5.	Pengembangan kawasan peternakan kambing		√	
6.	PMI sapi bibit			
7.	PMI Padi		√	√
8.	Pengembangan PUAP		√	
9.	Bantuan pupuk untuk tembakau virginia dan jawa			√
10.	Bantuan pupuk organic			√
11.	Pengembangan tanaman turi untuk bahan bakar oven tembakau			√
12.	KBR (Kebun Bibit Rkyat)			√
13.	paket bantuan perikanan kola terpal			√
14.	Pengendalian sapi betina produktif			√
15.	Pengembangan agrobis peternakan kambing			√

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

**Tabel 31. Progres kegiatan pengembangan Sarana Prasarana di Kawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan sumur air tanah	√		
2.	Pengelolaan lahan dan air (Rehab JIDES)	√		
3.	Pengadaan alat perajang tembakau	√		√
4.	Pengadan terpal	√		
5.	Pembukaan lahan hijau n pakan ternak	√		



1	2	3	4	5
6.	Inseminasi buatan	√		
7.	Pengembangan/pemeliharaan jaringan irigasi	√	√	√
8.	Pembangunan sarana prasarana penyuluhan	√		
9.	Pengadaan alat perajang tembakau dan terpal	√		
10.	Pengadaan Hand Traktor		√	√
11.	Pengadaan sarana prasarana Alsinbun		√	
12.	Pengadaan alat jemur tembakau			√
13.	Pengadaan pompa air 5,5 PK			√
14.	Pembuatan tungku gasifikasi dan bahan bakar oven			√
15.	Pengadaan terpal plastik untuk tembakau			√
16.	Rehab/ pemeliharaan saluran sungai (pengairan)			√
17.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampungan air			√
18.	Rehab Poskeswan			√
19.	Pengembangan alat pengolah kotoran, pengadaan coper dan HTM untuk peternakan			√
20.	Penhadaan mesin tetas			√

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

**Tabel 32. Progres Kegiatan Peningkatan Pemasaran Hasil Produk  
Pertanian diKawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1.	Pembentukan koperasi pabrik rokok		√	
2.	Pembangunan pasar desa		√	
3.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa cukai rokok dan rokok ilegal		√	
4.	Rehab pasar desa			√
5.	Tera ulang alat UTTP			√

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

**Tabel 33. Progres Kegiatan Infrastruktur Pedesaan Dikawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1.	Pembangunan JUT	√		
2.	Pembangunan jalan poros strategis	√		
3.	Pembangunan jalan poros desa	√		√
4.	Penyediaan infrastruktur permukiman tahap 1 dan 2		√	
5.	Pembangunan jalan Kabupaten			√

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

**Tabel 34. Progres Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian di Kawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1.	Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan			√

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

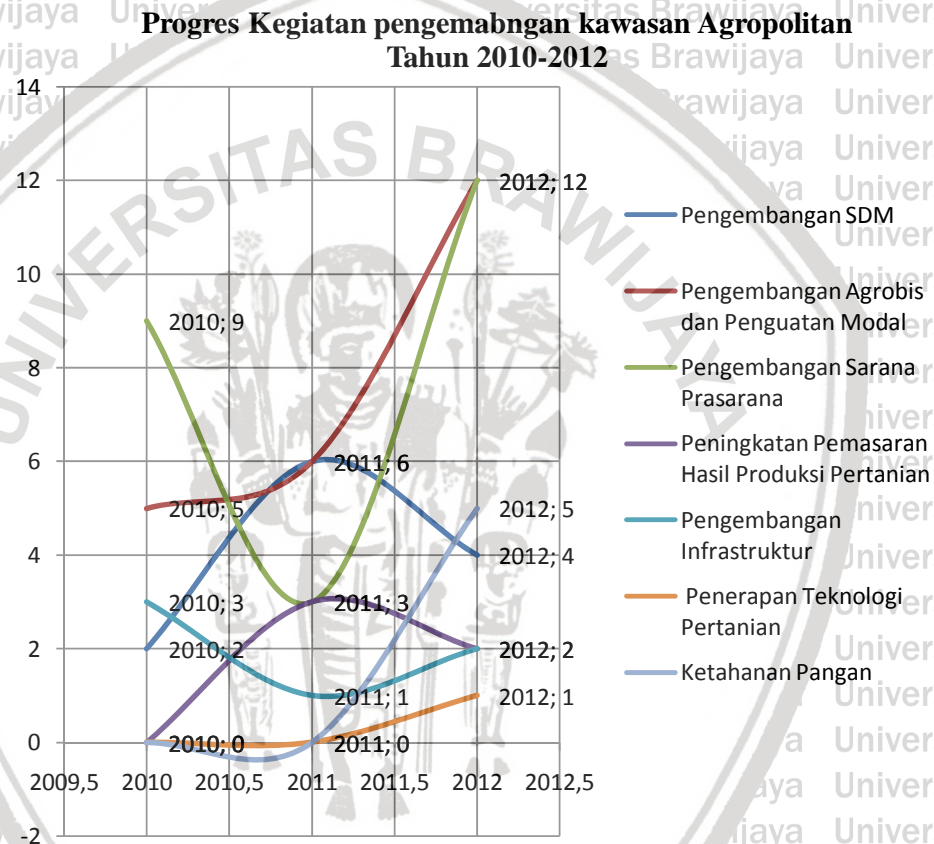
**Tabel 35. Progres kegiatan Ketahanan Pangan di Kawasan Agropolitan Tahun 2010-2012**

No	Bidang	2010	2011	2012
1.	Pembangunan lumbung dan lantai jemur			√
2.	Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat			√
3.	Penguatan modal (bagi yang sudah memiliki lumbung)			√
4.	Penguatan modal lumbung pangan (revol)			√
5.	Percepatan keanekaragaman konsumsi pangan			√

Sumber: Hasil Olahan Peneliti



Dari beberapa tabel yang menyajikan progress dari perkembangan kegiatan Agropolitan, maka dapat digambarkan perkembangan kegiatan tersebut seperti pada grafik berikut:



**Gambar 11. Progres Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa progres dari setiap kegiatan berbeda-beda. Hampir setiap kategori pengembangan mengalami kenaikan dan penurunan kegiatan. Namun hal tersebut bukan masalah karena disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah selatan. Dari beberapa kategori

tersebut, pengembangan Agrobis yang mengalami peningkatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan banyaknya kegiatan agrobis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menunjukkan adanya upaya dari dalam mewujudkan kawasan Agropolitan.

Namun secara keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut mengalami perkembangan secara bertahap meskipun belum berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka peneliti menilai bahwa wilayah selatan yang ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan belum mengalami perubahan secara signifikan karena program-program yang dilaksanakan masih sebatas kegiatan rutin SKPD. Sehingga masih sama dengan kegiatan di wilayah lain yang berada diluar kawasan agropolitan. Oleh karena itu disamping kegiatan rutin SKPD maka dibutuhkan perencanaan kegiatan khusus untuk pengembangan Agropolitan, agar pelaksanaan pengembnagn kawasan Agropolitan dapat berjalan lebih cepat dan wilayah selatan mengalami pembangunan yang lebih pesat disbanding keadaan sebelum dicanangkan sebagai kawasan Agropolitan.

Beberapa kegiatan yang telah dipaparkan tersebut merupakan kegiatan rutin SKPD yang kebetulan berada di wilayah Agropolitan. Peneliti menilai hal tersebut merupakan strategi BAPPEDA Kabupaten Lamongan dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD yang berkaitan dengan Agropolitan.



Langkah yang dilakukan BAPPEDA tersebut tentunya sangat baik karena untuk menghindari stagnasi pada implementasi pengembangan kawasan Agropolitan.

Meskipun demikian, tidak cukup hanya kegiatan rutin SKPD saja dalam melakukan sebuah perubahan terutama dalam mewujudkan Kawasan Agropolitan. Perlu adanya program-program kegiatan khusus dari Tim Pokja dyang diusulkan kepada SKPD dalam rangka meningkatkan kegiatan pertanian di wilayah Agropolitan. Sehingga dengan adanya program khusus sebagai strategi pengembangan kawasan Agropolitan maka diharapkan memberikan perubahan yang signifikan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan dan tidak memunculkan asumsi bahwa kegiatan-kegiatan Agropolitan hanya sebagai klaim atas program-program kegiatan rutin SKPD saja.

**f) Alokasi Sumber Daya Pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.**

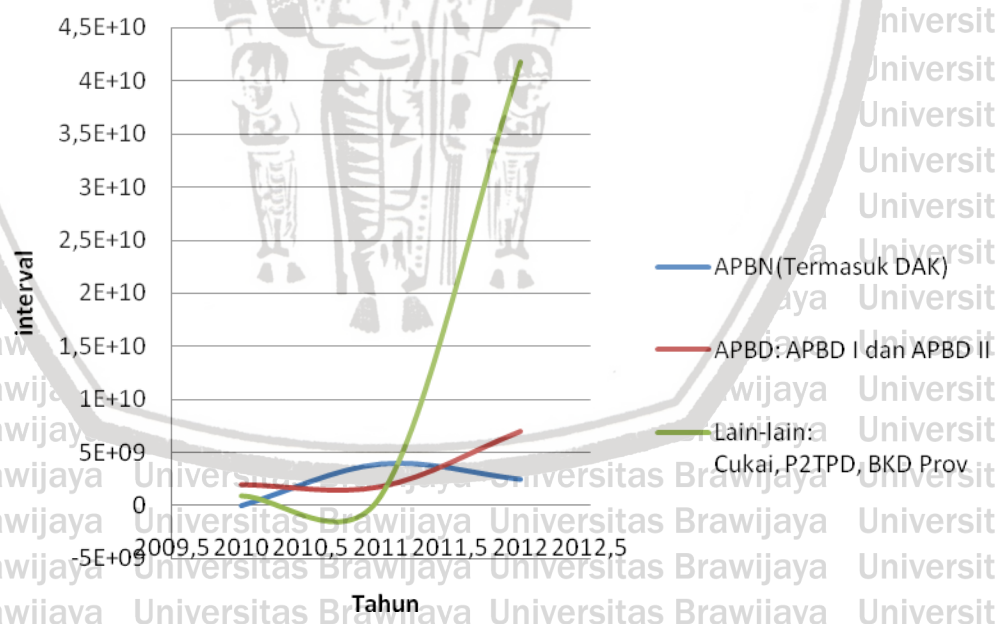
Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya pada penyajian data, peneliti dapat merangkum realisasi anggaran pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan pada tabel berikut:

**Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012**

Sumber Dana		Tahun		
		2010	2011	2012
APBN	APBN		3.600.000.000	1.070.000.000
	DAK		308.505.000	1.399.245.000
APBD	APBD I	300.000.000		40.000.000
	APBD II	1.648.244.500	1.764.230.000	6.957.782.000
Lain-lain	P2TPD	101.100.000		5.892.841.000
	Cukai		919.400.000	35.845.927.757
	BKD Prov	805.000.000		

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012

Sesuai tabel tersebut maka perkembangan realisasi anggaran kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan mulai tahun 2010 hingga 2012 dapat digambarkan melalui table berikut ini:



**Gambar 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti



Pada grafik tersebut dapat kita lihat realisasi anggaran kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan. Anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN termasuk DAK, APBD baik provinsi maupun Kabupaten dan sumber-sumber lain seperti cukai, P2TPD serat BKD Provinsi. Pada Tahun 2010 realisasi anggaran yang bersumber dari APBD yaitu dengan total sebesar Rp. 1.948.244.500,00 dan dana Lain-lain dengan total sebesar Rp. 906.100.000,00. Kemudian pada tahun 2011, realisasi anggaran yang bersumber dari APBD lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu total sebesar Rp. 1.764.230.000,00. Sedangkan realisasi dari sumber lain-lain lebih besar dari tahun sebelumnya dengan total sebesar Rp. 919.400.000,00. Namun pada tahun 2011 kegiatan-kegiatan juga dibiayai oleh APBN total sebesar Rp. 3.908.505.000,00. Dan pada tahun 2012 realisasi anggaran yang bersumber dari APBN lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu total sebesar Rp. 2.469.245.000,00. Sedangkan realisasi anggaran dari APBD dan sumber lain-lain meningkat secara signifikan yaitu APBD total sebesar Rp. 6.997.782.000,00 dan Sumber lain-lain dengan total sebesar Rp. 41.738.768.757,00.

Peningkatan atau penurunan realisasi anggaran tersebut menjadi sebuah kewajaran karena realisasi anggaran tersebut berdasarkan peningkatan jumlah kegiatan SKPD setiap tahunnya. Namun realisasi anggaran tersebut dinilai oleh peneliti sudah sesuai dengan realisasi kegiatan karena perkembangan kegiatan

sejalan dengan perkembangan realisasi anggaran dari tahun 2010 hingga 2012.

Berdasarkan Pembahasan tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang telah dipaparkan dengan mengacu pada implementasi ideal yang dikemukakan oleh Linebery, maka peneliti dapat menilai implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 37. Implementasi Kebijakan Ideal**

No	Indikator Implementasi Ideal	Kondisi Nyata Lokasi Penelitian	Penilaian
1.	Organisasi Pelaksana	Tim pokja, SKPD dan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana tetapi belum maksimal
2.	<i>Standard Operating Procedures</i> (SOP)	Tidak ada	Tidak terlaksana
3.	Koordinasi	Koordinasi antar Aktor pelaksana yaitu Tim Pokja, SKPD dan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksana tetapi sangat kurang
4.	Alokasi Sumber Daya	Alokasi sumber daya pada program-program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD terkait	Terlaksana tetapi belum maksimal

Sumber: Hasil modifikasi peneliti berdasarkan implementasi ideal Linebery

## 2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Selain faktor kebijakan, respon masyarakat juga merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pembangunan (Syamsi, 1968:50). Syamsi (1968:50) mengungkap dua hal sebagai wujud dari respon masyarakat yaitu sikap



(attitudes) dan peran sertan (participation). Selain mengacu pada 2 hal tersebut, peneliti menggunakan satu indikator untuk menilai respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Lamongan yaitu pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada teori sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann yang mendasarkan pengetahuan dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Berger dan Luckmann (1990:31-32) mengungkapkan bahwa kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan par excellence sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (paramount). Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan menentukan bagaimana dalam mewujudkan kenyataannya, dalam hal ini adalah sikap dan tindakan sebagai wujud dari kenyataan. Adapun penilaian respon masyarakat wilayah selatan Kabupaten Lamongan terhadap kebijakan penembangan kawasan Agropolitan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 38. Respon Masyarakat Wilayah Selatan Kabupaten Lamongan**

No	Indikator Respon Masyarakat	Kondisi Nyata Lokasi Penelitian	Penilaian
1	2	3	4
1.	Pengetahuan Masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan	Mayoritas Masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayahnya akan dikembangkan sebagai pusat pertanian Kabupaten Lamongan	Sangat kurang
2.	Sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan pengembangan kawasan Agropoliatn	Sikap msyarakat sangat datar dan cenderung pasif	Sangat kurang

1	2	3	4
3.	Partisipasi Masyarakat dalam mendukung kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan	Tidak ada upaya yang berarti, masyarakat hanya melaksanakan kegiatan pertanian seperti biasa	Sangat kurang dan tidak merubah apa-apa

Sumber: Hasil olahan peneliti

Berdasarkan beberapa ungkapan informan yang telah dipaparkan pada penyajian data fokus penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketidak tahuan para petani mengakibatkan sikap masyarakat yang datar bahkan cenderung pasif dan partisipasi masyarakat juga sangat rendah. Mengingat bahwa kesadaran masyarakat untuk lebih mengembangkan pertanian masih dinilai oleh peneliti masih rendah yaitu sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dibutuhkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk memacu berkembangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pertanian di wilayah selatan. Sehingga masyarakat tanggap terhadap kebijakan yang ada guna mencapai sebuah pembangunan daerah Kabupaten Lamongan.

Bedasarkan ungkapan informan yang bernama Bapak utomo peneliti menilai bahwa elit masyarakat yang mengerti akan kebijakan dalam kenyataannya juga tidak tahu tentang kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Bahkan menilai bahwa perhatian Pemerintah Daerah masih kurang terhadap komoditas unggulan di wilayah selatan khususnya tembakau. Hal tersebut memperkuat penilaian peneliti sebelumnya bahwa sosialisai kebijakan pengembangan kawasan Agropoliatn memang masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi.



Informan seperti Bapak Utomo sebagai perwakilan elit masyarakat di wilayah selatan yang memiliki kedekatan dengan elit Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan merupakan jembatan antara masyarakat level bawah dengan pemerintah daerah baik legeslatif maupun eksekutif. Sehingga peran para elit masyarakat tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan masyarakat dan memicu respon masyarakat untuk menyongsong pembangunan di wilayah selatan terutama melalui kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya berdasarkan pernyataan seluruh informan masyarakat di wilayah selatan, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan sangat minim. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayah selatan berjalan lamban. Dengan ketidak tahuan masyarakat tersebut terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang kemudian menjadikan masyarakat seolah-olah acuh terhadap pembangunan di wilayah selatan. Pengetahuan masyarakat yang minim menyebabkan respon masyarakat terhadap kebijakan juga menjadi rendah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwa memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kebijakan merupakan hal yang penting sebagai awal munculnya respon masyarakat.

Minimnya pengetahuan masyarakat tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat terkait kebijakan

pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Padahal seharusnya masyarakat ditempatkan diikutsertakan baik dalam formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan. Sebelum Pemerintah Daerah menjalankan program-program pengembangan, sebaiknya dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga diperlukan sebuah pendekatan komunikasi dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan Rogers (lihat dalam Idris, 2002) sebagai berikut:

“Mensinyalir bahwa terjadinya kegagalan pelaksanaan program pembangunan perdesaan, salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh terjadinya kesenjangan komunikasi sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat perdesaan menjadi tidak lengkap. Akibat lanjut dari minimnya aliran informasi yang menuju ke wilayah perdesaan tersebut dapat menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang sekaligus juga menghambat peningkatan kesejahteraan hidup mereka”.

Oleh karena dibutuhkan pendekatan komunikasi yang efektif dalam melakukan sosialisasi untuk melakukan transformasi sosial ekonomi melalui program pembangunan di wilayah perdesaan. Menurut Susanto (Lihat dalam Idris, 2002) bahwa untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan perdesaan yang tinggi, diperlukan adanya strategi komunikasi yang tepat. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan pembangunan perdesaan dalam hal ini adalah pengembangan kawasan Agropolitan telah dirancang dan dipersiapkan dengan baik, tidak menjamin bisa dilaksanakan dan berhasil dengan baik apabila tidak didukung oleh metode komunikasi yang efektif.



Mengingat bahwa budaya masyarakat desa yang kekeluargaan, pendekatan komunikasi informal yang dibentuk secara swadaya dan swakelola oleh masyarakat desa lebih sesuai untuk dijadikan saluran sosialisasi. Salah satu model komunikasi yang cocok untuk sosialisasi program kebijakan pada masyarakat desa adalah model komunikasi interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hilbrink dan Lohman (Lihat dalam Idris, 2002) bahwa:

“Model komunikasi interaktif ternyata hasilnya lebih efektif untuk digunakan sebagai salah satu strategi dalam mensosialisasikan program-program pembangunan di perdesaan, karena komunikasi interaktif tidak bersifat instruktif dan penyampaiannya selalu dilewatkan melalui lembaga-lembaga informal pedesaan yang bersifat swakelola”.

Berdasarkan hal tersebut, maka komunikasi interaktif dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mensosialisasikan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Selain itu, partisipasi elit masyarakat dapat dikembangkan lagi untuk memacu partisipasi masyarakat tingkat bawah. Masyarakat elit disini yang dimaksud adalah kelompok-kelompok masyarakat di wilayah selatan yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat disekitarnya seperti pengusaha tembakau, pengusaha tebu dan lainnya yang mana memiliki tingkat kedekatan dengan masyarakat yang cukup intens dan mengerti tentang kebijakan.

Sehingga dengan model komunikasi interaktif dengan melibatkan elit masyarakat maka diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Selain itu juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memahami kebutuhan masyarakat

paling dasar dalam mengembangkan pertanian di wilayah selatan. Dengan masyarakat mengetahui sekaligus memahami kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Meskipun respon masyarakat dinilai masih sangat kurang, namun masyarakat memiliki harapan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat prioritas program kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Sehingga program-program kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berdasarkan program-program kegiatan rutin SKPD saja, melainkan perlu dibuat program-program khusus yang juga di tekankan oleh Tim Pokja kepada SKPD agar pengembangan kawasan Agropolitan berjalan maksimal. Berdasarkan beberapa ungkapan masyarakat terkait harapannya yang telah dipaparkan pada fokus penelitian, menggambarkan bahwa masyarakat memiliki banyak harapan terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di wilayah selatan dan disinilah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sebagai fasilitator untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut.

### **3. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan**

Setiap implementasi kebijakan akan menimbulkan dampak baik dampak positif (*intended*) maupun negatif (*unintended*) dari masing-masing program



kegiatan yang dilaksanakan. Begitu juga kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan yang dalam pelaksanaan program kebijakannya menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pengembangan Agropolitan di Kabupaten Lamongan berdasarkan program-program kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 39. Dampak Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
Kabupaten Lamongan**

No	Indikator Kegiatan	Out Come	Penilaian
1	2	3	4
1.	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan tembakau	Mempermudah masyarakat dalam proses produksi tembakau	Tercapai
2.	Pengembangan bibit unggul	Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan bibit unggul oleh masyarakat	Tercapai tetapi belum maksimal
3.	Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) melalui bantuan modal	Terbantunya petani yang membutuhkan modal	Tercapai
4.	Program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	Meningkatnya pedapatan petani kecil	Tercapai
5.	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan tanah	Meningkatnya kualitas lahan dan mempermudah masyarakat petani dalam mengelola lahan	Tercapai
6.	Pengadaan Sarana Prasarana Irigasi	Mempercepat proses kegiatan pertanian	Sangat Kurang
7.	Pengembangan pelayanan kesehatan hewan dan sarana prasarana peternakan	Meningkatnya pelayanan akan kebutuhan peternakan bagi masyarakat dan menunjang kegiatan peternakan	Tercapai

1	2	3	4
8.	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Meningkatnya minat masyarakat dalam mengembangkann perikanan dan keberagaman lapangan kerja	Tercapai
9.	Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan ikan	Meningkatkan proses kegiatan perikanan dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat	Tercapai
10.	Pelatihan budidaya ikan	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkann perikanan	Tercapai
11.	Pelatihan sektor jasa dan UKM	Meningkatnya potensi masyarakat dan iklim usaha bidang jasa diwilayah Agropolitan	Tercapai
12.	Pengembangan Infrastruktur	Memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat	Tercapai
13.	Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran	Memperlancar proses pemasaran hasil produk pertanian	Tercapai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan table tersebut maka dapat dipaparkan olehe peneliti beberapa hal terkait dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan komoditas pertanian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, baik kegiatan sub sistem penyediaan saran produksi maupun kegiatan sub sistem usaha tani/proses produksi dapat membantu masyarakat dalam memproduksi beberapa komoditi unggulan di wilayah selatan. Sehingga hal tersebut nantinya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi unggulan pertanian di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya



bahwa komoditas unggulan di wilayah selatan adalah tembakau yang mana hasil tembakau tersebut dapat menyuplai industri rokok terbesar yang ada di wilayah selatan yaitu anak perusahaan Samporna dan beberapa industri rokok lainnya diluar Kabupaten Lamongan.

Pengembangan di sektor pertanian yang dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan juga menimbulkan beberapa dampak. Berdasarkan program kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengklasifikasikan beberapa program kegiatan tersebut beserta dampaknya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadaan sarana prasarana baik itu pengelolaan tanah maupun untuk pengelolaan khusus tembakau yang bersifat bantuan cuma-cuma kepada kelompok-kelompok tani akan menstimulan para petani untuk aktif bekerjasama dalam memanfaatkan dan mengelola bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu bantuan tersebut bersifat investasi artinya secara jangka panjang akan berdampak positif karena merupakan modal bagi petani untuk melaksanakan pengelolaan pertanian dengan lebih baik dan menjadi peluang untuk meningkatkan produktifitas pertanian di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.
- 2) Bantuan modal yang bersifat revolving kepada petani tebu, petani tembakau maupun petani padi melalui koperasi guna peningkatan mutu intensifikasi dapat membantu petani yang memiliki kekurangan modal. Sehingga petani tidak perlu meminjam kepada rentenir karena merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal dengan bunga kecil. Meskipun

demikian masih saja terdapat petani yang tidak berani meminjam koperasi dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Ibu Ten sebagai berikut:

*“...mboten wani utang ten koperasi, mboten wanine niku nggeh menawi mboten saget balekaken pas tanggale...”*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan tidak berani meminjam di koperasi karena takut tidak bisa mengembalikan tepat pada tanggal yang ditentukan.

Peneliti menilai bahwa ketakutan petani dalam meminjam kepada koperasi karena pengetahuan mereka yang minim tentang adanya bantuan tersebut. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mengenai bantuan-bantuan yang memang penyalurannya melalui koperasi.

- 3) Pengembangan bibit unggul dan percontohan intensifikasi bibit dengan tembakau jenis virgina dan jawa yang dinilai cocok dengan wilayah selatan Kabupaten Lamongan akan berdampak pada perkembangan budidaya tembakau di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan program pengembangan pertanian belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktifitas pertanian di wilayah selatan karena program yang dilaksanakan masih sama seperti kegiatan-kegiatan dengan wilayah diluar kawasan Agropolitan. Dalam artian ada atau tidaknya kebijakan Agropolitan tersebut perkembangan pertanian di wilayah selatan tidak



menunjukkan perubahan karena memang program-program yang dilaksanakan belum optimal seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Selanjutnya adalah pengembangan komoditi peternakan berupa kegiatan sub sistem agribisnis hulu yang berdampak pada meningkatnya peluang usaha bagi peternak. Sedangkan kegiatan sub sistem agribisnis budidaya usaha tani ternak dan sub sistem jasa penunjang berdampak pada meningkatnya jumlah budidaya ternak diwilayah selatan. Berdasarkan program kegiatan pengembangan komoditi peternakan melalui program kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kategori kegiatan beserta dampaknya yaitu sebagai berikut:

1) Pembinaan kemampuan, ketrampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui dana bantuan hasil tembakau (DBHT) seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, selama dana bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan SDM petani tentunya dapat membantu masyarakat diwilayah selatan dalam. Sehingga masyarakat dapat menggali potensinya dibidang peternakan. Sehingga masyarakat memiliki penghasilan tambahan dengan ketrampilan dibidang peternakan tersebut.

2) Perbaikan sarana prasarana pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan yang bersifat investasi. Sehingga nantinya akan membantu masyarakat dalam proses pengembangan potensi dibidang

peternakan. Dengan perbaikan sarana kesehatan seperti rehab poskeswan misalnya, akan meningkatkan semangat masyarakat mengembangkan peternakan karena masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan hewan ternak dengan lebih baik.

Meskipun demikian masih ada berapa petani yang mengeluh seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Ibu Munah sebagai berikut:

*“Wonten bantuan wedus mbk, niku mboten wonten hasile, wong weduse iku mati, nggek naming disukani ngoren mawon mboten wonten di cek, ngge kulo niki lak mboten ngertos carane ngeramut weduse niku, gampang sakit weduse niku mbk”*

Informan tersebut mengungkapkan bahwa ada bantuan kambinga tetapi tidak ada hasilnya karena mati akibat sakit. Hal tersebut disebabkan bantuan yang diberikan begitu saja tanpa dikontrol dan tidak ada pengarahan untuk merawat ternak.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti berasumsi bahwa masih kurangnya layanan kesehatan hewan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan sehingga masyarakat masih merasa enggan untuk mengembangkan peternakan.

3) Pengembangan agrobisnis peternakan melalui bantuan hewan ternak juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang positif karena merupakan stimulant bagi masyarakat untuk mengembangkan peternakan. Namun pemberian



bantuan yang cuma-cuma kepada masyarakat tidak disertai syarat-syarat tertentu maka akan menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri karena akan menimbulkan sikap ketergantungan akan bantuan yang cuma-cuma. Seharusnya bantuan tersebut dibarengi dengan strategi untuk memacu masyarakat agar berlomba-lomba dalam mengembangkan peternakan serta fasilitas peternakan yang memadai.

Secara keseluruhan program tersebut dinilai oleh peneliti dapat memicu peningkatan keberagaman lapangan kerja diwilayah selatan. Hanya saja masih belum maksimal mengingat bahwa pengembangan peternakan diwilayah selatan mulai dilaksanakan secara intensif pada tahun 2012.

Kegiatan pengembangan komoditi perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diwilayah selatan hanya berupa kegiatan sub sistem pengadaan sarana produksi saja sehingga kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya usaha budidaya ikan diwilayah selatan. Namun setidaknya dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada peningkatn produktifitas perikanan di wilayah selatan.

Pengembangan komoditas perikanan diwilayah Agropolitan yang dilakukan melalui tiga program kegiatan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya juga bedampak terhadap masyarakat. Peneliti meyimpulkan beberapa dampak dari masing-masing program tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pengembangan budidaya ikan lele melalui paket bantuan budidaya yang disalurkan kepada kelompok POKDAKAN

dapat membantu merangsang masyarakat untuk mau mengembangkan perikanan. Dengan paket bantuan tersebut masyarakat tergerak untuk memulai usaha budidaya perikanan dalam hal ini adalah budidaya ikan lele. Sehingga dengan melaksanakan budidaya perikanan masyarakat dapat meningkatkan penghasilan dan produktifitas sektor perikanan mengalami peningkatan.

- 2) Pengadaan peralatan pembuatan pakan ikan merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang mandiri dalam kegiatan disektor perikanan. Dengan bantuan peralatan pembuatan pakan masyarakat akan lebih mandiri dalam mengelola perikanan terutama dalam pembuatan pakan yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sehingga biaya budidaya ikan dapat lebih efisien dan masyarakat pun dapat memanfaatkan peralatan tersebut sebagai peluang usaha pembuatan pakan ikan. Sehingga masyarakat dapat mandiri serta dapat meningkatkan penghasilannya

Dampak pengembangan perikanan secara garis besar sama halnya seperti pengembangan peternakan, kegiatan yang diselenggarakan cukup membantu masyarakat namun belum berpengaruh pada produktifitas perikanan secara signifikan, masih sebatas meningkatkan minat masyarakat dalam mengembangkan perikanan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai macam pelatihan baik sektor jasa maupun



UKM berpengaruh pada keberagaman lapangan usaha di wilayah selatan.

Selain itu juga menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian iklim usaha di wilayah selatan menjadi lebih kuat karena keberagaman dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang juga harus diperhatikan dalam melaksanakan sebuah pembangunan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan juga dilakukan beberapa program terkait pengembangan sumber daya manusia yaitu pelatihan pengelolaan komoditi perikanan. Pelatihan melalui pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan melalui dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat disektor budidaya perikanan. Kemampuan dan ketrampilan yang lebih masyarakat dapat mengembangkan budidaya perikanan dengan lebih baik. Sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan dengan ketrampilan tersebut dan dapat menjangkit peningkatan disektor perikanan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan program kegiatan lainnya seperti pelatihan las dan lain sebagainya yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan adalah untuk menumbuhkan iklim usaha dimasyarakat dengan beragam keahlian. Dengan demikian masyarakat tetap dapat membangun usaha-usaha kecil yang lebih kreatif dan berdaya saing.

Berdasarkan beberapa kegiatan tersebut peneliti menilai bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai macam pelatihan juga membantu munumbuhkan keberagaman lapangan kerja bagi masyarakat serta memicu iklim usaha di wilayah selatan Kabupaten Lamongan meskipun belum terlihat secara signifikan.

Pengembangan infrastruktur merupakan hal yang tidak terlepas dari sebuah pembangunan. Hal tersebut dapat kita lihat pada setiap pembangunan wilayah yang selalu diikuti dan ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan, irigasi, jaringan listrik, permukiman maupun infrastruktur lainnya. Begitu juga pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari pembangunan wilayah pedesaan sehingga pembangunan infrastruktur merupakan hal yang wajib dilaksanakan.

Kegiatan pengembangan infrastruktur di wilayah Agropolitan tentunya menimbulkan dampak terhadap masyarakat Kabupaten Lamongan yang berada di wilayah Agropolitan. Dengan pembangunan infrastruktur baik itu jalan, permukiman, jaringan irigasi, jaringan listrik dan lain sebagainya masyarakat akan terfasilitasi akan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan proses kegiatannya khususnya untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga terfasilitasinya masyarakat akan infrastruktur maka dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi wilayahnya.



Kegiatan pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga tentunya berdampak pada proses kegiatan masyarakat di wilayah selatan. Pengembangan infrastruktur jalan baik jalan poros desa, jalan kabupaten maupun jalan usaha tani tentunya memperlancar masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya terutama kegiatan pertanian karena dengan adanya infrastruktur jalan yang memadai dapat mempercepat pergerakan masyarakat dalam proses kegiatan ekonomi.

Selain itu, pengembangan infrastruktur irigasi pada dasarnya dapat memberi nilai tambah bagi petani dalam melakukan usaha taninya dengan mengoptimalkan pemanfaatan air yang ada. Sedangkan untuk kegiatan pembanguna jaringan listrik tentunya dapat memperlancar kegiatan industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah selatan akan listrik. Dengan demikian kegiatan pengembangan infrastruktur sangat penting dalam proses kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah selatan yang mana sebagai kawasan Agropolitan.

Namun beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur masih belum maksimal terutama infrastruktur irigasi, namun beberapa pengembangan infrastruktur seperti jalan yang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meskipun masih belum menyeluruh dan belum maksimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa temuan dilapangan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan dalam implementasinya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, secara normatif kebijakan pengemabngan kawasan Agropolitan telah mengalami perkembangan. Kedua, organisasi pelaksana kebijakan tersebut dalam hal ini adalah Tim Pokja belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai pelaksana kebijakan. Ketiga, masih belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan bagi SKPD pelaksana kebijakan. Keempat, koordinasi antar lembaga pelaksana belum maksimal sehingga masih menimbulkan egoisektoral antar SKPD. Kelima, Kegiatan program-program pengembangan kawasan Agropolitan yang selam ini dilakanakan mengalami perkembangan secara bertahap, meskipun kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin SKPD yang berada diwilayah Agropolitan. Keenam, sumber daya yang dialokasikan baik manusia maupun finansial dalam realisasinya mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan.



## 2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan

Agropolitan di Kabupaten Lamongan masih belum nampak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lamongan sebagai aktor sekaligus sasaran dari kebijakan.

## 3. Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan

masih belum memberikan dampak secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan program-program pengembangan kawasan Agropolitan masih sebatas kegiatan rutin SKPD. Oleh sebab itu implementasi kebijakan kurang maksimal bahkan cenderung belum memberikan perubahan yang signifikan di wilayah Agropolitan, dalam artian bahwa keadaan sebelum dan setelah di implementasikannya kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan, kondisi wilayah selatan Kabupaten Lamongan belum mengalami perubahan dan dapat dikatakan tetap mengalami stagnasi pembangunan wilayah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang sudah disajikan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan kedepan. Setelah melihat dan mencermati proses pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan hasil tersebut adalah:

1. Perlunya koordinasi antar lembaga pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka mem-backup kebijakan tersebut, adapun institusi yang dimaksudkan seperti Kelurahan, Kecamatan, Bappeda, Dinas pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU Bina Marga, PU Pengairan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa SKPD lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan.
2. Perlu dibuat usulan program-program kegiatan khusus kebijakan pengembangan kawasan agropolitan sesegera mungkin dari Tim Pokja untuk dikoordinasikan dan ditekankan sesegera mungkin kepada SKPD terkait pengembangan kawasan agropolitan.
3. Perlu dibuat SOP (*Standard Operating Procedures*) sesegera mungkin sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program kegiatan terkait pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Lamongan sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridornya dan terarah dengan baik.
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lamongan tidak hanya melalui lembaga formal seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tetapi juga melalui lembaga informal seperti lembaga kemasyarakatan yang sudah



terbentuk dengan bantuan elit masyarakat yang ada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.

5. Perlu adanya penguatan sumber daya manusia dengan menggerakkan para akademisi mengingat bahwa di Lamongan terdapat perguruan tinggi yang mana sumber dayanya dapat di arahkan untuk menunjang pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Sehingga para mahasiswa Perguruan Tinggi yang ada di Lamongan dengan jurusan pertanian, perikanan dan peternakan dapat diarahkan untuk membantu dalam mencari solusi atas masalah-masalah pertanian di Lamongan khususnya wilayah selatan yang diprioritaskan sebagai wilayah pengembangan kawasan Agropolitan. Hal tersebut mengingat kurangnya tenaga akademisi pada UPT di masing-masing kecamatan wilayah selatan. Sehingga para mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah khususnya dalam mewujudkan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto.2010.Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah, diakses pada tanggal 11 mei 2012 dari <http://sobatbaru.blogspot.com/2010/05/pengertian-pembangunan-ekonomi-daerah.html>
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES
- Budiman, A. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Fischer, F., G. J. Miller, and M.S. Sidney., (eds.). 2007. *“Handbook Of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods”*. USA: CRC Press
- Islamy, M.I. 1984. *Prinsip – prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Islamy, Irfan, M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Y.T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gover media
- Moeis, S. 2009. *“Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori Dependensi”*. FPIPS:UPI Bandung
- Najam, A. 1995. *Learning from the Literature on Policy Implementation: A Synthesis Perspective*. IIASA
- Nugroho, D.R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- , 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Parsons, W. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana



Pranoto, S. 2005. *Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan melalui Model Pengembangan Agropolitan (Disertasi)*. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor

Prasetyo, B. 2009. "*Politik Kebijakan: Proses Politik dalam Arena Kebijakan*". diakses pada tanggal 13 mei 2012 dari <http://www.indigo.or.id/>

Putra, F. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rustiadi, E. 2007. *Penataan Ruang dan Penguatan Infrastruktur Desa dalam Mendukung Konsep Agropolitan*. Makalah Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030. LPPM-IPB. Bogor

Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Gafindo Persada

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Y. 2008. *Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang*. Semarang: UNDIP

Syamsi, I. 1986. *Pokok-pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: Rajawali

Tambajong, L.A.M. 2009. *Model Pengembangan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Kelapa yang Berkelanjutan di Sulawesi Utara*. Bogor: IPB

Todaro, M.P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Sebuah Pengantar Tentang Prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Alih Bahasa Drs. Agustinus Subekti. Jakarta : Bumi Aksara.

#### **Peraturan Perundang – undangan**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/91/KEP/413.013/2008  
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN  
AGROPOLITAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/284/KEP/413.013/2008  
TENTANG PENETAPAN SENTRA KAWASAN AGROPOLITAN DI  
KABUPATEN LAMONGAN.**

**PERDA NO.01 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN**

PERDA NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LAMONGAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007  
TENTANG PENATAAN RUANG

**Dokumen Pemerintah Daerah**

BAPPEDA Jawa Timur. 2010. *Pedoman Umum PKA Jawa Timur Tahun 2010*.  
Jatim:BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Lamongan. 2011. *Master Plan Pengembngan Kawasan  
Agropolitan Kabupaten Lamongan 2011*. Lamongan: BAPPEDA

----- 2011. *Naskah Akademik Renacana Tata Ruang  
Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-203*. Lamongan; BAPPEDA

----- 2011. *Laporan Evaluasi Kawasan Agropolitan  
2010*. Lamongan:BAPPEDA

----- 2012. *Laporan Kegiatan Agropolitan Kabupaten  
Lamongan 2011*. Lamongan:BAPPEDA

----- 2012. *Laporan Kegiatan Agropolitan Kabupaten  
Lamongan 2012*. Lamongan:BAPPEDA

BPS Kabupaten Lamongan, 2012. *Lamongan Dalam Angka (Lamongan in Figures)  
2012*. Lamongan:BPS

Dinas Peikanan dan Kelautan Kabupaten lamongan. 2012. *Laporan Akhir Kegiatan  
"Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan Tahun 2012*. Lamongan:  
Dinas Perikanan dan Kelautan.

----- 2012. *Laporan Akhir Kegiatan  
"Pengadaan Peralatan Produksi Pembuatan Pakan Tahun 2012*. Lamongan:  
Dinas Perikanan dan Kelautan.

----- 2012. *Laporan Akhir Kegiatan  
"Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tahun 2012*. Lamongan: Dinas  
Perikanan dan Kelautan.

Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan.2010. *Rencana Peningkatan/  
Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Desa Strategi Kabupaten Lamongan  
Tahun 2010*. Lamongan: Dinas PU Bina Marga



## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Ayudya Fitria Mazdalifa

NIM : 0910310021

Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 20 April 1990

Pendidikan formal :

- BSN Sidorejo II Deket Lamongan tahun 1997-2003
- SMPN 1 Lamongan tahun 2003-2006
- SMAN I Lamongan tahun 2006-2009
- Universitas Brawijaya Malang tahun 2009-2013.

Pendidikan Non Formal :

- Diklat Kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB tahun 2009 dan tahun 2010
- Basic Training (LK I) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FIA UB tahun 2010
- Diklat Kewirausahaan *Student Entrepreneur Center* (SEC) FIA UB tahun 2011
- *Microsoft Office Desktop Training* FIA UB Tahun 2012

Pertemuan Ilmiah yang pernah diikuti :

- Diskusi Periodik “**Centang Perenang Advokasi Lingkungan Dalam Otonomi Daerah**” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB
- Sosialisasi Indonesia Dan ASEAN “**Menuju Pembentukan Komunitas ASEAN 2015**” oleh Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri
- Seminar *Entrepreneur* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB tahun 2010

Pengalaman Organisasi :

- Staff Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM FIA UB tahun 2009
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FIA UB
- Sekretaris Departemen Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB tahun 2010
- Anggota Forum Kajian Islam (FORKIM) FIA UB tahun 2010

- Anggota *Research Study Club (RSC)* FIA UB tahun 2010
- Ketua Departemen Kajian *Studen Entrepreneur Center (SEC)* FIA UB tahun 2011
- Ketua Bidang *Human Resource Development (HRD) Studen Entrepreneur Center (SEC)* FIA UB tahun 2012

Pengalaman Kerja :

- Tentor SMART Bimbel Malang 2011
- Magang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan tahun 2012







**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Basuki Rahmad No. 01 Lamongan Kode Pos :62217  
Telp. (0322)321162, Fax.(0322)322690, e-mail : bappeda @ lamongankab.go.id  
WebSite : www.lamongankab.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor :800/202/413.202/2013**

Menindaklanjuti surat dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi tanggal 14 September 2012, Nomor : 8862/UN10.3/PG/2012 perihal ijin penelitian, bersama ini menerangkan bahwa :

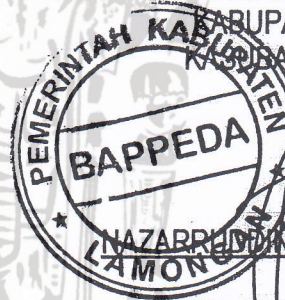
Nama : AYUDYA FITRIA MAZDALIFA  
NPM : 0910310021  
Tanggal : 17 September s/d 17 Nopember 2012

Telah melaksanakan penelitian "Analisa Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Daerah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebaik-baiknya, terima kasih.

Lamongan , 15 Maret 2013

An.KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN LAMONGAN  
KASUBAG UMUM & DALEV



HAZARRIJUN RAKHMAD S.SE.AK.MAP  
PENATA

NIP. 19760418 200312 1 004